



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

WAKIL MENTERI BUMN

2023

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) khususnya unit kerja Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara-R, Kementerian BUMN tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Wakil Menteri BUMN-R merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan, laporan kinerja pencapaian sasaran strategis dan program Wakil Menteri BUMN-R yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sesuai dokumen Perencanaan tahun 2023. LKIP Wakil Menteri BUMN-R tahun 2023 ini menggambarkan berbagai capaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan tujuan untuk mendukung BUMN menjadi *Agent of Development* yang besar, kuat dan lincah. Selain itu, diharapkan kinerja Wakil Menteri BUMN-R selama periode Tahun 2023 dapat terdokumentasikan dengan baik dan diharapkan dapat memberikan gambaran kebijakan yang telah diambil dalam rangka pembinaan BUMN.

Pada tahun 2023 Wakil Menteri BUMN-R mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yang ditunjukkan dengan capaian nilai kinerja organisasi (NKO) yang mencapai skor 108,65 atau memiliki kriteria Sangat Memuaskan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan Pemerintah yang cukup agresif terhadap BUMN binaan Wakil Menteri BUMN-R, misalnya melalui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN), IP PEN, dan juga penjaminan atas pinjaman perusahaan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja di lingkungan Wakil Menteri BUMN-R. Semoga hasil capaian atas target selama periode Tahun 2023 ini dapat menjadi faktor pemacu untuk melaksanakan perbaikan kinerja di unit kerja Wakil Menteri BUMN-R di masa yang akan datang.

Jakarta, 29 Februari 2024
Wakil Menteri BUMN,



Kartika Wirjoatmodjo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Mandat dan Peran Strategis.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
a. Rencana Strategis 2020-2024	5
b. Tantangan yang Dihadapi	9
c. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan 2023.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Evaluasi Kinerja.....	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Output.....	19
a. Net Profit	19
b. EBITDA Margin.....	22
c. <i>Return on Equity</i>	25
d. Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	28
e. Jumlah Negara Tujuan Ekspor	29
f. Jumlah Program Restrukturisasi BUMN	30
g. Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis Terintegrasi	35
h. Persentase Realisasi Anggaran.....	37
i. Nilai <i>Self-assesment</i> SAKIP	38
j. Nilai <i>Self-assesment</i> RB.....	40
k. Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi	41
l. %Total Realisasi <i>Capex</i>	43
m. Pencapaian Target <i>Progress</i> Fisik Proyek Strategis Nasional	46
n. Rata-Rata Penggunaan TKDN.....	47
o. % <i>Top Talent</i> Muda (≤ 42 Tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>	49
p. % Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>	50
C. Pemanfaatan Anggaran.....	50
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
BAB IV PROGRAM STRATEGIS	52
A. Konsolidasi dan Rebranding ATM Himbara	52
B. Integrasi EDC <i>Sharing</i>	53
C. Dukungan Penyelamatan Pemegang Polis PT Jiwasraya (Persero)	54
D. Pasar Karbon	62
E. Percepatan Sinergi dan Integrasi Logistik.....	64

F. Penggabungan Perum PPD dan Perum DAMRI.....	73
G. Proyek LRT Jabodebek.....	76
H. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.....	79
I. Proyek Bali Maritime Tourism hub (BMTH)	80
J. Proyek Bakauheni Harbour City (BHC)	83
K. Proyek Makassar <i>New Port</i> (MNP).....	85
L. Pembubaran BUMN	87
M. Penugasan Peruri dalam Pengembangan Aplikasi SPBE (Sistem pemerintah Berbasis Elektronik).....	89
N. Penugasan Pembangunan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera	91
BAB V PENUTUP.....	95
LAMPIRAN.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BUMN merupakan lembaga yang memiliki posisi sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (v) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, Kementerian BUMN memiliki peran yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Perumusan kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan swasta, tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi di tingkat regional dan internasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unit Wakil Menteri BUMN-R) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN-R memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Wakil Menteri BUMN-R adalah perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Menteri BUMN-R menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa;
- c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor Jasa serta pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor jasa; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Profil Pejabat dan Pegawai



Kartika Wirjoatmodjo

Lahir di Surabaya, 18 Juli 1973. Merupakan lulusan S1 Universitas Indonesia jurusan Ekonomi pada tahun 1996, meraih gelar *Master of Business Administration* dari Erasmus University pada tahun 2001.

Sumber Daya Manusia selama Tahun 2023 di Wakil Menteri BUMN-R dilaksanakan oleh:

No	Nama	Jabatan
1	Kartika Wirjoatmodjo	Wakil Menteri II
2	Muhammad Khoerur Roziqin	Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan
3	Hendrika Nora Oslo Sinaga	Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur
4	Anindita Eka Wibisono	Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun
5	Desty Arlaini	Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik
6	Lilie Mayasari	Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur
7	Yohanes Babtistia Priyatmo Hadi	Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

C. Mandat dan Peran Strategis

1. Kontribusi kepada APBN

Sebagai wujud dari investasi Pemerintah, BUMN di bawah binaan Wakil Menteri BUMN-R berupaya memberikan kontribusi terhadap APBN melalui pajak dan dividen yang menyokong penerimaan bukan pajak (PNBP). Ke depannya, Kementerian BUMN dan BUMN mempunyai komitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada APBN sekaligus di sisi lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan pada APBN.

2. Pelaksana Penugasan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMN yaitu mengejar keuntungan. Oleh karena itu, BUMN di bawah binaan Wakil Menteri-R sebagai salah satu pelaksana penugasan Pemerintah berupaya menjalankan perannya dengan baik dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sekaligus tetap menjaga sustainabilitas BUMN yang mendapatkan penugasan Pemerintah.

3. Lima Prioritas Kementerian BUMN dalam pembinaan BUMN

a. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia

Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan

b. Inovasi Model Bisnis

Restrukturisasi dan inovasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, pertimbangan kebutuhan *stakeholders* dan fokus pada *core business* masing-masing BUMN.

c. Kepemimpinan Teknologi

Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti *data management*, *advanced analytics*, *big data*, *artificial intelligence*, dan lain-lain.

d. Peningkatan Investasi

Mengoptimalkan nilai aset BUMN dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.

e. Pengembangan Talenta

Pengembangan dan pelatihan tenaga kerja, mengembangkan SDM yang berkualitas, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

1. Tujuan Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN bahwa Kementerian BUMN dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara yaitu memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN. Pembinaan badan usaha milik negara tersebut termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan. Adapun fungsi dari Kementerian BUMN, yaitu:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
- 3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan kami;
- 4) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab kami; dan
- 5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kami.

Kementerian BUMN dalam mendukung pencapaian visi menuju organisasi yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia “Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Wakil Menteri BUMN melakukan pembinaan BUMN dengan mengedepankan pendekatan *profitable business*, *sustainable business*, dan *agent of development*. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembinaan BUMN adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang profesional;
- 2) Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN;
- 3) Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN; dan

- 4) Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Sehubungan dengan penetapan tujuan Kementerian BUMN tersebut di atas, dalam pelaksanaannya Wakil Menteri BUMN secara langsung mendukung seluruh tujuan Kementerian BUMN tersebut.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan nasional, maka Kementerian BUMN merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan sasaran strategis organisasi, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Menteri BUMN dalam mendukung pencapaian tujuan strategis yang disebutkan di atas menetapkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-8/MBU/08/2020. Peraturan tersebut menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian BUMN pada tahun 2024. Adapun rincian sasaran strategis Kementerian BUMN, sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai pembina dan pengawas BUMN yang professional	1. Menciptakan SDM yang unggul dan profesional
		2. Menciptakan organisasi yang kuat, sehat, dan akuntabel
2	Mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN	1. Meningkatnya tata kelola BUMN sebagai korporasi
		2. Penguatan kapasitas BUMN
3	Meningkatkan keunggulan dan daya saing BUMN	1. Meningkatnya daya saing BUMN
		2. BUMN unggul di kancah global
4	Memaksimalkan kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan	1. Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (APBN)
		2. Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional
		3. Kontribusi BUMN dalam peningkatan <i>value</i> BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)

Sasaran Strategis Kementerian BUMN tersebut kemudian diturunkan menjadi Sasaran Strategis Wakil Menteri BUMN. Hal ini akan menjadi sebuah pedoman dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di bawah koordinasi Wakil Menteri BUMN. Sasaran Strategis yang terdapat pada Wakil Menteri BUMN yaitu:

1. Kontribusi BUMN dalam peningkatan *value* BUMN sektor jasa untuk Pemegang Saham;
2. Meningkatnya peran BUMN sektor jasa dalam peningkatan ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatnya daya saing BUMN sektor jasa;
4. Terwujudnya restrukturisasi BUMN sektor jasa yang kuat;
5. Terwujudnya implementasi model bisnis yang terintegrasi pada BUMN sektor jasa;
6. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di unit Wakil Menteri BUMN sektor jasa;
7. Terwujudnya transformasi digital pada BUMN sektor jasa;
8. Kontribusi BUMN sektor jasa sebagai agen pembangunan nasional;
9. Meningkatnya penggunaan komponen dalam negeri oleh BUMN sektor jasa; dan
10. Terciptanya inklusivitas bagi perempuan dan talenta muda di Direksi BUMN sektor jasa.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Wakil Menteri BUMN-R yang melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi menuju tercapainya visi misi Kementerian BUMN, pencapaian target sampai dengan tahun 2023 dapat diukur melalui 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia		
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan <i>value</i> BUMN sektor jasa untuk Pemegang Saham	<i>Net Profit</i>
		<i>EBITDA Margin</i>
		<i>Return on Equity</i>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
2	Meningkatnya peran BUMN sektor jasa dalam peningkatan ekonomi kerakyatan	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar
3	Meningkatnya daya saing BUMN sektor jasa	Jumlah Negara Tujuan Ekspor
Prioritas II Inovasi Model Bisnis		
4	Terwujudnya restrukturisasi BUMN sektor jasa yang kuat	Jumlah Program Restrukturisasi BUMN
5	Terwujudnya implementasi model bisnis yang terintegrasi pada BUMN sektor jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis Terintegrasi
6	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di unit Wakil Menteri BUMN sektor jasa	Persentase Realisasi Anggaran
		Nilai <i>Self-Assesment</i> SAKIP
		Nilai <i>Self-assesment</i> RB
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi		
7	Terwujudnya transformasi digital pada BUMN sektor jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi
Prioritas IV Peningkatan Investasi		
8	Kontribusi BUMN sektor jasa sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi <i>Capex</i>
		Pencapaian target fisik Proyek Strategis Nasional
9	Meningkatnya penggunaan komponen dalam negeri oleh BUMN sektor jasa	Rata-rata Penggunaan TKDN
Prioritas V Pengembangan Talenta		
10		% <i>Top talent</i> Muda (<= 42 tahun) dalam <i>nominated talent</i>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	Terciptanya inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN sektor jasa	% Perempuan dalam <i>nominated talent</i>

B. Tantangan yang Dihadapi

Dalam menjalankan proses bisnisnya, cukup banyak pengambilan kebijakan BUMN pada lingkup Wakil Menteri BUMN-R yang juga memerlukan dukungan dan koordinasi dengan unit kerja lain maupun instansi lainnya. Dalam kaitannya dengan unit lain, maka hal ini adalah bagian dari proses bisnis di lingkungan Kementerian BUMN di mana setiap aksi korporasi memerlukan masukan, pendapat, dan evaluasi dari unit-unit yang bertanggungjawab untuk menghindari maladministrasi. Di sisi lain, Kementerian BUMN juga memerlukan dukungan dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan kebijakan pada suatu sektor. Hal ini tidak terlepas dari posisi BUMN yang bergerak di berbagai sektor dan harus mengikuti kebijakan sektoral tersebut.

Selanjutnya, dalam upaya mencapai target rencana kerja tahun 2023, terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN-R, yaitu:

1. Regulasi

Terdapat banyak Peraturan Perundang-Undangan yang harus dipatuhi oleh BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan badan usaha swasta. Selain patuh pada Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, BUMN juga harus patuh pada serangkaian Undang-Undang bidang Keuangan Negara, Undang-Undang Sektoral, dan Undang-Undang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara.

2. Pengawasan

Dalam proses pengawasan BUMN, terdapat banyak institusi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengawasan tersebut, mulai dari BPK, BPKP, KAP, Kementerian/Lembaga Teknis, Auditor Internal, Dewan Komisaris/Pengawas, bahkan DPR/DPRD. Hal ini di satu sisi merupakan hal yang positif untuk menegakkan *good corporate governance* (GCG), namun di sisi lain akan memerlukan sumber daya dan waktu yang cukup yang harus disediakan oleh Manajemen BUMN.

3. Koordinasi Lintas Kementerian/ Lembaga

Berbagai rencana strategis dan aksi korporasi BUMN memerlukan *view* dan persetujuan dari berbagai K/L, sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan *concern* dari setiap K/L. Di lain sisi, setiap K/L memiliki kewenangan dan kebijakan yang berbeda sesuai arah dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan waktu yang cukup untuk melakukan koordinasi lintas K/L.

4. Persaingan Usaha

Pada tahun 2023 yang merupakan masa *post pandemic* COVID-19, berbagai sektor usaha mulai bangkit seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional. BUMN dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga dapat terus bersaing dengan kompetitornya, bukan hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar regional. Selain itu, BUMN juga diharuskan untuk terus berinovasi dan bertransformasi, utamanya digitalisasi produk dan proses bisnis.

5. Birokrasi

Kementerian BUMN sebagai lembaga Pemerintah terdiri dari berbagai unit kerja, sehingga dalam proses pembinaan BUMN tidak terlepas dari sistem birokrasi. Di sisi lain, pembinaan BUMN memerlukan percepatan dalam mendukung aksi korporasi BUMN. Sepanjang tahun 2023, administrasi dan proses bisnis di Kementerian BUMN menjadi tantangan tersendiri, di mana diperlukan percepatan proses bisnis dengan tetap menjaga kualitas layanan.

6. Kondisi Perekonomian Global

Pada tahun 2023, terjadi berbagai kondisi yang menimbulkan ketidakpastian perekonomian global, di antaranya pelemahan ekonomi negara maju, kenaikan tingkat suku bunga, tekanan inflasi global, pengetatan kebijakan moneter yang agresif, serta peningkatan tensi geopolitik yang berdampak pada lonjakan harga komoditas dunia.

C. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan 2023

Perjanjian Kinerja Wakil Menteri BUMN-R Tahun 2023 telah sejalan dengan Renstra Kementerian BUMN Tahun 2020-2024, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan <i>value</i> BUMN sektor jasa untuk Pemegang Saham	<i>Net Profit</i>	Rp T	130,17
		<i>EBITDA Margin</i>	%	35,90
		<i>Return on Equity</i>	%	10,77
2	Meningkatnya peran BUMN sektor jasa dalam peningkatan ekonomi kerakyatan	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	Jumlah Nasabah	15.011.876
3	Meningkatnya daya saing BUMN sektor jasa	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah Negara	21
Prioritas II Inovasi Model Bisnis				
4	Terwujudnya restrukturisasi BUMN sektor jasa yang kuat	Jumlah Program Restrukturisasi BUMN	Jumlah Program	4
5	Terwujudnya implementasi model bisnis yang terintegrasi pada BUMN sektor jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis Terintegrasi	Jumlah BUMN	5
6	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di unit Wakil Menteri BUMN sektor jasa	Persentase Realisasi Anggaran	%	97
		Nilai <i>Self-Assesment</i> SAKIP	Skor	80,19
		Nilai <i>Self-assesment</i> RB	Skor	97,16
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi				
7	Terwujudnya transformasi digital pada BUMN sektor jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi	Jumlah BUMN	6
Prioritas IV Peningkatan Investasi				
8	Kontribusi BUMN sektor jasa sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi <i>Capex</i>	%	60
		Pencapaian target fisik Proyek Strategis Nasional	%	78
9	Meningkatnya penggunaan komponen dalam negeri oleh BUMN sektor jasa	Rata-rata Penggunaan TKDN	%	64,15
Prioritas V Pengembangan Talenta				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
10	Terciptanya inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN sektor jasa	% <i>Top talent</i> Muda (≤ 42 tahun) dalam <i>nominated talent</i>	%	18
		% Perempuan dalam <i>nominated talent</i>	%	18

Adapun penjelasan atas indikator kinerja utama Wakil Menteri BUMN-R adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi BUMN Dalam Peningkatan *Value* BUMN Sektor Jasa untuk Pemegang Saham

Meningkatkan *value* terhadap pemegang saham BUMN tentunya memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara selaku pemegang saham mayoritas BUMN.

a. *Net Profit*

Merupakan total keuntungan perusahaan setelah dikurangi beban dan biaya perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan BUMN dalam memberikan kontribusi finansial bagi Pemegang Saham. *Net Profit* dihitung dengan menjumlahkan total laba bersih seluruh BUMN di bawah binaan Wakil Menteri BUMN-R

b. *EBITDA Margin*

Merupakan rasio profitabilitas yang diukur dengan membagi total EBITDA dengan pendapatan, dan bertujuan mengukur tingkat profitabilitas perusahaan setelah pendapatan/penghasilan usaha dikurangi dengan biaya produksi dan biaya operasional, namun beban depresiasi dan amortisasi tidak dimasukkan dalam biaya produksi dan biaya operasional untuk perhitungan ini, sehingga keduanya tidak menjadi pengurang laba. Khusus untuk perusahaan perbankan, EBITDA diukur dengan PPOP (*pre-provision operating profit*) atau laba operasional sebelum pencadangan

c. *Return on Equity*

Merupakan suatu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya menjadi laba. Apabila perhitungan ROE makin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal, sebab, usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan modal dengan optimal. *Return on Equity* dihitung dengan membagi total laba dengan ekuitas BUMN, dan dinyatakan dengan persentase (%).

2. Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Sebagaimana amanat Undang-Undang, BUMN terus-menerus didorong untuk terus menerus memberikan kontribusi membangun negeri baik dari segi peluang kerja, infrastruktur, serta sarana dan prasarana hingga pada energi baru terbarukan.

a. Jumlah Nasabah Aktif Mekaar

Program Mekaar merupakan bantuan pinjaman usaha secara bertahap tanpa agunan dengan bunga rendah yang menyasar para ibu rumah tangga (IRT) guna membantu perekonomian keluarga yang dikelola oleh salah satu anak BUMN yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

3. Meningkatnya Daya Saing BUMN Sektor Jasa

Dalam memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang/jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, BUMN didorong meningkatkan bisnis dan mengembangkan usahanya.

a. Jumlah Negara Tujuan Ekspor

Peningkatan pasar BUMN ke luar negeri dinilai melalui jumlah negara yang menjadi tujuan ekspor produk-produk BUMN dengan nilai di atas USD10.000. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing BUMN tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri.

4. Terwujudnya Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa yang Kuat

BUMN diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan unggul di kancah global melalui keberhasilan program restrukturisasi BUMN, di antaranya melalui pembentukan *holding* dan *merger*.

a. Jumlah Program Restrukturisasi BUMN

Holding merupakan suatu bentuk aksi korporasi yang menggabungkan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang menjadi induknya, sementara *merger* adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu entitas Perusahaan. Indikator ini diukur dengan jumlah *holding/merger* yang terbentuk pada tahun berjalan dan bertujuan memperkuat daya saing dan membentuk ekosistem bisnis yang sehat.

5. Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa

Dalam memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang/jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, BUMN didorong meningkatkan bisnis dan mengembangkan usahanya, di antaranya melalui inovasi model bisnis yang terintegrasi.

- a. Jumlah BUMN yang Mengimplementasikan Model Bisnis Terintegrasi
Merupakan realisasi inovasi model bisnis yang terintegrasi oleh BUMN, baik dengan BUMN lain, anak usaha, maupun *stakeholder* lain. Diukur dengan jumlah model bisnis terintegrasi yang berhasil dibentuk/dilaksanakan pada tahun berjalan, dan bertujuan mengukur ketercapaian pelaksanaan target inovasi model bisnis terintegrasi oleh BUMN.

6. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Wakil Menteri BUMN Sektor Jasa

Dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi guna menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

- a. Persentase Realisasi Anggaran
Merupakan total realisasi anggaran unit kerja di bawah Wakil Menteri BUMN-R dibandingkan total anggaran unit kerja di bawah Wakil Menteri BUMN-R, diukur dengan % total realisasi anggaran unit kerja di bawah Wakil Menteri BUMN-R dibandingkan total anggaran unit kerja di bawah Wakil Menteri BUMN-R, dan bertujuan untuk mengukur efektivitas penyerapan anggaran unit kerja di bawah Wakil Menteri BUMN-R sesuai dengan perencanaannya.
- b. Nilai *Self-assesment* SAKIP
Merupakan nilai *self-assesment* implementasi sistem akuntabilitas kinerja unit Wakil Menteri BUMN-R, diukur sesuai hasil asesmen, dan bertujuan untuk mengukur capaian implementasi sistem akuntabilitas kinerja unit Wakil Menteri BUMN-R.
- c. Nilai *Self-assesment* RB
Merupakan Nilai *self-assesment* implementasi reformasi birokrasi unit Wakil Menteri BUMN-R, diukur sesuai hasil asesmen, dan bertujuan untuk mengukur capaian implemetasi proses reformasi birokrasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan *good governance*.

7. Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa

BUMN diharapkan tidak hanya menjadi pemain utama di dalam negeri namun juga dapat berkiprah dan diperhitungkan secara global bahkan dapat menjadi *regional champion*, di antaranya melalui transformasi digital.

a. Jumlah BUMN yang Mengimplementasikan Program Digitalisasi

Indikator ini mengukur realisasi program digitalisasi oleh BUMN baik berupa produk maupun proses bisnis, diukur dengan jumlah realisasi produk/proses bisnis digital pada tahun berjalan, dan bertujuan untuk mengukur ketercapaian target program digitalisasi BUMN.

8. Kontribusi BUMN Sektor Jasa sebagai Agen Pembangunan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-Undang, BUMN terus-menerus didorong untuk terus menerus memberikan kontribusi membangun negeri baik dari segi peluang kerja, infrastruktur, serta sarana dan prasarana hingga pada energi baru terbarukan.

a. % Total Realisasi Capex

Merupakan realisasi penyelesaian investasi/capex BUMN dibandingkan target yang ditetapkan, diukur dengan membandingkan realisasi belanja modal BUMN dibandingkan target/anggaran, dan bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan anggaran belanja modal/capex/ investasi oleh BUMN.

b. Pencapaian Target Progres Fisik Proyek Strategis Nasional

Merupakan realisasi penyelesaian proyek PSN, diukur dengan membandingkan realisasi fisik PSN dibandingkan target, dan bertujuan untuk mengukur pencapaian realisasi fisik proyek PSN.

9. Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa

Sebagaimana amanat Undang-Undang, BUMN terus-menerus didorong untuk terus menerus memberikan kontribusi membangun negeri baik dari segi peluang kerja, infrastruktur, serta sarana dan prasarana hingga pada energi baru terbarukan, di antaranya melalui peningkatan penggunaan komponen dalam negeri oleh BUMN.

a. Rata-rata Penggunaan TKDN

Memperhitungkan persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) BUMN Sektor Jasa dalam pengadaan barang dan jasa. Diukur dengan persentase belanja PDN dari total pengadaan barang dan jasa, dan

bertujuan untuk meningkatkan komponen dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

10. Terciptanya Inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Jasa

Dalam mewujudkan BUMN sebagai agen pembangunan nasional yang berdaya saing tinggi, diperlukan adanya SDM yang Unggul dan Profesional.

a. % *Top talent* Muda (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent*

Mengukur jumlah *nominated talent top talent* muda dibandingkan total *nominated talent*. Realisasi dihitung dengan merata-rata persentase *top talent* muda dalam *nominated talent* BUMN tiap keasdepan.

b. % Perempuan dalam *nominated talent*

Mengukur jumlah *nominated talent* perempuan dibandingkan total *nominated talent*. Realisasi dihitung dengan merata-rata persentase perempuan dalam *nominated talent* BUMN tiap keasdepan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja Wakil Menteri BUMN-R dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta hasil pengukuran kinerja Wakil Menteri BUMN-R tahun 2023 menunjukkan capaian yang baik dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,65 dengan kriteria Sangat Memuaskan. Dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator kinerja utama/"IKU", terdapat 14 (empat belas) IKU yang mencapai target dan 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target, sedangkan 1 (satu) IKU lain yaitu nilai *self-assesment* RB belum dapat diukur realisasinya. Adapun IKU yang tidak mencapai target yaitu Pencapaian Target Progres Fisik Proyek Strategis Nasional dengan pencapaian sebesar 88%, tidak tercapainya indikator tersebut di antaranya disebabkan oleh perkembangan kondisi finansial BUMN dan penundaan program/proyek BUMN.

Secara lengkap, evaluasi dan analisis capaian kinerja Wakil Menteri BUMN-R tahun 2023 dapat dijelaskan dalam bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja output. Adapun sebagian besar data kinerja tahun 2023 ini masih menggunakan data laporan keuangan *unaudited* 2023 mengingat belum terbitnya seluruh laporan keuangan *audited* BUMN binaan Wakil Menteri BUMN-R tahun 2023 ketika laporan ini disusun. Rincian pencapaian kinerja Wakil Menteri BUMN-R Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
WAKIL MENTERI BUMN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Bobot	Target	Realisasi	Capaian 2023*	Indeks Capaian 2023	Nilai Kinerja Organisasi
				Tahunan	Tw IV			
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia								
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan <i>value</i> BUMN Sektor Jasa untuk pemegang saham	<i>Net Profit</i>	8	130,17	181,87	120%	10	108,65
		<i>EBITDA Margin</i>	8	35,90%	38,20%	106%	9	
		<i>Return on Equity</i>	8	10,77%	12,75%	118%	9	
2	Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	6	15.011.876	15.065.006	100%	6	
3	Meningkatnya daya saing BUMN Sektor Jasa	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	4	21	28	120%	5	
Prioritas II Inovasi Model Bisnis								
4	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa yang Kuat	Jumlah Program Restrukturisasi BUMN	6	4	4	100%	6	
5	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis terintegrasi	6	5	5	100%	6	
6	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Wakil Menteri BUMN II	Persentase Realisasi Anggaran	8	97%	100%	103%	8	
		Nilai <i>Self-Assesment</i> SAKIP	4	80,19	80,19	100%	4	
		Nilai <i>Self-Assesment</i> RB	4	97,16	-	n.a	n.a	
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi								
7	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi	6	6	6	100%	6	
Prioritas IV Peningkatan Investasi								
8	Kontribusi BUMN Sektor Jasa sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi <i>Capex</i>	4	60%	64%	106%	4	
		Pencapaian Target Progres Fisik Proyek Strategis Nasional	6	78%	69%	88%	5	
9	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa	Rata-rata Penggunaan TKDN	6	64,15%	73,96%	115%	7	
Prioritas V Pengembangan Talenta								
10	Terciptanya Inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta muda di Direksi BUMN Sektor Jasa	% <i>Top talent</i> muda (≤ 42 tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>	8	18%	27%	120%	10	
		% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>	8	18%	23%	120%	10	
Total Nilai Akhir								108,65
Kriteria Pencapaian NKO								Sangat Memuaskan

*) maksimal 120 sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-217/MBU/10/2017

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Output

Tahun 2023 terdapat perubahan portofolio Wakil Menteri BUMN sebagaimana Instruksi Menteri BUMN Nomor: INS-1/MBU/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal perubahan pembagian portofolio Pelaksanaan Tugas Wakil Menteri Dalam Rangka Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Instruksi tersebut, terjadi perpindahan portofolio BUMN, yaitu semula portofolio meliputi BUMN klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung menjadi BUMN klaster manufaktur. Perpindahan portofolio tersebut, menyebabkan perubahan target Perjanjian Kinerja Wakil Menteri BUMN-R yang telah ditandatangani pada tanggal 29 September 2023.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Wakil Menteri BUMN-R Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1.	:	Kontribusi BUMN dalam penguatan <i>value</i> BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)
-----------------------------	---	--

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	
<i>Net Profit</i>	Rp Triliun	130,17	181,87	140%
<i>EBITDA Margin</i>	%	35,90%	38,20%	106%
<i>Return on Equity</i>	%	10,77%	12,75%	118%

a. Net Profit

Renstra Wamen-2023	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
Rp143,97 T	Rp130,17 T	Rp 209,07 T	Rp 181,87 T	-13,01%	140%

Capaian indikator kinerja *Net Profit* merupakan realisasi jumlah laba bersih BUMN dalam pembinaan Wakil Menteri BUMN. Realisasi *Net Profit* tahun 2023 mengalami pertumbuhan 26,32% dibandingkan dengan Rencana Strategis Wakil Menteri BUMN

tahun 2023 dan tercapai 140% dari target, namun mengalami penurunan sebesar Rp27,2 Triliun atau -13,01% dari realisasi Tahun 2022.

Berikut ini merupakan rincian kontribusi masing-masing klaster terhadap pencapaian *Net Profit* Wakil Menteri BUMN-R:

- **Klaster Jasa Logistik**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
Rp4,90 Triliun	Rp6,48 Triliun	Rp7,42 Triliun	14,41%	151,43%

Capaian *Net Profit* BUMN Klaster Jasa Logistik tahun 2023 sangat baik dan terus mengalami peningkatan sehubungan dengan telah pulihnya *traffic*, baik barang maupun penumpang pasca pencabutan status pandemi di Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023. Pencabutan tersebut berdampak positif terhadap performa perekonomian domestik dengan telah kembalinya aktivitas perekonomian seperti keadaan prapandemi, termasuk pada sektor transportasi, logistik dan pariwisata dengan adanya peningkatan mobilitas masyarakat dan kebutuhan barang pokok, salah satunya menggunakan jasa pada BUMN Klaster Jasa Logistik berupa bus, kereta api dan kapal. Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Logistik untuk mencapai target *Net Profit* tahun 2024, yaitu membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan (*customer relationship*) dengan meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan perbaikan tata kelola penugasan, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan BUMN Lingkup Klaster Logistik melalui program Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem di Lingkup BUMN, sehingga mencapai skala ekonomi dan lebih efisien, melakukan pengendalian dan efisiensi biaya, serta melakukan peremajaan dan perbaikan sarana dan prasarana secara berkala.

- **Klaster Jasa Infrastruktur**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
Rp-5,45 Triliun	Rp2,24 Triliun	Rp-0,23 Triliun	-1.074%	4,22%

Pada tahun 2023, terdapat penurunan realisasi *Net Profit* pada Klaster Jasa Infrastruktur dari tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2023 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melakukan *impairment asset* serta mengalami kerugian Rp2 Triliun pada anak Perusahaan yang mengakibatkan laporan konsolidasi pada PT WIKA

mengalami penurunan dari tahun 2022. Namun dibandingkan dengan target, realisasi 2023 lebih baik dibandingkan dengan targetnya karena BUMN klaster Industri hanya memperoleh rugi sebesar Rp-0,23 Triliun atau 4,22% dari target Rp-5,45 Triliun. Hal ini menandakan kinerja BUMN Infrastruktur yang semakin baik, untuk selanjutnya Keasdepan Jasa Infrastruktur akan terus mengupayakan restrukturisasi keuangan BUMN Karya agar dapat memberikan manfaat dan dampak lebih luas bagi pembangunan di Indonesia.

- **Klaster Industri Manufaktur**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
Rp1,47 Triliun	Rp1,14 Triliun	Rp1,47 Triliun	28,95%	100%

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan realisasi laba dengan tingkat **Growth** 28,95% atau sebesar Rp0,33 Triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan pembinaan yang telah dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur yang selalu menitikberatkan pada pertumbuhan bisnis BUMN melalui monitoring evaluasi kinerja keuangan (periodik) pada BUMN Industri Pertahanan.

- **Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
Rp3,54 Triliun	Rp7,22 Triliun	Rp4,44 Triliun	-38,54%	125,42%

Pada tahun 2023, terdapat penurunan realisasi *Net Profit* pada Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun dari tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2022, PT ASABRI (Persero) mengakui pendapatan premi yang berasal dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) sebesar Rp4,55 Triliun dengan Beban Kenaikan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (LMPMD) sebesar Rp637,22 Miliar yang berasal dari penurunan bunga aktuarial yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari 9,7% menjadi 9,5%. Pada tahun 2023, PT ASABRI (Persero) selain mencatatkan pendapatan premi yang berasal dari UPSL sebesar Rp5,16 Triliun, juga mencatatkan Beban Kenaikan LMPMD sebesar Rp5,11 Triliun sehingga tidak berdampak signifikan pada angka *Net Profit* tahun 2023.

- **Klaster Jasa Keuangan**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
Rp103,33 Triliun	Rp110,41 Triliun	Rp140,09 Triliun	26,88%	135,58%

Laba bersih Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp140,09 Triliun, meningkat sebesar Rp29,68 Triliun atau 26,88% dari tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan karena pertumbuhan laba bersih didukung oleh optimalisasi fungsi intermediasi bank dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga penyaluran kredit terealisasi secara optimal.

Sebagai langkah mencapai target *Net Profit* tahun 2024, BUMN Klaster Jasa Keuangan di antaranya akan meningkatkan *digital platform* untuk mengoptimalkan *transactional banking* dan *cross selling* yang fokus pada peningkatan CASA dan FBI yang *sustain*. Di samping itu, BUMN Klaster Jasa Keuangan akan mengoptimalkan posisi Perusahaan Anak untuk mengoptimalkan kinerja konsolidasian.

- **Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
Rp22,29 Triliun	Rp26,41 Triliun	Rp28,69 Triliun	8,63%	128,71%

Laba bersih pada Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media mengalami peningkatan Rp2,28 Triliun atau 8,63% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut utamanya dikontribusikan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Namun Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media selalu berupaya untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan, pengendalian efisiensi biaya, diferensiasi produk, serta melakukan peremajaan aset produktif untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat bersaing dengan *peer to peer industry*.

b. EBITDA Margin

Renstra	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1
N/A	35,90%	41,15%	38,20%	-7,17%

Capaian indikator kinerja *EBITDA Margin* merupakan realisasi total EBITDA dibandingkan dengan total pendapatan pada seluruh BUMN dalam pembinaan Wakil Menteri BUMN. *EBITDA Margin* tahun 2023 terealisasi 38,20% atau tercapai 106% dari target, namun mengalami penurunan dari 41,15% menjadi 38,20% atau menurun

sebesar -7,17%. Berikut ini merupakan rincian kontribusi masing-masing klaster terhadap pencapaian *EBITDA Margin* Wakil Menteri BUMN:

- **Klaster Jasa Logistik**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
17,00%	25,20%	25,30%	0,4%	148,82%

Capaian *EBITDA Margin* Klaster Jasa Logistik tahun 2023 secara umum terus mengalami peningkatan karena kegiatan operasional BUMN Klaster Logistik sudah kembali normal sesuai pencabutan status pandemi di Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023. Pencabutan tersebut berdampak positif terhadap performa perekonomian domestik dengan telah kembalinya aktivitas perekonomian seperti keadaan sebelum pandemi. Peningkatan utamanya dikontribusikan oleh kinerja *EBITDA Margin* Pelindo yang mencapai 36% karena peningkatan laba usaha yang diperoleh dari peningkatan *Margin* dari pelayanan kapal, layanan petikemas dan layanan *non* petikemas, sejalan dengan semakin baiknya kinerja operasional Pelindo pasca standarisasi layanan pelabuhan. Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Logistik untuk mencapai *EBITDA Margin* tahun 2024 yaitu melakukan perbaikan tata kelola penugasan, sehingga tidak merugikan perusahaan, melakukan restrukturisasi keuangan anak perusahaan BUMN jasa logistik termasuk untuk mempercepat divestasi anak/cucu usaha sebagaimana halnya PT Cibitung Tanjung Priok (PT CTP) Port Tollways yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), meningkatkan kinerja *core business* dengan menangkap peluang bisnis yang tidak bergantung penugasan pemerintah (komersialisasi), serta melanjutkan program digitalisasi proses bisnis sehingga dapat lebih efisien.

- **Klaster Jasa Infrastruktur**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
16,62%	20,92%	18,25%	-12,76%	109,81%

Realisasi *EBITDA Margin* pada Kluser Infrastruktur mengalami penurunan – 12,76% dibandingkan pada tahun 2022, disebabkan karena peningkatan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penurunan realisasi *EBITDA*. Realisasi *EBITDA* pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp673 Milyar atau –2,13% yang disebabkan karena peningkatan beban pada PT Waskita Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), dan PT Semen Indonesia (Persero).

- **Klaster Industri Manufaktur**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
12,47%	11,97%	12,73%	6,35%	102,09%

EBITDA *Margin* pada BUMN Klaster Manufaktur terealisasi sebesar 12,73% dari target sebesar 12,47% atau tercapai 102,1% dan mengalami peningkatan 6,35% dari realisasi tahun 2022. Ketercapaian indikator ini disebabkan karena capaian EBITDA dan Pendapatan pada PT Len Industri (Persero) dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan masing-masing kontribusi EBITDA *Margin* yaitu sebesar 10,97% dan 20,27% pada tahun 2023.

- **Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
16,64%	N/A	12,88%	-	77,40%

Realisasi EBITDA *Margin* pada BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun sampai dengan akhir tahun 2023 adalah di bawah target, yaitu sebesar 12,88% atau mencapai 77,40% dari target tahun 2023. Ketidaktercapaian EBITDA *Margin* dipengaruhi oleh penurunan bunga aktuarial dari 9,5% menjadi 7,5% sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-1013/MK/02/2023 yang berdampak pada peningkatan Beban LMPMD PT Taspen sebesar Rp21.152,37 Miliar sehingga mengakibatkan penurunan pada EBITDA PT Taspen (Persero).

- **Klaster Jasa Keuangan**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
47,81%	N/A	48,13%	-	100,67%

Capaian EBITDA *Margin* (PPOP *Margin*) pada klaster keuangan mengalami peningkatan 0,67% dibandingkan dengan target tahun 2023. Capaian ini disebabkan oleh kualitas kredit yang membaik sehingga pembentukan pencadangan (CKPN) mampu dikurangi secara tahunan, yang secara langsung berdampak ke *bottomline* dengan tidak menggerus laba operasional terlalu dalam sehingga capaian PPOP (*pre-provision operating profit*) dapat dioptimalkan.

Sebagai langkah mencapai target *PPOP Margin* tahun 2024, BUMN Klaster Jasa Keuangan di antaranya akan meningkatkan ekspansi bisnis pada sektor prioritas dan mengupayakan pengendalian beban bunga.

- Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
50,00%	50,56%	46,75%	-7,54%	93,50%

Realisasi *EBITDA Margin* pada BUMN Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media pada tahun 2023 hanya sebesar 46,75% atau 93,50% dari target 2023. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan karena peningkatan total pendapatan yang tidak sejalan dengan peningkatan *EBITDA* dikarenakan peningkatan beban pokok pendapatan yang lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan pada PT Danareksa (Persero) sehingga menyebabkan rendahnya nilai *EBITDA Margin* pada BUMN lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media. Namun, Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media akan terus melaksanakan upaya perbaikan dengan mendorong *refocusing* bisnis BUMN agar berfokus pada usaha yang memiliki tingkat *margin/keuntungan* tinggi, sehingga biaya HPP dapat lebih diefisienkan yang akan berimplikasi pada peningkatan *EBITDA*.

c. Return on Equity

Renstra Wamen 2023	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
N/A	10,77%	16,46%	12,75%	-22,54%	118,38%

Capaian indikator kinerja *Return on Equity* merupakan realisasi total *Net Profit* dibandingkan dengan total ekuitas pada seluruh BUMN dalam pembinaan Wakil Menteri BUMN. ROE tahun 2023 terealisasi sebesar 12,75% atau tercapai 118% dari target. Namun mengalami penurunan dari 16,46% menjadi 12,82% atau menurun sebesar -22,54%. Berikut ini merupakan rincian kontribusi masing-masing klaster terhadap pencapaian *EBITDA Margin* Wakil Menteri BUMN:

- Klaster Jasa Logistik**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
5,0%	7,0%	7,2%	2,86%	144%

Capaian realisasi indikator *Return on Equity* tahun 2023 pada BUMN Klaster Jasa Logistik mengalami peningkatan sebesar 2,86% dibandingkan pada tahun 2022. Peningkatan capaian ini utamanya disebabkan kenaikan kinerja portofolio

pada PT INKA yang pada tahun sebelumnya membukukan kerugian, namun di tahun 2023 dapat membukukan laba. Hal ini sejalan dengan sudah terealisasinya kontrak penjualan, baik dari proyek domestik serta ekspor ke New Zealand dan Bangladesh. Secara umum, hampir seluruh BUMN Klaster Jasa Logistik berhasil mencapai bahkan melampaui target ROE sebesar 5% pada tahun 2023, kecuali PT Pelni dan Perum DAMRI yang memiliki capaian ROE sebesar 3% dan 2%. Terdapat beberapa Langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Logistik untuk mencapai target ROE tahun 2024, yaitu meningkatkan *branding* BUMN jasa logistik dengan tujuan menjaga *demand* dan *market share passenger* dan logistik nasional, transformasi PT Pos Indonesia (Persero) menjadi *logistic integrated national distribution*, perbaikan tata kelola penugasan pemerintah, mengusulkan tambahan penyertaan modal negara untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Perusahaan terutama PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

- **Klaster Jasa Infrastruktur**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
-2,16%	1,03%	-0,09%	-108,74%	4,17%

Indikator kinerja *Return on Equity* terealisasi sebesar -0,09% atau mengalami penurunan -108,74% dari realisasi tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena penurunan realisasi *Net Profit* pada BUMN Klaster Jasa Infrastruktur dari tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2023 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melakukan *impairment asset* serta mengalami kerugian Rp2,00 Triliun pada anak Perusahaan yang mengakibatkan laporan konsolidasi pada PT WIKA turun sehingga berdampak pada penurunan realisasi ROE pada tahun 2023.

- **Klaster Industri Manufaktur**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
7,04%	6,01%	6,87%	14,31%	97,59%

Indikator Kinerja *Return on Equity* terealisasi 6,87% dari target 7,04% atau tercapai 97,6% dan mengalami peningkatan 14,31% dibandingkan capaian pada tahun 2022. Ketidaktercapaian indikator *Return on Equity* ini disebabkan karena capaian *Equity* sebesar Rp21,41 Triliun atau 102,6% dari target, lebih tinggi dibandingkan capaian *Net Profit* sebesar Rp1,47 Triliun atau 100,2% dari target. Rendahnya capaian ROE baik pada subklaster Industri Pertahanan dan

subklaster Jasa Survei menunjukkan kurang efektifnya penggunaan modal untuk dapat memperoleh *Net Profit* secara optimal. Tentunya PT Len Industri (Persero) dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) perlu didorong untuk meningkatkan efektivitas penggunaan modal untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

- **Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
5,88%	2,57%	6,89%	97,32%	117,18%

Realisasi *Return on Equity* pada BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun sampai dengan akhir tahun 2023 adalah di atas target, yaitu sebesar 6,89% atau mencapai 117,11% dari target tahun 2023 sebesar 5,88%, serta mengalami peningkatan sebesar 167,94% dari realisasi tahun 2022. Peningkatan capaian ini disebabkan karena peningkatan *Net Profit* pada PT Taspen dibandingkan dengan targetnya, dengan capaian *Net Profit* yaitu sebesar Rp1,33 Triliun.

- **Klaster Jasa Keuangan**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
17,38%	16,17%	17,87%	10,51%	102,82%

Realisasi *Return on Equity* tahun 2023 mencapai 17,38% atau tumbuh 10,51% dari realisasi 2022 dan mencapai 102,82% dari target tahun 2023. Capaian ini selaras dengan pertumbuhan laba bersih Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp140,09 Triliun, meningkat sebesar Rp29,68 Triliun atau 26,88% dari tahun 2022. Hal ini didorong oleh pertumbuhan kredit yang optimal, di samping upaya efisiensi beban bunga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebagai langkah mencapai target ROE tahun 2024, BUMN Klaster Jasa Keuangan di antaranya akan meningkatkan ekspansi pada *high yield loan* dan fokus pada peningkatan FBI yang *sustain* sehingga mencapai profitabilitas yang optimal.

- **Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
12,00%	11,52%	13,96%	21,18%	116,33%

Realisasi *Return on Equity* pada tahun 2023 terealisasi sebesar 13,96% atau 116,33% dari target 2023, dengan *Growth* sebesar 21,18% dari realisasi tahun 2022. Ketercapaian Tingkat ROE secara umum disebabkan kinerja pada BUMN

lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media yang mencatatkan laba bersih diatas targetnya, kecuali untuk Perum PNRI yang membukukan rugi sebesar Rp41,73 Miliar. Untuk dapat meningkatkan ketercapaian realisasi pada tahun 2024, Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media mendorong BUMN untuk melaksanakan upaya efisiensi biaya baik dan mengoptimalkan pendapatan melalui optimalisasi aset, *rightsizing* perusahaan, hingga transformasi BUMN untuk mempebesar skala bisnis perusahaan.

Sasaran Strategis 2	:	Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
----------------------------	---	--

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	
Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	Jumlah Nasabah	15.011.876	15.065.006	100%

d. Jumlah Nasabah Aktif Mekaar

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
15.011.876	13.921.722	15.065.006	8,21%	100%

PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Melalui langkah strategis digitalisasi nasabah PNM, penyediaan wadah pendidikan, serta meningkatkan ikatan secara psikologi dengan nasabah, pada tahun 2023 jumlah nasabah Mekaar mencapai 15.065.006 nasabah, realisasi ini melampaui target sebesar 15.011.876 atau 100% dari target. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, pencapaian ini tumbuh 8,21% dari realisasi tahun 2022 sejumlah 13.921.722 nasabah. Pencapaian ini merupakan upaya manajemen dalam mencapai target jumlah nasabah Mekaar yang ditargetkan Presiden Jokowi untuk mencapai 20 juta nasabah. Sebagai upaya perbaikan, Wakil Menteri BUMN-R senantiasa mendorong PNM yang pada tahun 2021 telah resmi tergabung dalam *Holding* Ultra Mikro dengan induk BRI tersebut, untuk mengoptimalkan sinergi ekosistem Ultra Mikro untuk mengakselerasi pencapaian jumlah nasabah aktif Mekaar.

Sebagai langkah mencapai target nasabah Mekaar tahun 2024, *Holding Ultra Mikro* memiliki inisiatif "Digitalisasi Bisnis Ultra Mikro melalui Pemanfaatan Sinergi *Holding Ultra Mikro*" dengan inisiatif strategis pengembangan produk, memperkuat dan meningkatkan kualitas pemberdayaan, serta digitalisasi proses bisnis.

Sasaran Strategis 3	:	Meningkatnya Daya Saing BUMN Sektor Jasa
----------------------------	---	--

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	
Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah Negara	21	28	133%

e. Jumlah Negara Tujuan Ekspor

Renstra Wamen 2023	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
24	21	20	28	40%	133%

Jumlah negara tujuan ekspor pada tahun 2023 mencapai 28 negara, melampaui target sebanyak 21 negara atau tercapai 133% dari target dan meningkat 40% dari tahun 2022 serta meningkat 16,67% dari target Renstra Wamen BUMN R tahun 2023. Beberapa negara tujuan ekspor pada tahun 2023 ini yaitu New Zealand, Bangladesh, Timor Leste, Filipina, Australia, Fiji, Taiwan, Sri Lanka, Hongkong, Malaysia, Korea Selatan, Maldives, Belgium, Brunei Darussalam, Canada, France, Pakistan, Singapore, Spain, Thailand, Timor-Leste, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Mexico, Chile, dan Georgia. Untuk selanjutnya, pada tahun 2024 akan dimonitor terkait ekspansi bisnis ke luar negeri secara berkala sehingga ekspansi pasar BUMN ke luar negeri lebih massif dengan jumlah negara ekspor lebih banyak.

Sasaran Strategis 4	:	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa yang Kuat
----------------------------	---	--

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	
Jumlah Program Restrukturisasi BUMN	Jumlah Program	4	4	100%

f. Jumlah Program Restrukturisasi BUMN

Realisasi 2022	Realisasi 2023
1) Penyelesaian Inklusi ITDC dalam <i>holding</i> Pariwisata	1) <i>Merger</i> PPD-DAMRI
2) Restrukturisasi Polis PT Jiwasraya	2) Restrukturisasi Waskita
	3) Restrukturisasi Perumnas
	4) Transformasi PFN

Implementasi program restrukturisasi yang dijalankan selama tahun 2023 pada Wakil Menteri BUMN terdiri atas 4 program, antara lain:

1) *Merger* PPD-DAMRI

Persentase pencapaian pelaksanaan peningkatan sinergi dan integrasi BUMN Transportasi Jalan (*Merger* PPD-DAMRI) pada tahun 2023 telah mencapai 100% dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta ke Dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan Menteri BUMN melalui surat Nomor S-858/MBU/12/2022 dan S-859/MBU/12/2022 tanggal 22 Desember 2022. Penggabungan Perum DAMRI dan Perum PPD pada program BUMN Transportasi Jalan diharapkan dapat memberikan *value creation* dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, penggabungan kedua perusahaan diharapkan dapat mengatasi permasalahan transportasi jalan dan memenuhi objektif penggabungan baik dari negara/pemerintah, masyarakat, BUMN Transportasi Jalan maupun lingkungan. Adapun rencana tindak lanjut kedepan pasca Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI adalah sebagai berikut:

- Memastikan pemenuhan aspek legal, pajak, dan keuangan sebagai dampak penggabungan.
- Terkait kewajiban perpajakan pengalihan aset pasca penggabungan, diperlukan kajian sebagai dasar rekomendasi dan/atau pertimbangan surat rekomendasi dari Menteri BUMN kepada Menteri Keuangan RI agar Menteri Keuangan dapat menetapkan dasar pengenaan pajak pengalihan aset pasca penggabungan menggunakan nilai buku, karena hingga saat ini belum ada

peraturan teknis yang mengatur tata cara penggunaan nilai buku sebagai dasar pengenaan pajak pengalihan aset.

- c) Diperlukan penyelarasan struktur organisasi tata kelola dan sistem penggajian pasca penggabungan Perum DAMRI.
- d) Melakukan evaluasi kinerja Perusahaan dan ketercapaian program kerja pasca penggabungan secara berkala serta menyusun langkah-langkah perbaikan dan percepatan dalam rangka menciptakan *value creation* sesuai dengan kajian penggabungan.
- e) Memantapkan pelaksanaan program-program pengembangan bisnis sesuai dengan kajian bersama yang telah disusun

2) Restrukturisasi Waskita Karya

Pada tahun 2023, PT Waskita Karya (Persero) Tbk tengah menjalankan Komitmen Kinerja Berkelanjutan sehubungan dengan pemberian fasilitas dukungan fiskal Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Komitmen Kinerja Berkelanjutan merupakan salah satu dokumen yang berisikan mengenai indikator pengukuran tahun 2021 – 2026 atas dukungan Pemerintah yang diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui surat nomor 178/WK/DIR/2024 tanggal 15 Februari 2024 menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Komitmen Kinerja Berkelanjutan tersebut sampai dengan kuartal IV 2023, dengan progres pokok sebagai berikut:

- a) Divestasi Ruas Tol Inti

Sampai dengan 2023, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah berhasil melakukan divestasi PT Jasamarga Kualanamu Tol, PT Jasamarga Semarang Batang, PT Cinere Serpong Jaya, PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways, PT Semesta Marga Raya, dan PT Pejagan Pemalang Tol Road.
- b) Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi
 - i. Laporan Penyerapan Dana Obligasi
 - Penawaran Umum (Obligasi) tanggal efektif 24 September 2021 dengan hasil bersih Rp1.769 Miliar telah terealisasi 100% sampai dengan 31 Desember 2023.
 - Penawaran Umum (Obligasi IV) tanggal efektif 12 Mei 2022 dengan hasil bersih Rp2.119 Miliar telah terealisasi 100% sampai dengan 31 Desember 2023.
 - Penawaran Umum (Sukuk Mudharabah) tanggal efektif 12 Mei 2022 dengan hasil bersih Rp1.145 Miliar telah terealisasi sebesar Rp1.040 Miliar sampai dengan 31 Desember 2023.

ii. Laporan Penyelesaian Proyek *Underlying* Pinjaman dengan Penjaminan Pemerintah

Berdasarkan hasil perhitungan internal PT Waskita Karya (Persero) Tbk atas penarikan *disbursement* KMK, dari 148 proyek *underlying* pinjaman dengan Penjaminan Pemerintah, terdapat 118 proyek yang sudah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp11,34 Triliun dan telah dilakukan pelunasan Rp6,05 Triliun, sehingga *outstanding* per 31 Desember 2023 sebesar Rp5,28 Triliun.

Dari 148 proyek *underlying* pinjaman dengan Penjaminan Pemerintah tersebut, terdapat 109 proyek yang telah selesai, 16 proyek terminasi sehingga total proyek selesai menjadi 125 proyek, dan sisanya sebanyak 17 proyek masih dalam proses pengerjaan dan 16 proyek berstatus *on hold*.

c) Restrukturisasi Utang Induk

Pada tanggal 8 Desember 2023, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang salah satu agendanya menyetujui usulan restrukturisasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023.

d) Restrukturisasi Utang Anak Usaha

Sampai dengan tahun 2023, perjanjian restrukturisasi anak usaha PT Waskita Karya (Persero) yaitu PT Waskita Toll Road (4 dari 5 entitas anak usaha telah disetujui perjanjian restrukturisasinya) dan PT Waskita Beton Precast Tbk telah melakukan perjanjian perdamaian.

e) Penyelesaian Ruas Tol Khusus

i. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung

Rencana Pengalihan Ruas Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung dari PT Waskita Sriwijaya Tol anak dari PT Waskita Toll Road kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui pemisahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("PPJT") antara PT Waskita Sriwijaya Tol dan PT Hutama Karya (Persero) dimana PPJT PT Waskita Sriwijaya Tol akan mendapatkan konsesi untuk tahap I sepanjang 42,5 km dan PT Hutama Karya (Persero) akan mendapatkan konsesi untuk tahap II sepanjang 69,19 km.

ii. Divestasi Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat

Pada tahun 2023, kepemilikan saham secara tidak langsung di ruas Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat mengalami dilusi dimana semula senilai 0,97% menjadi 0,63% seiring dengan penambahan modal dari pemegang saham mayoritas (PT Hutama Karya (Persero)).

- f) **Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2021**
PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada tahun 2021, telah menerima dana PMN sebesar Rp7.900 Miliar yang dipergunakan untuk penyelesaian 7 proyek yaitu jalan tol Kayu Agung – Palembang – Betung tahap II, jalan tol Bekasi – cawang – Kampung Melayu, jalan tol Pejagan – Pemalang, jalan tol Pasuruan – Probolinggo, jalan tol Ciawi – Sukabumi, jalan tol Cimanggis – Cibitung, dan jalan tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar. Sampai dengan 31 Desember 2023, dana PMN TA 2021 PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah terserap 96,98% atau sebesar Rp7.661,176 Miliar dengan realisasi fisik sebesar 99,73%.
- g) **Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2022**
- i. PMN Tahun Anggaran 2022 telah diajukan pada Desember 2022 dan akan dilakukan pencairan setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Privatisasi.
 - ii. Ketua Komite Privatisasi telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.000 Miliar ke Rekening Kas Umum Negara dan proses *rights issue* kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak dapat dilanjutkan.
- h) **Restrukturisasi Bisnis – *Refocusing* Bisnis PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk Meningkatkan Efisiensi**
- i. PT Waskita Karya (Persero) Tbk melakukan penyusunan RKAP Tahun 2023 dengan dasar perolehan proyek baru yang *feasible*.
 - ii. PT Waskita Karya (Persero) Tbk melakukan tranformasi bisnis dengan melakukan 3 fase tranformasi yaitu *cash-in & cash-out, project executive excellence*, dan Waskita 4.0.
- i) **Penerapan Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Risiko**
Laporan pencapaian skor maturitas manajemen risiko per tahun 2023, saat ini dalam proses *self-assesment* yang ditargetkan akan selesai pada akhir Maret 2024.
- j) **Finansial dan Operasional PT Waskita Karya (Persero) Tbk**
Kinerja finansial dan operasional PT Waskita Karya (Persero) Tbk diukur melalui perbaikan rasio keuangan, arus kas operasi yang positif, pendapatan usaha yang kembali ke kapasitas normal, dan laba bersih secara konsolidasi yang positif. Secara umum sampai dengan tahun 2023 *in house*, indikator kinerja tersebut belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, dimana hanya satu indikator yang tercapai yaitu arus kas operasi terealisasi sebesar Rp2.305 Miliar.

3) Restrukturisasi Perum Perumnas (Realisasi Penggunaan Dana PMN Tahun Anggaran 2022)

Pada tahun 2022, Perum Perumnas telah menerima Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1.568 Miliar yang bertujuan untuk penyelesaian persediaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, atas pemberian PMN tersebut maka Perum Perumnas berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana PMN. Oleh karena itu, Direktur Utama Perum Perumnas melalui surat nomor DIRUT/379/10/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, menyampaikan laporan realisasi capaian PMN Tahun Anggaran 2022 dengan detail sebagai berikut:

(Dalam Rp Juta)							
NO	KPI	Formula	Satuan	Proporsi	Target 2023	Realisasi 2023	Skor Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Pencapaian Tambahan PMN TA 2022 Tahun 2023							
A. Output							
1	Penyerapan Dana PMN	Jumlah penyerapan dana PMN	Rp miliar	11,11%	1.099	737	7%
2	Penyelesaian Persediaan Proyek PMN	Jumlah unit persediaan yang terjual sesuai alokasi dana PMN	Unit	11,11%	4.591	3.389	8%
3	Pendapatan dari Penjualan Unit Proyek PMN (Tidak termasuk penyelesaian persediaan yang tidak dibiayai oleh PMN)	Jumlah pendapatan sesuai alokasi dana PMN	Rp miliar	11,11%	1.473	1.102	8%
B. Outcome							
1	Peningkatan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Penerimaan Operasi - Pengeluaran Operasi	Rp miliar	11,11%	(807)	(54,01)	11%
2	EBITDA	Operating Income / Loss (Labu Operasional) + Beban Depresiasi + Beban Amortisasi + Keuntungan (kerugian) dari selisih kurs + Laba dari entitas asosiasi & joint venture	Rp miliar	11,11%	349	201,44	6%
3	Interest bearing Debt/Total Equity (DER)	Interest Bearing Debt / Total Equity	kali (x)	11,11%	4	3,80	11%
4	Interest Coverage Ratio mencapai 1 kali atau lebih pada tahun 2024	EBIT / Biaya Bunga	kali (x)	11,11%	1	0,51	6%
5	Menjaga perputaran persediaan maksimal 600 kali sejak tahun 2025	(Total Persediaan / Total Pendapatan) * 365	hari	11,11%	1.187	1.324	10%
6	Laporan Penggunaan Dana PMN sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN dan Perseroan Terbatas	Jumlah penyerahan Laporan Penggunaan Dana PMN	kali (x)	11,11%	Triwulan : 4 kali Tahunan : 1 kali (dalam RUP5)	4	11%
Total				100%			80%

4) Transformasi PFN

Persentase pencapaian pelaksanaan transformasi PFN pada tahun 2023, telah tercapai 100% dengan terbitnya PP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum PFN Menjadi Perusahaan Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2023. Pemerseroan PFN dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dengan penguatan *bargaining power* dalam mencari sumber pendanaan dalam rangka memperkuat ekosistem perfilman di Indonesia melalui *film financing* dan *film aggregators*.

Sasaran Strategis 5	:	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa
----------------------------	---	---

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	
Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis Terintegrasi	Jumlah BUMN	5	5	100%

g. Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis Terintegrasi

Capaian indikator implementasi model bisnis yang terintegrasi oleh BUMN pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 5 model bisnis dari 5 target model bisnis yang terintegrasi atau tercapai 100% dari target. Model bisnis yang terintegrasi yang telah selesai diimplementasikan antara lain yaitu:

1) Implementasi Program Pengadaan Bersama *Holding DEFEND ID*

Program pengadaan bersama yang telah diimplementasikan oleh *Holding Defend ID* yaitu pengadaan bersama jasa konsultasi, pendampingan sertifikasi ISO 27001:2022 Len-Pindad, pengadaan bersama jasa *cleaning service*, pengadaan bersama asuransi kesehatan, pengadaan bersama training manajemen risiko Direksi Indhan, pengadaan audit KAP tahun 2023, dan pengadaan *medical checkup*. Adapun total nilai pengadaan bersama sebesar Rp41.317.006.910,13.

2) Pembangunan layanan jasa manajemen dekarbonisasi Tahap 1 (Versi Alpha)

Pembangunan layanan jasa manajemen dekarbonisasi yaitu pengembangan EQUATR Apps, sistem informasi yang dikembangkan IDSurvey secara terpadu dalam mendukung pencapaian target NDC & NZE Indonesia sehingga akan meningkatkan *awareness* pada pelaku usaha dan masyarakat umum tentang dekarbonisasi. Equatr Apps merupakan *platform* berbasis *web* yang menyediakan layanan terintegrasi satu atap dekarbonisasi berupa *carbon monitoring*, *carbon calculator*, *carbon education*, *carbon offset*, dan *carbon marketplace*. Pada tahun 2023, tahap pengembangan aplikasi *carbon management* berbasis *web* EQUATR telah mencapai 100% pada pengembangan versi alpha. Fitur yang dikembangkan saat ini berupa *carbon accounting* dengan fungsi pelaporan dan *dashboard* sederhana.

3) Program Pengembangan Klaster Asuransi Sosial antara PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero)

Pengembangan Klaster Asuransi Sosial dilakukan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero) dalam rangka meningkatkan layanan kepada peserta

dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di masing-masing BUMN. Adapun pada tahun 2023, telah disepakati kerja sama klaster antara PT ASABRI (Persero) dengan PT Taspen (Persero) sebanyak 4 *project*, dimana sampai dengan Tahun 2023 telah selesai 100%. Rincian sebagai berikut:

- a) Pengembangan *top-up* proteksi melalui Taspen Life – ASABRI, dilakukan melalui pemasaran produk Taspen Pro Beasiswa (TPB) dan Taspen Dwiguna Sejahtera (TDS) sehingga tercapainya Target Premi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama PT ASABRI (Persero) dan Taspen Life, dengan progres sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu sebesar 100%.
- b) Pengembangan *additional benefit* dengan *merchant* dilakukan melalui peningkatan kerja sama dengan *stakeholders* dan pengembangan klaster asuransi ASN, TNI, dan POLRI mengenai pemasaran *Loyalty Benefit* kepada Peserta, dengan progres sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu sebesar 100%.
- c) Pengembangan *knowledge platform Human Capital* yang dapat digunakan bersama oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero), pada tahun 2023 telah dilakukan *renewal* Perjanjian Kerja Sama (PKS) *Integrated Learning*.
- d) Selain itu, pada tahun 2023 juga telah dilakukan program pemanfaatan materi bersama Klaster Asuransi dan Dana Pensiun oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero) melalui 1 (satu) materi pembelajaran berbasis *e-learning*.

4) **Konsolidasi dan Rebranding ATM Himbara**

Proyek Konsolidasi ATM Himbara telah berjalan selama 2 tahun sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2021 lalu dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Pada tahun 2023 telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor SK-173/MBU/06/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Sinergi *Shared* BUMN Perbankan. Sebagai *milestone* pencapaian proyek ini, Kementerian BUMN bersama bank-bank Himbara dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sebagai bagian dari *holding* BUMN Danareksa menggelar *Soft Launching* Integrasi dan Wajah Baru ATM Link pada tanggal 26 September 2023 sehingga indikator ini tercapai 100% sesuai *milestone*.

Komitmen bersama Tim Konsolidasi ATM Himbara dirancang dan diimplementasikan untuk memastikan bahwa seluruh nasabah Himbara dapat *value added* yang lebih baik sehingga menjadikan ATM Link sebagai jaringan terbesar yang tersebar di seluruh Indonesia. Ke depan, dengan adanya integrasi dan pembaruan tampilan ATM Link ini, para nasabah dapat memiliki pengalaman

yang sama saat bertransaksi di jaringan Link manapun tanpa adanya perubahan fitur dan tarif layanan.

5) Integrasi EDC *Sharing*

Proyek Integrasi EDC *Sharing* dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor SK-173/MBU/06/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Sinergi *Shared* BUMN Perbankan. Tujuan dari proyek ini yaitu meningkatkan sinergi *Shared Services* BUMN Perbankan melalui integrasi EDC *Sharing* Himbara dan menjadikan Himbara sebagai *Market Leader* EDC. Benefit dari integrasi EDC *Sharing* Himbara yaitu meningkatkan peluang bisnis, memperluas *market share* dan efisiensi biaya operasional. Pencapaian pada tahun 2023 sebanyak 86.095 EDC yang telah diintegrasikan. Realisasi ini sesuai dengan target integrasi pada tahun 2023. *Merchant* yang telah diintegrasikan terdiri dari segmen *Low Hanging Fruit* sebanyak 46.951 EDC, *merchant strategic* sebanyak 7.264 EDC, *merchant* retail eksisting sebanyak 28.846 EDC dan *merchant* retail new sebanyak 3.034 EDC. Dengan terintegrasikannya EDC *Sharing* Himbara ini diharapkan dapat mempermudah nasabah dalam bertransaksi, terutama ketika berbelanja di sejumlah *merchant* BUMN. Dengan demikian, indikator ini tercapai 100% sesuai *milestone*.

Sasaran Strategis 6	:	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Wakil Menteri BUMN Sektor Jasa
----------------------------	---	--

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Persentase Pencapaian
		Target	Realisasi	
Persentase Realisasi Anggaran	%	97,00%	99,84%	103%
Nilai <i>Self-assesment</i> SAKIP	%	80,19%	80,19%	100%
Nilai <i>Self-assesment</i> RB	%	97,16%	N/A	N/A

h. Persentase Realisasi Anggaran

Total pagu anggaran tahun 2023 yang berada dalam koordinasi Wakil Menteri BUMN R yaitu sebesar Rp7.200.000,00 yang terdiri dari enam Keasdepan, namun selama

tahun berjalan terjadi pemblokiran dan penghematan anggaran sebesar Rp781.457.000,00 sehingga total anggaran setelah pemblokiran dan penghematan yaitu sebesar Rp6.418.543.000,00. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp6.408.021.672,00 atau 99,84% dengan nilai capaian IKU sebesar 103% dari total pagu anggaran. Berikut merupakan tabel pencapaian realisasi dari pagu anggaran pada setiap Keasdepan:

1) Asisten Deputi Bidang Logistik

Total pagu anggaran Asdep Bidang Logistik yaitu sebesar Rp1.107.405.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp1.106.348.114 atau terealisasi sebesar 99,90%.

2) Asisten Deputi Bidang Infrastruktur

Total pagu anggaran Asdep Bidang Infrastruktur yaitu sebesar Rp1.050.996.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp1.050.896.479 atau terealisasi sebesar 99,99%.

3) Asisten Deputi Bidang Manufaktur

Total pagu anggaran Asdep Manufaktur yaitu sebesar Rp1.114.373.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp1.113.782.380 atau terealisasi sebesar 99,95%.

4) Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Dana Pensiun

Total pagu anggaran Asdep Asuransi dan Dana Pensiun yaitu sebesar Rp987.199.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp983.486.166 atau terealisasi sebesar 99,62%.

5) Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

Total pagu anggaran Asdep Bidang Jasa Keuangan yaitu sebesar Rp1.070.089.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp1.070.017.760 atau terealisasi sebesar 99,99%.

6) Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

Total pagu anggaran Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media yaitu sebesar Rp1.088.481.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp1.083.490.773 atau terealisasi sebesar 99,54%.

i. Nilai *Self-assesment* SAKIP

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
80,19%	84,40%	80,19%	-4,99%	95,01%

Dasar perhitungan capaian IKU ini adalah berdasarkan hasil *self-assesment* implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada unit Wakil Menteri BUMN R yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian BUMN, dengan tujuan untuk mengukur capaian implementasi sistem akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2023, terdapat perubahan portofolio Wakil Menteri BUMN sebagaimana Instruksi Menteri BUMN Nomor: INS-1/MBU/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal

perubahan pembagian portofolio Pelaksanaan Tugas Wakil Menteri Dalam Rangka Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Instruksi tersebut, terjadi perpindahan portofolio BUMN, yaitu dari BUMN klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung menjadi BUMN klaster manufaktur. Perpindahan portofolio tersebut, menyebabkan perubahan target Perjanjian Kinerja Wakil Menteri BUMN yang telah ditandatangani pada tanggal 29 September 2023 dan *self-assesment* dilaksanakan sebelum pelaksanaan pergantian portofolio BUMN, sehingga objek penilaian unit kerja Wakil Menteri BUMN R masih memperhitungkan Klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung di dalamnya dan belum memperhitungkan untuk Klaster Industri Manufaktur.

Berdasarkan laporan hasil *self-assesment* tertanggal 31 Mei 2023, tingkat Akuntabilitas Kinerja Wakil Menteri BUMN II Tahun 2023 berada pada Predikat “A” atau “Memuaskan” dengan definisi bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Unit Kerja Wakil Menteri BUMN II Kementerian BUMN Tahun 2023 telah “Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator” sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
WAKIL MENTERI BUMN II KEMENTERIAN BUMN
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	24,75
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27,00	24,30
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,15	12,64
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,40	80,19
			A	A

Penurunan Nilai Akuntabilitas Tahun 2023 disebabkan adanya perbedaan ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup evaluasi AKIP Wakil Menteri BUMN II Tahun 2022 hanya pada AKIP tingkat Wakil Menteri BUMN II (Eselon I), sedangkan Tahun 2023 selain tingkat Wakil Menteri BUMN II juga meliputi seluruh unit kerja Keasdepan di bawah Wakil Menteri BUMN II (Unit kerja Eselon II). Adapun rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
WAKIL MENTERI BUMN II KEMENTERIAN BUMN
2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Wakam II	Jasa Keuangan	Jasa Akuntansi dan Dapen	JTM	Jasa Infrastruktur	Jasa Logistik	JPP	Nilai Unit	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PURENCANAAN KINERJA	30,00	25,20	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,75	82,50%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan pendekatan cascading strategy level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,2	6,3	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,75	75,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan	15,00	12	12	12	12	12	12	12	12,00	12,00	80,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,3	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,36	24,30	81,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6	6	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	6,3	6,3	6,3	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	70,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12	12	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	80,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,9	12,45	12,45	12,45	12,00	12,00	12,00	12,36	12,44	84,28%
3.a	Templat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3	3	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas dan Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,50	3,15	2,7	2,7	2,70	2,25	2,25	2,25	2,63	2,89	64,17%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	90,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18,3	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	74,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,5	4,5	4,5	4,50	4,5	4,50	4,50	4,50	4,50	90,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	70,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkatkan secara evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	70,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,80	79,35	79,35	79,35	79,35	79,35	80,00	79,44	80,19	

Sebagaimana informasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat Akuntabilitas Kinerja unit kerja Eselon I dan Eselon II belum seluruhnya berada pada kategori “A” atau “Memuaskan”, hanya SAKIP Wakil Menteri BUMN II dan SAKIP Keasdepan Jasa Pariwisata dan Pendukung yang berpredikat “Memuaskan”. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih perlu perbaikan khususnya pelaksanaan atas Tindak Lanjut hasil asesmen baik oleh eksternal dalam hal ini Kementerian PAN RB maupun evaluasi Internal oleh Inspektorat Kementerian BUMN.

j. Nilai *Self-assesment* RB

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1
97,16	N/A	N/A	N/A

Dasar perhitungan capaian IKU ini adalah berdasarkan nilai *self-assesment* implementasi Reformasi Birokrasi (RB) unit Wakil Menteri BUMN R dengan tujuan untuk mengukur capaian implemetasi proses reformasi birokrasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan *good governance*. Pada tahun 2023, nilai *self-assesment* RB Wakil Menteri BUMN R ditargetkan mendapatkan skor 97,16 dengan dasar penilaiannya menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun, seiring dinamika berjalan, peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tanggal 7 Agustus 2023, dengan skema penilaian yang berbeda dari sebelumnya, sehingga penilaian *self-assesment* RB pada tahun 2023 tidak dilaksanakan.

k. Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
6 Program	4 Program	6 Program	50%	100%

Dasar perhitungan capaian IKU ini adalah berdasarkan jumlah program digitalisasi pada BUMN yang telah dijalankan sepanjang tahun 2023. Pada tahun 2023, sebanyak 6 (enam) program digitalisasi telah dijalankan, atau 100% dari target tahun 2023, dengan rincian program sebagai berikut:

1) Pengembangan Aplikasi *Superapps* Pos

Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja perusahaan, PT Pos Indonesia (Persero)/"PT Pos" telah mengembangkan inovasi digital dalam bentuk *single platform Superapps* yakni penggabungan aplikasi "PosAja" sebagai aplikasi layanan bisnis jasa kurir dan "PosPay" sebagai aplikasi layanan bisnis jasa keuangan. Sampai dengan tahun 2023, PT Pos telah melaksanakan *launching* aplikasi *Superapps* dengan capaian realisasi 100% sehingga layanan aplikasi sudah dapat dimanfaatkan oleh pelanggan (*Go Live* versi 1). Dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, telah dilakukan pengembangan dan penambahan terhadap fitur-fitur baru pada aplikasi, peningkatan perlindungan *customer identity* dan *access management*, serta penyediaan *standard* integrasi internal untuk sistem kurir. Dalam upaya untuk tetap menjaga pelayanannya, PT Pos melakukan langkah-langkah mitigasi risiko dalam pelaksanaan pengembangan aplikasi *Superapps*, yakni monitoring realisasi investasi secara berkala, pembaharuan sistem secara berkala yang dilakukan di luar jam sibuk, dan melakukan monitoring terhadap aktivitas transaksi dan pelayanan aplikasi.

2) Pengintegrasian Sistem Layanan Kapal dari Pelindo (PHINNISI) dengan Inaportnet

PHINNISI merupakan insiatif digital Pelindo untuk melakukan standardisasi Sistem Pelayanan Jasa Kapal Terpadu berbasis cloud yang bersifat *End-to-End* sebagai *order management*, *Front-End* dan *Back-End* dalam satu *platform*. PHINNISI merupakan sistem yang dirancang untuk membantu pengelola terminal dalam melakukan Pengelolaan Pelayanan Jasa Kapal mulai dari perencanaan, operasional, sampai dengan monitoring dan pelaporan sehingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien. PHINNISI sangat berguna untuk menjamin transparansi layanan dan keakuratan data pelayanan kapal di Pelindo. Proses bisnis PHINNISI telah terintegrasi dengan sistem milik Pemerintah yaitu INAPORTNET pada proses *ordering* dan *validating* dalam pengelolaan

pelayanan jasa kapal meliputi data dan informasi mengenai profil, kedatangan, keberangkatan, dan rencana pelayanan jasa kapal.

Sampai dengan akhir tahun 2023, implementasi PHINNISI telah dilaksanakan di 32 Pelabuhan atau mencapai 100% dari target sebanyak 32 Pelabuhan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, PHINNISI direncanakan akan dilanjutkan dan diimplementasikan pada 37 pelabuhan lainnya. Dalam pengembangannya, pada tahun 2023 telah dilaksanakan *pilot project* integrasi PHINNISI dengan Sistem Pelayanan Terminal (PTOS M) yang dilakukan untuk mendukung akurasi data penambatan dan bongkar muat serta mengurangi duplikasi data. *Pilot project* telah dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Perak yaitu di Terminal Nilam dan Terminal Mirah. Keberhasilan *pilot project* tersebut selanjutnya akan di *roll out* ke cabang-cabang Pelindo lainnya di seluruh Indonesia.

3) Implementasi ERP dan BIM/VDC

Pada tahun 2023, BUMN Infrastruktur melakukan penguatan implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan BIM/VDC yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis Perusahaan. Hal tersebut mencakup berbagai fungsi seperti manajemen keuangan, manufaktur, rantai pasok, dan lain sebagainya. Sistem tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya Perusahaan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan visibilitas atas seluruh proses bisnis.

4) Integrasi ERP di Induk *Holding* Pertahanan Tahap 2

Pada tahun 2023, pembangunan dan pengembangan digitalisasi entitas telah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan *roadmap* pengembangan teknologi oleh BUMN Industri Pertahanan dan Jasa Survei. PT Len Industri (Persero) telah telah mengimplementasikan program digitalisasi dengan melakukan integrasi ERP di Induk *Holding* untuk mengkonsolidasikan Laporan Keuangan PT Len Industri (Persero) dengan anak perusahaannya. Pada tahun 2023, pengintegrasian ERP dilakukan dengan membuat aplikasi Len Konsolidasi yang memiliki fitur komparasi RKAP dan sudah *go-live* pada tanggal 30 Oktober 2023. Adapun tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan aplikasi Len Konsolidasi tersebut adalah: diskusi internal PT Len Industri (Persero), penyusunan *requirement (blueprint)*, dan selanjutnya pembuatan aplikasi yang masih dalam tahap persiapan *User Acceptance Test* (UAT).

5) Integrasi ERP melalui Integrasi *Customer Relation Management*

BUMN jasa survei yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah mengimplementasikan program digitalisasi dengan melakukan

pengimplementasian Integrasi *Customer Relation Management* (CRM) *holding* IDSurvey. Pembangunan CRM dimulai pada tahun 2023 menggunakan metode atau skema integrasi berbasis API yang menghubungkan data CRM di masing-masing entitas dengan CRM IDSurvey secara *realtime/langsung*. CRM IDSurvey saat ini memiliki empat modul utama, yaitu:

- i. Basis data pelanggan IDSurvey, yang berisi data pelanggan yang sudah dikodefikasi.
- ii. *Account planning* IDSurvey, yang menyajikan data *account planning* (*pipeline* penjualan) entitas IDSurvey untuk pemenuhan target RKAP
- iii. Realisasi proyek IDSurvey, yang menyajikan data kontrak *on hand* maupun *carry over* masing-masing entitas IDSurvey secara *realtime*
- iv. Tender IDSurvey, yang menyajikan data tender yang sedang diikuti, tender kalah, tender batal, dan tender menang.

Dengan terbentuknya sistem CRM di masing-masing entitas dan IDSurvey, diharapkan data interaksi dengan pelanggan, riwayat komunikasi, dan data terkait lainnya tercatat dengan baik pada sistem tersebut.

6) Integrasi MIS di *Holding* Asuransi dan Penjaminan

Pada tahun 2023, IFG Group dan Anggota *Holding* telah berhasil mengintegrasikan *Management Information System* (MIS) melalui integrasi pada seluruh *Business Drivers Indicators* ("BDI") secara sistem (*host-to-host*) pada *One Data by IFG* sebagai portal untuk mengakses data dan visualisasi. Beberapa Anggota *Holding* memberikan akses data yang melampaui BDI yang diwajibkan dalam kontrak manajemen. Hal ini mencatatkan pencapaian sebesar 115,85%, diukur dari jumlah BDI yang diintegrasikan dibandingkan dengan BDI yang ditetapkan dalam kontrak manajemen.

I. %Total Realisasi *Capex*

Renstra Wamen-2023	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1
Rp174 Triliun	60%	76%	64%	-16,31%

Dasar pencapaian indikator kinerja % Total Realisasi *Capital Expenditure* (*Capex*) merupakan realisasi penyelesaian investasi/belanja modal (*Capex*) BUMN dalam pembinaan Wakil Menteri BUMN dibandingkan target yang ditetapkan/dianggarkan sebelumnya. Realisasi *Capex* pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp113.039 Miliar atau 64% dibandingkan dengan target sebesar Rp156.496 Miliar atau 60% dengan ketercapaian 106%.

Tahun 2023 terdapat perubahan portofolio Wakil Menteri BUMN sebagaimana Instruksi Menteri BUMN Nomor: INS-1/MBU/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal

perubahan pembagian portofolio Pelaksanaan Tugas Wakil Menteri Dalam Rangka Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Instruksi tersebut, terjadi perpindahan portofolio BUMN, yaitu dari BUMN klaster Jasa Pariwisata dan Pendukung menjadi BUMN klaster manufaktur. Perpindahan portofolio tersebut, menyebabkan perubahan target Perjanjian Kinerja Wakil Menteri BUMN yang telah ditandatangani pada tanggal 29 September 2023. Berikut ini merupakan rincian kontribusi masing-masing klaster terhadap pencapaian %Total Realisasi *Capex* Wakil Menteri BUMN:

- **Klaster Jasa Logistik**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
60,00%	51,00%	65,56%	28,54%	110%

Realisasi *Capex* BUMN Klaster Jasa Logistik tahun 2023 adalah sebesar 65,56% (Rp16,84 Miliar) atau mencapai 109,26% dari target yang ditetapkan 60% dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 28,54%. Terdapat 4 (empat) BUMN yang realisasi investasinya masih di bawah target yaitu PT Pelindo, PT INKA, PT POS dan Perum DAMRI. Belum tercapainya target investasi pada PT Pelindo dikarenakan belum optimalnya pekerjaan pengerukan alur dan kolam pelabuhan benoa, pembangunan NPEA dan perkuatan dermaga barat JICT. Rendahnya investasi PT INKA dikarenakan sebagian besar masih dalam tahap finalisasi teknis dan negosiasi aspek komersial dengan potensial *supplier*, dan untuk proses pengadaan fasilitas mesin produksi akan dilakukan skema pengelompokkan kontrak untuk mesin dengan klasifikasi sejenis. Rendahnya realisasi investasi pada PT PELNI, utamanya pada investasi alat produksi disebabkan oleh tidak tersedianya armada kapal RoRo yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan di pasaran, hasil kajian ulang investasi modifikasi kapal yang tidak merekomendasikan opsi tersebut dikarenakan rendahnya profitabilitas, serta pengadaan armada tongkang/tugboat yang di-*carry over* ke tahun 2024. Rendahnya realisasi investasi pada Perum DAMRI, utamanya dari pengadaan alat produksi yang belum terealisasi karena adanya perubahan skema investasi bus listrik menjadi sewa (*opex*), investasi pembelian tanah yang di-*carry over* ke tahun 2024 dan investasi usaha unit perbengkelan yang masih dalam tahap penyelesaian. Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Logistik untuk mencapai target investasi tahun 2024, yaitu memastikan ketersediaan sumber dana dalam rangka pelaksanaan investasi, serta memastikan pelaksanaan pengadaan mengacu pada *timeline* yang telah ditetapkan dan berpedoman pada rencana pengadaan (*cost & schedule*).

- **Klaster Jasa Infrastruktur**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
60,00%	80,34%	59,00%	-26,56%	98,33%

Realisasi *Capex* BUMN Klaster Jasa Infrastruktur tahun 2023 adalah sebesar 59,00% (Rp42,47 Miliar) atau mencapai 98,33% dari target yang ditetapkan 60% dan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 26,56%. Penurunan ini utamanya disebabkan karena BUMN Infrastruktur mengurangi kegiatan investasi dan fokus menjalankan proyek sebagai kontraktor. Kegiatan investasi utama pada tahun 2023 dijalankan oleh PT Utama Karya (Persero) yaitu proyek Jalan Tol Trans Sumatera dengan sumber pendanaan PMN Tahun Anggaran 2023.

- **Klaster Industri Manufaktur**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
50,00%	68,80%	25,30%	-63,19%	50,60%

Realisasi *Capex* BUMN Klaster Industri Manufaktur tahun 2023 adalah sebesar 25,3% atau mencapai 50,60% dari target yang ditetapkan 50,00% dan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 68,80%. Realisasi investasi konsolidasi PT Len Industri (Persero) adalah sebesar Rp537,97 Miliar atau sebesar 19,7% dari target yang telah ditentukan. Rendahnya nilai realisasi *Capex* tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi keuangan Perusahaan yang masih kurang baik sehingga diperlukan realisasi prioritas penggunaan dana investasi. Selain itu, sebagian besar program investasi yang dilaksanakan oleh Defend ID, dananya berasal dari PMN yang memerlukan proses dan tahapan lebih panjang untuk penggunaannya. Untuk program investasi yang didanai dari PMN TA 2023 sendiri mengalami keterlambatan karena realisasi pencairan baru dapat terlaksana pada 29 Desember 2023. Sementara itu, investasi konsolidasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) terealisasi sebesar Rp275,4 Miliar atau tercapai 61,6% dari target. Ketidaktercapaian realisasi investasi pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tersebut dikarenakan rendahnya penyerapan investasi Tanah dan Gedung dan penyertaan modal dan pengembangan bisnis dikarenakan masih dalam proses penyusunan kebijakan penyertaan modal.

- **Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
50,00%	76,45%	65,30%	-14,61%	130,60%

Realisasi *Capex* BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun tahun 2023 adalah sebesar 65,30% atau mencapai 130,60% dari target sebesar 50,00% dan mengalami penurunan sebesar 14,61% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Realisasi konsolidasi *Capex* PT BPUI (Persero) tahun 2023 adalah sebesar Rp558,47 Miliar atau 67% dari RKAP 2023, rendahnya capaian investasi tersebut utamanya disebabkan oleh rendahnya realisasi pada *software* dan program, renovasi kantor, dan aset tidak berwujud, utamanya PT Askrindo dan IFG Holding sehubungan dengan mundurnya proses pengadaan pada PSAK 74 dan ERP sehingga secara realisasi mundur dari tahun 2023, mundurnya proses pengadaan pada kantor cabang, serta karena adanya renovasi yang dibatalkan pada salah satu lantai karena sudah disewa oleh *tenant* lain.

- **Klaster Jasa Keuangan**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
60,00%	79,77%	87,34%	9,49%	145,57%

Realisasi *Capex* BUMN Klaster Jasa Keuangan tahun 2023 adalah sebesar 87,34% atau mencapai 145,57% dari target yang ditetapkan sebesar 60,00% dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 9,49%. Ketercapaian dan Peningkatan *Capex* tersebut sejalan dengan kemampuan Himbara meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran *Capex*.

- **Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
70,00%	93,07%	79,10%	-15,01%	113%

Realisasi *Capex* BUMN Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media tahun 2023 adalah sebesar 79,10% atau mencapai 113% dari target sebesar 70,00% dan mengalami penurunan sebesar 15,01% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh rendahnya capaian realisasi *Capex* pada Perum Jasa Tirta I, dimana hanya terealisasi sebesar Rp145,32 Miliar atau 29,40% dari targetnya.

m. Pencapaian Target *Progress* Fisik Proyek Strategis Nasional

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
78%	61%	69%	13,26%	88,46%

Pelaksanaan proyek strategis nasional merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pelaksanaan proyek strategis nasional bertujuan untuk memaksimalkan percepatan pertumbuhan pada berbagai aspek antara lain pembangunan fisik (jalan tol, pelabuhan, bendungan, jembatan, bandara, dll), penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional serta dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2023 sebanyak 90 Proyek Strategis Nasional turut melibatkan BUMN, baik yang berperan sebagai kontraktor maupun sebagai investor pada proyek tersebut. Realisasi progres fisik Proyek Strategis Nasional tahun 2023 adalah sebesar 69% dari target sebesar 78% atau tercapai 88% dan mengalami peningkatan 13,26% dibandingkan realisasi tahun 2022. Adapun beberapa proyek yang belum selesai dan dilanjutkan di tahun selanjutnya, dan dilakukan monitoring untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek secara berkala sehingga perencanaan dan pelaksanaan dapat lebih tepat waktu.

n. Rata-Rata Penggunaan TKDN

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1
64,15%	N/A	73,96%	N/A

Dasar pencapaian indikator kinerja Rata-Rata Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan persentase realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dibandingkan dengan total pengadaan barang dan jasa pada BUMN dalam pembinaan Wakil Menteri BUMN. Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp162,98 Triliun atau 73,96% dari total realisasi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp200,23 Triliun. Berikut ini merupakan rincian kontribusi masing-masing klaster terhadap pencapaian Rata-Rata Penggunaan TKDN Wakil Menteri BUMN:

- **Klaster Jasa Logistik**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	Capaian
69,34%	N/A	81,12%	N/A	116,99%

Realisasi belanja PDN pada Klaster Jasa Logistik tahun 2023 yaitu sebesar Rp26,04 Triliun atau 81,12% dari total realisasi pengadaan barang dan jasa

sebesar Rp29,56 Triliun. Dalam pencapaian Rata-Rata Penggunaan TKDN tahun 2023, terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi BUMN Klaster Logistik yaitu terdapat investasi yang merupakan produk impor dan belum ada produk penggantinya di dalam negeri, nilai TKDN yang masih belum optimal pada beberapa pekerjaan konstruksi dan pengadaan jasa lainnya berdasarkan hasil negosiasi dengan penyedia jasa, serta belum optimalnya pengadaan melalui aplikasi PaDi UMKM. Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh BUMN Klaster Jasa Logistik untuk mencapai target rata-rata penggunaan TKDN tahun 2024, yaitu optimalisasi pengadaan melalui aplikasi PaDi UMKM, memprioritaskan pembelian komponen berupa produk dalam negeri dibandingkan produk *import*, membangun kemitraan strategis dengan perusahaan lokal untuk memastikan komponen produk dalam negeri yang berkualitas, menyusun pedoman dan membentuk tim penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri, serta membuat sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur tingkat penggunaan komponen dalam negeri oleh BUMN.

- **Klaster Jasa Infrastruktur**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
84,18%	N/A	97,25%	N/A	115,53%

Realisasi belanja PDN pada Klaster Jasa Infrastruktur tahun 2023 yaitu sebesar Rp82,57 Triliun atau 97,25% dari total realisasi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp86,35 Triliun. Dalam pencapaian Rata-Rata Penggunaan TKDN tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMN Klaster Infrastruktur yaitu terdapat bahan baku yang merupakan produk impor dan belum ada produk penggantinya di dalam negeri.

- **Klaster Industri Manufaktur**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
49,46%	N/A	29,79%	N/A	60,23%

Realisasi belanja PDN pada Klaster Industri Manufaktur tahun 2023 yaitu sebesar Rp5,08 Triliun atau 29,79% dari total realisasi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp17,06 Triliun. Pada PT Len Industri (Persero) sebanyak 24,6% pengadaannya berasal menggunakan produk dalam negeri sedangkan pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebanyak 79,9% peengadaannya menggunakan produk dalam negeri. Realisasi penggunaan Produk Dalam

Negeri pada kedua BUMN Klaster Industri Manufaktur didorong dari komitmen untuk membelanjakan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa.

- **Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
50,00%	76,45%	86,88%	13,64%	173,76%

Realisasi belanja PDN pada Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun tahun 2023 yaitu sebesar Rp693,22 Miliar atau 86,88% dari total realisasi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp797,91 Miliar, yang dikontribusikan dari PT BPUI (Persero) sebesar 93,78%, PT Taspen (Persero) sebesar 81,85%, PT ASABRI (Persero) sebesar 96,46%, dan PT RIU (Persero) sebesar 74,37% pengadaannya berasal menggunakan produk dalam negeri.

- **Klaster Jasa Keuangan**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
60,00%	N/A	88,64%	N/A	147,73%

Realisasi belanja PDN pada Klaster Jasa Keuangan tahun 2023 yaitu sebesar Rp26,90 Triliun atau 88,64% dari total realisasi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp30,35 Triliun, realisasi ini didorong oleh komitmen Himbara dalam membelanjakan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa. Indikator ini tidak terdapat pada tahun 2022 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, namun demikian dibandingkan batas minimal sesuai INPRES No. 2 Tahun 2022 sebesar 40%, realisasi Himbara telah melampaui batas minimal.

- **Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
56,61%	N/A	60,05%	N/A	106,08%

Realisasi belanja PDN pada Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media tahun 2023 yaitu sebesar Rp21,69 Triliun atau 60,05% dari total realisasi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp36,12 Triliun.

o. **% Top Talent Muda (≤42 Tahun) dalam Nominated Talent**

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	Capaian
18%	19%	27%	40%	150%

Ketersediaan SDM usia milenial (<42 tahun) atau dalam usia produktif menjadi peluang bagi Kementerian BUMN dalam menjaring dan mengembangkan talenta untuk membangun Indonesia melalui kontribusinya di BUMN. Peluang ini tidak boleh disia-siakan demi tercapainya tujuan BUMN sebagai pencipta lapangan kerja dan penyedia talenta-talenta terbaik untuk Indonesia. Adapun indikator % *Top Talent* Muda (≤ 42 Tahun) dalam *Nominated talent* pada tahun 2023 tercapai sebesar 27% atau tercapai 150% dari target sebesar 18% dan mengalami peningkatan 40% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

p. % Perempuan dalam *Nominated Talent*

Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (R2023/R2022)-1	% Capaian
18%	18%	23%	26%	127,78%

Dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh perempuan dalam dunia bisnis, perusahaan dapat menjadi lebih kuat, lebih berkelanjutan, dan lebih menarik bagi investor. Nantinya, perempuan dengan potensi tersebut akan membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Adapun indikator % Perempuan dalam *Nominated talent* pada tahun 2023 tercapai sebesar 23% atau 127,78% dari target sebesar 18% dan mengalami peningkatan 26% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

C. Pemanfaatan Anggaran

Total pagu anggaran tahun 2023 yang berada dalam koordinasi Wakil Menteri BUMN R yaitu sebesar Rp7.200.000,00 yang terdiri dari enam Keasdepan, namun selama tahun berjalan terjadi pemblokiran dan penghematan anggaran sebesar Rp781.457.000,00 sehingga total anggaran setelah pemblokiran dan penghematan yaitu sebesar Rp6.418.543.000,00. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp6.408.021.672,00 atau 99,84% dari total pagu anggaran. Berikut merupakan tabel pencapaian realisasi dari pagu anggaran pada setiap Keasdepan.

No	Asisten Deputi	Anggaran	Realisasi 2023	%
1	Asisten Deputi Bidang Logistik	Rp1.107.405.000	Rp1.106.348.114	99,90%
2	Asisten Deputi Bidang Infrastruktur	Rp1.050.996.000	Rp1.050.896.479	99,99%
3	Asisten Deputi Bidang Manufaktur	Rp1.114.373.000	Rp1.113.782.380	99,95%
4	Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Dana Pensiun	Rp987.199.000	Rp983.486.166	99,62%
5	Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan	Rp1.070.089.000	Rp1.070.017.760	99,99%
6	Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp1.088.481.000	Rp1.083.490.773	99,54%
Total		Rp 6.418.543.000	Rp6.408.021.672	99,84%

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Wakil Menteri BUMN R selalu berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2023, Wakil Menteri BUMN R dinilai cukup efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,65 (Kriteria: Sangat Memuaskan), sedangkan anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 99,84%. Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Wakil Menteri BUMN R telah melaksanakan beberapa hal antara lain selektif dalam melaksanakan kegiatan konsinyering dan perjalanan dinas dan mencari alternatif harga terbaik, melakukan rapat-rapat secara virtual sehingga mampu meminimalkan pengeluaran biaya, mengurangi penggunaan kertas dan dokumen tercetak sehingga mampu mengurangi biaya operasional perkantoran. Selain itu, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wakil Menteri BUMN R juga diperuntukkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, memastikan efektivitas koordinasi dan mengoptimalkan realisasi kinerja BUMN.

BAB IV

PROGRAM STRATEGIS

A. Konsolidasi dan Rebranding ATM Himbara

Proyek Konsolidasi ATM Himbara telah berjalan selama 2 tahun sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2021 lalu dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Pada tahun 2023 telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor SK-173/MBU/06/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Sinergi Shared BUMN Perbankan. Sebagai milestone pencapaian proyek ini, Kementerian BUMN bersama bank-bank Himbara dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sebagai bagian dari *holding* BUMN Danareksa menggelar Soft Launching Integrasi dan Wajah Baru ATM Link pada tanggal 26 September 2023.



Menyasar infrastruktur pembayaran yang memfasilitasi perkembangan teknologi adalah langkah strategis untuk memposisikan Indonesia sebagai digital nation yang siap

menghadapi berbagai tren inovasi digital. Meski begitu, kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai masih cukup tinggi setiap tahunnya. Hal ini mempertegas signifikansi keberadaan jaringan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan CRM (*Cash Recycle Machine*) dalam mendukung kelancaran transaksi keuangan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Kementerian BUMN mendorong bank-bank Himbara, yang terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, dan PT BTN (Persero) Tbk untuk melakukan inovasi dan mengintegrasikan secara bertahap seluruh mesin ATM dan CRM di bawah pengelolaan Jalin. Hal ini bertujuan untuk menyatukan empat layanan bank menjadi satu layanan yang terpadu. Dengan demikian, manfaat perluasan jaringan ATM Link ke depan dapat mendukung penyebaran ATM Link secara merata dari seluruh provinsi sampai ke tingkat kabupaten atau kota.

Dalam acara *Soft Launching* Integrasi dan Wajah Baru ATM Link, Kementerian BUMN, Himbara, dan Jalin memperkenalkan tampilan baru (*rebranding*) ATM Link dengan tujuan memperkuat posisi mereknya, sehingga ATM Link dapat memberikan kesan yang lebih *fresh* dan berbeda kepada masyarakat Indonesia. Melalui wajah baru ini, juga mencerminkan sebuah komitmen untuk meningkatkan pengalaman berinteraksi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Komitmen bersama Tim Konsolidasi ATM Himbara dirancang dan diimplementasikan untuk memastikan bahwa seluruh nasabah Himbara dapat *value added* yang lebih baik sehingga menjadikan ATM Link sebagai jaringan terbesar yang tersebar di seluruh Indonesia. Ke depan, dengan adanya integrasi dan pembaruan tampilan ATM Link ini, para nasabah dapat memiliki pengalaman yang sama saat bertransaksi di jaringan Link manapun tanpa adanya perubahan fitur dan tarif layanan.

B. Integrasi EDC *Sharing*

Proyek Integrasi EDC *Sharing* dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor SK-173/MBU/06/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Sinergi *Shared* BUMN Perbankan. Tujuan dari proyek ini yaitu meningkatkan sinergi *Shared Services* BUMN Perbankan melalui integrasi EDC *Sharing* Himbara dan menjadikan Himbara sebagai *Market Leader* EDC. *Benefit* dari integrasi EDC *Sharing* Himbara yaitu meningkatkan peluang bisnis, memperluas market share dan efisiensi biaya operasional.

Dalam mengintegrasikan EDC, PT Mitra Transaksi Indonesia atau yang dikenal juga dengan nama dagang Yokke ditunjuk sebagai pengelola integrasi EDC *Sharing* Himbara. Yokke merupakan anak PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) yang bergerak dalam bidang usaha *acquiring Aggregator*. Peranan Yokke dalam mengintegrasikan EDC *Sharing* Himbara antara lain memberikan variasi metode pembayaran yang lebih banyak dan mempermudah *customer* untuk mendapatkan promo, efisiensi biaya operasional, menambah potensi SV bank dan membuka potensi *join* promo Himbara kepada *merchant*, dan memberikan kelancaran untuk operasional bisnis *merchant*, dan menambahkan fitur yang dibutuhkan oleh *merchant* sehingga menjadikan EDC Himbara *Top of Mind*.

Pencapaian pada tahun 2023 sebanyak 86.095 EDC yang telah diintegrasikan. Realisasi ini sesuai dengan target integrasi pada tahun 2023. *Merchant* yang telah diintegrasikan terdiri dari segmen *Low Hanging Fruit* sebanyak 46.951 EDC, *merchant strategic* sebanyak 7.264 EDC, *merchant retail eksisting* sebanyak 28.846 EDC dan *merchant retail new* sebanyak 3.034 EDC. Dengan terintegrasikannya EDC *Sharing* Himbara ini diharapkan dapat mempermudah nasabah dalam bertransaksi, terutama ketika berbelanja di sejumlah *merchant* BUMN.

C. Dukungan Penyelamatan Pemegang Polis PT Jiwasraya (Persero)



Program penyelamatan pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero)/"PT Jiwasraya" didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian, yang merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab Pemerintah selaku Pengendali/Pemegang Saham PT Jiwasraya yang mengalami permasalahan *insolvency* sejak tahun 2018. Sejalan dengan hal tersebut, Direksi PT Jiwasraya telah melakukan penyusunan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/"OJK" terakhir pada tanggal 14 September 2020

dan telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK berdasarkan Surat OJK S-449/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

Selain itu, Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-187/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Penugasan Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), telah memberikan penugasan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/"PT BPUI" untuk membantu dan melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam Program Penyelamatan dan Penyehatan (Restrukturisasi) PT Jiwasraya, yang salah satunya mendirikan anak perusahaan PT Asuransi Jiwa IFG/"IFG Life" yang akan menerima/mengelola eks kewajiban/Polis PT Jiwasraya hasil restrukturisasi.

Selanjutnya, Direksi PT Jiwasraya mengirimkan Surat Nomor 00588/Jiwasraya/U/2020 perihal Penyampaian Perubahan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang menjadi dasar bagi Menteri BUMN dalam menyusun surat kepada Menteri Keuangan Nomor SR-178/MBU/03/2020 tentang Penyampaian Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berisikan penyampaian RPK, informasi rencana pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN), serta usulan pembentukan tim gabungan lintas instansi pemerintah.

Direksi PT Jiwasraya kembali menyampaikan revisi buku RPK melalui Surat Nomor 01293/Jiwasraya/U/0720 perihal Permohonan Persetujuan Revisi Buku Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 24 Juli 2020, dimana perubahan dilakukan sesuai dengan usulan skema perubahan dari Tim Percepatan Restrukturisasi PT Jiwasraya. Selanjutnya, Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Perubahan Buku Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku RUPS PT Jiwasraya telah memberikan persetujuan atas revisi Buku RPK PT Jiwasraya. OJK melalui surat nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), juga telah memberikan pernyataan tidak berkeberatan atas RPK PT Jiwasraya yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN sebagaimana di atas.

Selanjutnya pada tahun 2023, OJK menyampaikan permintaan penyampaian Rencana Tindak sebagai bagian dari RPK Perubahan (RPK-P) kepada PT Jiwasraya sesuai POJK Nomor 5 tahun 2023 kepada PT Jiwasraya melalui surat nomor S-35/PD.12/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Permintaan Penyampaian Rencana Penyehatan Keuangan Perubahan Sebagai Bagian dari Rencana Tindak Penyelesaian Portofolio PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi IFG Life.

Menanggapi hal tersebut, PT Jiwasraya selanjutnya menyampaikan dokumen Rencana Tindak PT Jiwasraya kepada OJK beserta kelengkapannya melalui surat nomor 00713/S/U/CSP/1023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Pengiriman Rencana Tindak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat nomor S-196/PD.12/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Tanggapan atas Rencana Tindak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang pada intinya menyampaikan persetujuan OJK atas Rencana Tindak PT Jiwasraya tersebut di atas.

Penjelasan atas skenario penyelamatan untuk Pemegang Polis PT Jiwasraya yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini sebagai berikut:

1. Restrukturisasi, dilakukan oleh PT Jiwasraya yaitu dengan memberikan penawaran restrukturisasi polis (perubahan manfaat) kepada para pemegang polis sehingga polis yang nantinya akan dialihkan kepada IFG Life merupakan polis hasil restrukturisasi.

2. *Bail-in*

PT BPUI telah melakukan pendirian IFG Life dengan dana awal sebesar Rp150 Miliar dan selanjutnya PT BPUI sesuai dengan Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara Kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2021 memerlukan penambahan dana untuk injeksi modal kepada IFG Life dalam rangka menerima pengalihan portofolio adalah sebesar Rp26,7 Triliun. Adapun sumber pemenuhan dana tersebut berasal dari dana PMN sebesar Rp20 Triliun dan *fundraising* yang dilakukan PT BPUI sebesar Rp6,7 Triliun dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.06/2021 tanggal 8 Agustus 2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, telah diberikan alokasi anggaran penambahan Penyertaan Modal Negara pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebesar Rp20 Triliun. Selanjutnya pencairan dana PMN sebesar Rp20 Triliun kepada PT BPUI telah dilakukan pada 22 Oktober 2021 dan telah diteruskan kepada IFG Life pada 24 November 2021 sebagaimana persetujuan Menteri BUMN nomor S-850/MBU/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG.

- b. Pencairan dana *fundraising* sebesar Rp6,7 Triliun yang berasal dari *leveraging* dividen perusahaan anak berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (“Himbara”) kepada PT BPUI telah dilakukan pada 25 Februari 2022 dan Kementerian BUMN telah memberikan persetujuan penambahan modal dari BPUI kepada IFG Life dari dana *fundraising* tersebut pada tanggal 25 April 2022 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 22 Mei 2022 dan juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN nomor S-262/MBU/04/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG sebesar Rp6,7 Triliun.

Berdasarkan data hasil perhitungan Bahana Sekuritas sebagai *Lead Consultant* bersama Milliman, KJPP Suwendo Rinaldy dan Rekan, Ali Budiarjo, Nugroho & Reksodiputro Counsellors at Law, serta Ernst & Young (Konsultan Perhitungan Pendanaan) dengan pendampingan dari BPKP, masih terdapat liabilitas polis yang belum dialihkan s.d. tanggal 31 Desember 2022 dengan nilai buku sebesar ±Rp6,8 Triliun. Dalam perhitungan tersebut, diproyeksikan nilai liabilitas polis pada 31 Desember 2023 sebesar ±Rp7,7 Triliun, sehingga dibutuhkan total pendanaan sebesar ±Rp8,01 Triliun untuk menjaga target RBC sebesar 135%.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life, telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2022 tentang Program Penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BPKP dan pejabat lainnya. Pada pokoknya, Presiden RI telah memberikan arahan agar mempercepat proses transfer Polis PT Jiwasraya kepada IFG Life. Selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2023 tentang Tindak Lanjut Rapat Internal tentang Dividen dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023 dengan salah satu agendanya membahas pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka penyelesaian pengalihan liabilitas (polis) Jiwasraya. Dalam rapat tersebut terdapat arahan Presiden untuk menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan terkait Jiwasraya dan Pemerintah akan mengeluarkan kembali anggaran untuk

menyelesaikan permasalahan PT Jiwasraya, karena prosesnya telah “setengah jalan”. Menindaklanjuti arahan tersebut, dilakukan pemenuhan kebutuhan dana untuk penyelesaian pengalihan sisa polis PT Jiwasraya kepada IFG Life dengan rincian sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, surat Menteri Keuangan nomor S-977/MK.06/2023 tanggal 26 November 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, telah diberikan alokasi anggaran penambahan Penyertaan Modal Negara pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebesar Rp3 Triliun. Selanjutnya, pencairan dana PMN sebesar Rp3 Triliun kepada PT BPUI telah dilakukan dan diteruskan kepada IFG Life pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana surat Wakil Menteri BUMN Selaku Kuasa Pemegang Saham PT BPUI nomor S-646/MBU/Wk.R/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG.
 - b. Pencairan dana *fundraising* sebesar Rp1,45 Triliun yang berasal dari pinjaman perbankan dari Himbara kepada PT BPUI telah dilakukan pada tanggal 7 November 2023, dimana Menteri BUMN telah memberikan dukungan pelunasan pinjaman perbankan tersebut menggunakan dividen anak perusahaan PT BPUI melalui surat nomor S-548/MBU/11/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Tanggapan atas Rencana Pelunasan Pinjaman Perbankan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), serta persetujuan Menteri BUMN penyertaan modal PT BPUI kepada IFG Life melalui surat nomor S-547/MBU/11/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG.
 - c. Akan dilakukan penambahan modal sebesar Rp3,556 Triliun yang berasal dari PMN Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan terlaksana pada kuartal I tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
3. Transfer dilakukan oleh PT Jiwasraya kepada IFG Life, yaitu dengan mengalihkan polis hasil restrukturisasi dan/atau polis lain yang telah memenuhi persyaratan untuk

dialihkan kepada IFG Life termasuk dengan seluruh aset dan kewajiban kecuali portofolio yang menolak restrukturisasi. Direksi PT Jiwasraya melalui surat nomor 01039/S/U/CSP/1021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tentang Persetujuan Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya Kepada PT Asuransi Jiwa IFG dan Direksi PT BPUI melalui surat nomor 136/DIRUT/BPUI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Untuk Menerima Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polls) Yang Diikuti Dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG Sebagai Anak Perusahaan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), telah mengajukan persetujuan kepada Menteri BUMN selaku RUPS masing-masing untuk mengalihkan dan menerima liabilitas polis PT Jiwasraya ke IFG Life.

Selanjutnya Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-851/MBU/11/2021 perihal Persetujuan Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG, dan surat nomor S-945/MBU/12/2021 perihal Persetujuan atas Rencana PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Selaku Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa IFG untuk Memberikan Persetujuan kepada PT Asuransi Jiwa IFG dalam rangka Menerima Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG/"IFG Life", telah menyetujui proses transfer sebagai berikut:

- a. PT Jiwasraya melakukan pengalihan dengan nilai buku atas Polis yang siap dialihkan kepada IFG Life secara bertahap sebanyak 230.322 (dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua) Polis dengan nilai buku per 30 Juni 2021 sebesar Rp33.018.125.953.769,- (tiga puluh tiga Triliun delapan belas Miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai laporannya nomor R-392/2.0752/AU.1/08/1014-1/1/IX/2021 tanggal 29 September 2021;
- b. PT Jiwasraya untuk melakukan pengalihan dengan nilai buku atas aset dan kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life dengan nilai buku per 30 Juni 2021 yang

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai laporannya nomor: R-392/2.0752/AU.1/08/1014- 1/1/IX/2021 tanggal 29 September 2021 secara bertahap, sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan yang mengikuti pengalihan Polis yang siap dialihkan.

Sejalan dengan rencana Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life tersebut, OJK telah memberikan persetujuan izin pengalihan polis (liabilitas) dari PT Jiwasraya kepada IFG Life melalui surat nomor:

- a. S-387/NB.2/2021 tanggal 10 Desember 2021 perihal Pengalihan Portofolio Aset dan Liabilitas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepada PT Asuransi Jiwa IFG, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT Jiwasraya akan mengalihkan portofolio pertanggungan kepada IFG Life pada Tahap I yaitu atas polis yang telah setuju restrukturisasi s.d. 30 Juni 2021 dan polis unit link dengan nilai buku per 30 Juni 2021 sebesar ±Rp33,02 Triliun dengan total polis sebanyak 230.322 polis.
- b. S-243/NB.2/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Pengalihan Portofolio Pertanggungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG yang pada pokoknya menyampaikan bahwa OJK menyetujui pengalihan polis PT Jiwasraya kepada IFG Life pada Tahap II dengan nilai buku per 31 Agustus 2022 sebesar Rp1,17 Triliun dengan total polis sebanyak 351 polis yang telah setuju restrukturisasi.
- c. S-3/PD.1/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dengan nilai liabilitas sebesar Rp27,36 Miliar.
- d. S-40/PD.1/2023 tanggal 7 Desember 2023 dengan nilai liabilitas sebesar Rp2,75 Triliun.
- e. S.46/PD.1/2023 tanggal 27 Desember 2023 untuk sisa liabilitas yang belum dialihkan dari PT Jiwasraya kepada IFG Life.

Adapun capaian atas proses Pengalihan Polis yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Jiwasraya kepada IFG Life sampai dengan *unaudited* 31 Desember 2023, sebagai berikut:

- a. Total nilai liabilitas polis yang telah dialihkan dari PT Jiwasraya kepada IFG Life sebesar ±Rp35,21 Triliun.

- b. Total nilai liabilitas polis yang belum dialihkan dari PT Jiwasraya kepada IFG Life sebesar ±Rp2,73 Triliun yang terdiri dari:
- 1) Polis korporasi dengan total nilai liabilitas sebesar ±Rp1,33 Triliun.
 - 2) Polis ritel dengan total nilai liabilitas sebesar ±Rp1,20 Triliun.
 - 3) Polis *bancassurance* dengan total nilai liabilitas sebesar ±Rp0,20 Triliun.
- c. Aset PT Jiwasraya yang telah dialihkan kepada IFG Life sampai dengan *unaudited* 31 Desember 2023 sebesar ±Rp8,76 Triliun yang terdiri dari Aset Finansial sebesar ±Rp3,35 Triliun dan Aset Non Finansial sebesar ±Rp5,41 Triliun.
- d. Adapun progres pengalihan sebagaimana uraian di atas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Aset/ Pendanaan	Telah Dialihkan	Belum Dialihkan	Total	Liabilitas	Telah Dialihkan	Belum Dialihkan	Total
	Nilai Aset	Nilai Aset	Nilai Aset		Liabilitas	Liabilitas	Liabilitas
 Aset Finansial	Rp3,35 T	-	Rp3,35 T	 Korporasi	Rp17,89 T	Rp1,33 T	Rp19,22 T
 Aset Non-finansial	Rp5,41 T	Rp0,15 T	Rp5,56 T	 Ritel	Rp7,03 T	Rp1,20 T	Rp8,23 T
Total Aset	Rp8,76 T	Rp0,15 T	Rp8,91 T	 Bancassurance	Rp10,29 T	Rp0,20 T	Rp10,49 T
 PMN & Fundraising*	Rp31,16 T	Rp3,56 T	Rp34,72 T	Total Liabilitas	Rp35,21 T	Rp2,73 T	Rp37,94 T
Total Aset & Pendanaan	Rp39,92 T	Rp3,71 T	Rp43,63 T				

Catatan: Liabilitas yang telah dialihkan menggunakan nilai buku terakhir saat pengalihan, sedangkan nilai liabilitas yang belum dialihkan menggunakan posisi per 31 Desember 2023 namun dengan nilai buku PT Jiwasraya per 30 November 2023.

Seremoni Pengalihan Polis dan Pengumuman Berakhirnya Restrukturisasi Polis PT Jiwasraya



Pada 29 Desember 2023 melalui Undangan Direksi PT BPUI nomor 713/DIRUT/BPUI/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, telah dilakukan acara seremonial bertajuk Seremoni Pengalihan Polis dan Pengumuman Berakhirnya Program Restrukturisasi Jiwasraya. Dalam acara yang turut dihadiri oleh Bapak Kartika Wirjoatmodjo selaku Wakil Menteri BUMN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, Robertus Billitea, Direktur Utama IFG sekaligus Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Hexana Tri Sasongko, Plt Direktur Utama IFG Life Eli Wijanti, dan Plt Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso, telah disampaikan bahwa nasabah PT Jiwasraya yang mengikuti restrukturisasi telah mencapai $\pm 99,72\%$. Lebih lanjut, Wakil Menteri BUMN juga menyatakan bahwa sebanyak $\pm 0,28\%$ nasabah yang menolak restrukturisasi dengan nilai polis sebesar $\pm \text{Rp}180$ Miliar masih akan tetap diakomodir dengan cara mengajukan restrukturisasi susulan.



D. Pasar Karbon BUMN

Pasar karbon adalah salah satu upaya dunia dalam melakukan konservasi energi dan mencegah perubahan iklim global. Indonesia memiliki 75%-80% kredit karbon dunia dari hutan mangrove, gambut, rumput laut hingga terumbu karang. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mengurangi kredit karbon di Indonesia, Menteri BUMN menerbitkan Surat Edaran Menteri BUMN tentang Pelaksanaan Program Dekarbonisasi dan

Penyelenggaraan NEK BUMN telah ditandatangani Menteri BUMN dengan nomor SE-6/MBU/12/2022 tentang Pelaksanaan Program Dekarbonisasi dan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Badan Usaha Milik Negara untuk Mendukung Pencapaian Target Kontribusi Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

Program dekarbonisasi dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon sukarela/*Voluntary Carbon Market* (VCM) yang pada tahap awal akan dilaksanakan antar BUMN. Peran dan kontribusi *Holding* Jasa Survei (HJS) yaitu, akselerasi Program Dekarbonisasi Sektor BUMN dan Pembangunan Ekosistem dan Infrastruktur Pasar Karbon Nasional. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) selaku induk *Holding* Jasa Survei ditunjuk untuk menjalani bisnis berbasis ekonomi hijau melalui kerjasama dengan PT Energy Management Indonesia (EMI). Salah satu langkah pertama terkait program dekarbonisasi adalah dengan menyiapkan pilot project bersama 7 BUMN pilot, yaitu Pertamina, PLN, Pupuk Indonesia, MIND ID, SIG, Perkebunan Nusantara, dan Perhutani.

Selama tahun 2023 IDSurvey group telah melakukan berbagai pengembangan guna melakukan penawaran layanan secara *end-to-end* guna memberikan nilai tambah di sepanjang rantai nilai ekosistem bisnis ekonomi hijau. IDSurvey juga mengembangkan sistem terpadu dalam mendukung pencapaian target NDC dan NZE Indonesia dengan nama EQUATR Apps. Selain mendukung pencapaian target NDC dan NZE Indonesia, EQUATR turut serta dalam meningkatkan *awareness* pada pelaku usaha dan masyarakat umum tentang dekarbonisasi.

Deskripsi Layanan	 Dekarbonisasi & Carbon Trading Ecosystem	 Eco Framework (Sertifikasi Lingkungan, Bangunan)	 ESG, UN SDGs, Sustainability
Daftar Layanan EQUATR IDSurvey	• GHG Awareness Training • GHG Inventory & Baselineing • GHG Roadmap & MACC¹ • GHG Monitoring & Reporting • Carbon Footprint/ LCA² • Green Project Feasibility Study • DRAM³/ PDD⁴ & LCAM⁵ • Validation/ Verification • SRN-PPH⁶ Assistance • Carbon Market Intermediary • Green Financing Brokerage	• Green Port Assessment • Green Port Award Assistance • Green Industry Certification • Green Industry Assistance • Green Building Assistance • Green Building Verification • PROPER Preparation • PROPER Award Assistance • Environmental & Energy Audit • Environmental Monitoring • Eco-labelling	• ESG⁷ Awareness Training • ESG Rating Assistance • ESG Roadmap & Strategy • ESG Shadow Rating • ESG Booster • UN SDGs⁸ Awareness Training • UN SDGs Analysis & Rating • UN SDGs Advisory • Sustainability Report • Sustainability Financing

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh IDSurvey group guna pengembangan bisnis dekarbonisasi. Beberapa hal yang telah dilakukan hingga Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan PMO Dekarbonisasi;

2. Pengadaan 4 Personil Tenaga Ahli;
3. Penyelesaian beberapa pekerjaan pada Pelindo dan MIND ID (total pendapatan sebesar Rp557 juta;
4. Penawaran dan perolehan pekerjaan pada Pertamina Power Indonesia, Pupuk Indonesia *Holding Company*, PTPN III, MIND ID, dll;
5. Telah melakukan penandatanganan MoU dengan IDX pada tanggal 27 Februari 2023 dalam rangka strategic partnership perdagangan karbon.

E. Percepatan Sinergi dan Integrasi Logistik

Program sinergi dan integrasi logistik dilatarbelakangi oleh adanya daya saing logistik nasional Indonesia yang dinilai masih belum optimal yang disebabkan oleh 4 (empat) isu utama logistik nasional, antara lain:

1. Isu Proses bisnis logistik
 - Masih terdapat inefisiensi pada proses bisnis *first, middle, dan last mile* layanan logistik nasional yang diakibatkan oleh rendahnya utilisasi dan kolaborasi kargo, belum terstandarisasinya kompatibilitas sistem moda, dan sebagainya;
 - Terdapat cargo dan *trade imbalance* antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta ketersediaan jasa logistik yang tidak merata karena belum meratanya pembangunan ekonomi serta kapasitas dan kapabilitas fasilitas logistik;
 - Isu logistik komoditas, dimana potensi *economic loss* dari pengelolaan logistik komoditas masih cukup tinggi, diakibatkan oleh belum memadainya fasilitas handling komoditas khusus, belum terlaksananya *good handling practice* pada rangkaian distribusi logistik;
 - Isu pelaku logistik, dimana pelaku industri logistik di Indonesia masih terfragmentasi oleh pelaku usaha dengan skala UMKM sehingga berdampak pada sulitnya penerapan *enforcement* standarisasi layanan yang merata.
2. Isu Logistik antar Wilayah
 - Dimana terdapat cargo dan *trade imbalance* antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta ketersediaan jasa logistik yang tidak merata karena belum meratanya pembangunan ekonomi serta kapasitas dan kapabilitas fasilitas logistik;
3. Isu Logistik Komoditas
 - Dimana potensi *economic loss* dari pengelolaan logistik komoditas masih cukup tinggi, diakibatkan oleh belum memadainya fasilitas *handling* komoditas khusus, belum terlaksananya *good handling practice* pada rangkaian distribusi logistik;
4. Isu Pelaku Logistik
 - Dimana pelaku industri logistik di Indonesia masih terfragmentasi oleh pelaku usaha dengan skala UMKM sehingga berdampak pada sulitnya penerapan *enforcement* standarisasi layanan yang merata.

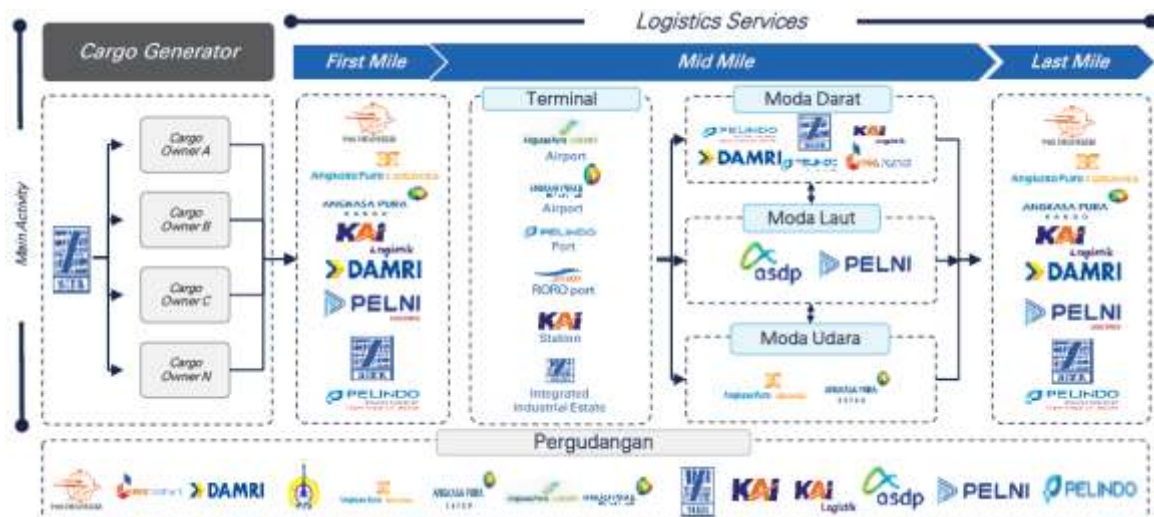
- Dimana terdapat *cargo* dan *trade imbalance* antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta ketersediaan jasa logistik yang tidak merata karena belum meratanya pembangunan ekonomi serta kapasitas dan kapabilitas fasilitas logistik;

Isu-isu tersebut menggambarkan bahwa konsep integrasi logistik masih dilakukan secara vertikal dan terfragmentasi yakni BUMN *Logistics Service Provider* (LSP) masih menjalankan aktivitas logistiknya masing-masing tanpa adanya integrasi ekosistem logistik sebagai bentuk bentuk kolaborasi antara BUMN LSP sebagai operator logistik dengan BUMN *Cargo Owner* sebagai pengguna jasa. Selain itu, BUMN Non-LSP masih memanfaatkan masing-masing *source*-nya untuk aktivitas logistik melalui anak atau cucu perusahaan untuk kepastian dan efisiensi layanan logistik yang dikelola sendiri.

Berdasarkan isu-isu tersebut maka hal ini mendorong terciptanya sinergi dan integrasi logistik ekosistem BUMN dengan tujuan:

1. BUMN tetap fokus melakukan *core business*nya sehingga layanan logistik dapat dijalankan oleh BUMN LSP dengan menciptakan ekosistem logistik yang prima, berskala besar, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
2. menghasilkan layanan yang lebih optimal dengan SLA yang lebih cepat, tarif logistik yang kompetitif, dan *value added* lainnya; serta
3. menciptakan *operational excellence* layanan logistik yang setara bahkan lebih efisien dibandingkan dengan penyedia jasa logistik lainnya

Dalam hal ini, BUMN Logistik berperan penting dalam ekosistem logistik nasional sehingga diperlukan suatu sinergi yang kuat dengan mendorong terciptanya layanan *end-to-end* yang dapat disediakan dengan memanfaatkan layanan moda yang dioperasikan langsung oleh BUMN Logistik yang saat ini telah meng-*cover* seluruh *value chain* dari *first mile*, *middle mile*, sampai dengan *last mile*.



Sinergi BUMN Logistik diharapkan dapat menghasilkan layanan yang lebih optimal dengan SLA yang lebih cepat, tarif logistik yang kompetitif, dan *value added* lainnya dibandingkan dengan penyedia jasa logistik lainnya. Key program sinergi dan Integrasi logistik ekosistem BUMN antara lain kolaborasi pengembangan produk layanan logistik bersama untuk menghasilkan *value added* dan *tailored services* dengan kualitas dan tarif yang terstandar antar BUMN Logistik, serta pendayagunaan kapasitas dan kapabilitas operasional antar BUMN Logistik sehingga dapat melayani berbagai segmen muatan dan menjangkau cakupan rute yang lebih luas, serta pengembangan platform terintegrasi yang meng-capture aktivitas logistik *end-to-end*.

Program ini sejalan dengan inisiatif strategis atau *outcome* dalam konsep *Roadmap* BUMN Tahun 2023-2034 pada inisiatif Konektivitas Darat, Laut, dan Udara pada aspek Logistik yang menjabarkan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sebagai berikut:

Rencana Jangka Pendek (2023 – 2024)

1. Penyelarasan bisnis proses layanan logistik melalui kolaborasi BUMN Logistik dan BUMN Cargo Owner: implementasi dan percepatan inisiatif *quickwin* sinergi produk.
2. Identifikasi potensi perbaikan infrastruktur dan layanan untuk mendapatkan integrasi layanan logistik yang lebih baik (tahap 1).
3. Identifikasi regulasi yang diperlukan untuk memberikan legalitas pada transaksi berbasis digital.

4. Pengembangan strategi *hub and spoke* untuk optimalisasi transportasi logistik antar pulau khususnya di Indonesia Timur

Rencana Jangka Menengah (2025 -2029)

1. Pengembangan sistem IT layanan logistik yang terintegrasi (*single platform*).
2. Pembangunan infrastruktur dan layanan untuk mendapatkan integrasi layanan logistik yang lebih baik (tahap 2).
3. Pengembangan *logistic ecosystem management* dalam satu *platform* yang menyediakan solusi komprehensif distribusi logistik mulai dari *planning*, *tracking* dan *tracing*.
4. Komitmen penerapan SLA terbaik dalam integrasi layanan logistik.
5. Pengembangan ekosistem integrasi logistik melalui penguatan bisnis proses sesuai peran *cargo owner/cargo creator*, *first mile*, *middle mile*, *last mile*, dan transporter/multimoda.
6. Penyelarasan pasar melalui Kontrak Logistik dengan BUMN *Cargo Owner*.
7. Pemanfaatan aset bersama dalam memenuhi layanan kepada pengguna jasa melalui aksi korporasi dengan pembentukan Indonesia Logistics Entity (*holding / merger / pemurnian bisnis*)/Indonesia *Logistics Network* (sistem informasi dan teknologi/digitalisasi).
8. Penerapan ESG (*Green and Smart Logistic Ecosystem*)

Rencana Jangka Panjang (2030-2034)

1. Layanan logistik terintegrasi untuk ekspor dan impor yang mencakup layanan custom clearance, karantina, otoritas, dan lainnya melalui Indonesia *Logistics Entity / Indonesia Logistics Network*.
2. Implementasi *high technology* dalam proses sinkronisasi layanan yang diberikan dengan keunggulan berupa efisiensi biaya/SLA yang baik.
3. Menjadi Top 20 Negara dengan biaya logistik yang paling efisien.

Dalam upaya implementasi percepatan peningkatan sinergi dan integrasi logistik, telah dilakukan pendalaman terhadap konsep dan potensi kolaborasi yang BUMN *Logistic Service Provider* (LSP) sebagai BUMN penyedia layanan logistik dan BUMN *Cargo Owner* sebagai penyedia muatan barang melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Sinergi dan Integrasi Layanan Logistik Ekosistem BUMN. Menindaklanjuti FGD tersebut, telah

terlaksana program percepatan peningkatan sinergi dan integrasi logistik pada Tahun 2023, antara lain:

a. Penyesuaian struktur dari Tim *Project Management Office* (PMO)

Telah ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-354/MBU/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Implementasi Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem BUMN sebagai bentuk tindaklanjut atas Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-130/MBU/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Tim Implementasi Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Logistik Indonesia yang masa kerjanya telah berakhir pada 16 Juni 2023. Berdasarkan perkembangan hasil kajian konsultan, progres pelaksanaan program tim, dan adanya inisiatif strategis dalam konsep *Roadmap* BUMN 2023-2034, maka perlu dibentuk Tim baru sebagai pembaharuan konsep integrasi logistik di tahun 2022. Tim baru yang telah dibentuk tidak hanya melibatkan BUMN Logistik sebagai *Logistic service Provider* (LSP), namun perlu juga melibatkan BUMN *Cargo Owner*.

Kolaborasi antara BUMN LSP dan BUMN *Cargo Owner* diharapkan dapat menciptakan implementasi konsep sinergi dan integrasi logistik dapat lebih komprehensif khususnya dalam lingkup ekosistem BUMN dengan konsep struktur *Project Management Office* (PMO) berupa fungsi:

- k) Sinergi produk, yakni sebagai kolaborasi BUMN LSP dalam bentuk layanan multimoda untuk mendapatkan model bisnis integrasi layanan logistik dengan menggabungkan potensi kapabilitas layanan logistik yang dimiliki oleh masing-masing anggota klaster BUMN Logistik yang tersebar dalam fungsi *first mile*, *middle mile*, dan *last mile*;
- l) Sinergi pasar, yakni sebagai target pasar layanan logistik yang diharapkan dapat memberikan dukungan skalabilitas kargo sehingga tercipta tarif layanan yang lebih kompetitif dan *profitable* dalam rangka memperkuat *service excellence*. Adapun pengembangan target pasar logistik dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan terhadap segmen pasar yang potensial, yaitu BUMN *Cargo Owner*, Ekosistem Simpul.
- m) Sinergi *platform*, yakni sebagai aggregator layanan logistik dalam bentuk *platform* yang dapat menciptakan *value proposition* berupa tarif yang kompetitif, layanan

solusi logistik yang terintegrasi sesuai kebutuhan pelanggan, dan jaringan rute yang luas.

b. Pendalaman atas inisiatif analisis kebutuhan layanan logistik BUMN *Cargo Owner*

Pendalaman atas inisiatif sinergi dan integrasi logistik yang telah dilakukan bersama dengan tim PMO dan konsultan menghasilkan 10 (sepuluh) inisiatif sinergi produk, 3 (tiga) inisiatif sinergi pasar, dan 1 (satu) sinergi platform.

Key strategy dalam konsep sinergi produk yakni menciptakan *value added* berupa pengembangan layanan *retail logistic* yang kompetitif dan mengedepankan *service excellence* antara lain:

1) Sinergi Layanan Interland

- a) Angkutan Petikemas PELNI sebagai *Backbone Mid Mile Sea Freight* BUMN Klaster Logistik
- b) Angkutan Penyebrangan ASDP sebagai Alternatif *Sea Freight* pada Rute Tertentu
- c) Angkutan non-Petikemas PELNI sebagai *Backbone Mid Mile Sea Freight General Cargo* dan *Express Cargo*
- d) Ekstensifikasi Layanan *Air Freight* untuk *Special Cargo*

2) Sinergi Layanan Intraland

- i. *Integrated Ground Transportation Service Provider*
- ii. Kereta Api Petikemas Lintas Jawa KAI sebagai Alternatif Intermoda *Sea Freight*
- iii. Pemanfaatan KA sebagai Intermoda Pengiriman Lintas Pulau
- iv. Ekstensifikasi Layanan *Door to Door* Muatan Lepas ASDP
- v. Angkutan Bus DAMRI sebagai Alternatif *Backbone Mid Mile* Layanan Kurir
- vi. Intensifikasi Layanan *Door to Door* untuk *Quick Cargo Air Freight*

Layanan sinergi produk yang dimiliki BUMN LSP tersebut, nantinya akan dapat dimanfaatkan secara bersinergi dan *end-to-end* oleh BUMN *Cargo Owner* melalui sinergi pasar. Keterlibatan BUMN *Cargo Owner* sangat penting dalam *value chain* untuk membentuk kolaborasi sinergi dan integrasi logistik ekosistem BUMN. Telah dilakukan pendalaman atas analisis kebutuhan layanan logistik dengan melakukan pengumpulan data atau informasi BUMN *Cargo Owner* yang dapat disinergikan dengan BUMN LSP melalui pemetaan aktivitas eksisting masing-masing produk atau komoditas dari hulu hingga ke hilir. Terdapat beberapa BUMN *Cargo Owner* yang

terlibat dalam PMO, antara lain PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dan Perum Perhutani. Selain itu, dalam perjalanannya terdapat beberapa BUMN *Cargo Owner* lain yang memiliki potensi untuk dapat dilibatkan dan dikolaborasikan dengan BUMN LSP yaitu PT Bio Farma (Persero) dan Perum BULOG.

Adapun *key strategy* dalam sinergi pasar yakni pengembangan targeted market yang mengedepankan kolaborasi layanan yang bersifat dedicated pada 3 inisiatif utama, yakni:

1) Ekosistem BUMN *Cargo Owner*

Sinergi pengembangan pasar untuk melayani kebutuhan logistik BUMN *Cargo Owner* secara khusus yang melibatkan seluruh BUMN Klaster Logistik yang dapat berperan sebagai *point of sales*;

2) Simpul Logistik Pelabuhan

Sinergi pengembangan pasar dalam rangka melayani kargo yang melintasi Pelabuhan yang dikelola oleh BUMN dimana logistik terkonsolidasi pada Pelabuhan sebagai gateway domestic maupun internasional serta Pelabuhan sebagai pusat logistik yang terintegrasi dengan berbagai infrastruktur moda transportasi logistik dan fasilitas pendukung lainnya yang melibatkan Pelindo sebagai *point of sales* utamanya. Selain itu, terdapat simpul logistik pada Bandara dalam rangka melayani kargo yang melintasi Bandara yang dikelola oleh BUMN dimana berbagai daerah masih perlu dihubungkan melalui konektivitas udara menimbang keterbatasan infrastruktur logistik di daerah tersebut dan pertumbuhan *massive e-commerce* yang menuntut perlunya pengiriman quick melalui moda udara yang melibatkan Angkasa Pura Logistik dan Angkasa Pura Kargo sebagai *point of sales* utamanya.

3) Ekosistem BUMN Kawasan Industri

Sinergi pengembangan pasar untuk melayani kebutuhan logistik tenant Kawasan industri yang dikelola BUMN dan dapat berperan sebagai *cargo generator* yang menghimpun berbagai *tenant* penghasil kargo di dalamnya dengan pertimbangan lokasi yang strategis dan terintegrasi dengan infrastruktur moda transportasi logistik. Inisiatif ini melibatkan SIER sebagai *point of sales* utamanya.

Untuk mendukung sistem layanan sinergi dan integrasi yang dilakukan oleh BUMN LSP dan BUMN *Cargo Owner*, maka diperlukan *captive market* untuk mendukung

skalabilitas kargo yang memanfaatkan sinergi produk yang dihubungkan melalui *Integrated Logistics Platform*, yakni GLID. Selain itu, GLID berperan sebagai aggregator layanan logistik yang menjadi solusi logistik yang unggul dan kompetitif dimana *Cargo Owner* akan berpotensi mendapatkan rekomendasi layanan dan rute terbaik dengan opsi SLA pengiriman tercepat dan termurah serta opsi cargo handling yang sesuai dengan kebutuhan *Cargo Owner*. Selain itu, GLID menerapkan *shipment visibility* dan *user- friendly customer service* dimana *Cargo Owner* dapat mengetahui status pengiriman barang serta mengakses informasi terkait layanan dengan lebih mudah. Selain melalui platform GLID, nantinya layanan logistik dapat diakses melalui PaDi UMKM sebagai landing fitur GLID.

Dalam upaya implementasi percepatan peningkatan sinergi dan integrasi logistik telah dibentuk Tim *Project Management Office* (PMO) yang baru melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-354/MBU/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Implementasi Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem BUMN sebagai bentuk tindaklanjut atas Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-130/MBU/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Tim Implementasi Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Logistik Indonesia yang masa kerjanya telah berakhir pada 16 Juni 2023. Program tersebut dilakukan dengan melibatkan BUMN LSP dan BUMN *Cargo Owner*, antara lain:

BUMN Logistic Service Provider			
	PT Pos Indonesia (Persero)		PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)		Perum DAMRI
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)		PT Angkasa Pura I
	PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)		PT Angkasa Pura II
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)		
BUMN Cargo Owner			
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk		PT Bio Farma (Persero)
	PT Pupuk Indonesia (Persero)		Perum Perhutani
	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)		Perum BULOG
	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut		

Terdapat 3 (tiga) area kolaborasi yang dilakukan oleh PMO yakni:

1. Melakukan sinergi produk sebagai pengembangan layanan logistik BUMN yang *end to end* secara multimoda untuk menciptakan tarif yang kompetitif, opsi produk yang beragam, dan kualitas layanan yang unggul.
2. Melakukan sinergi pasar yang berkolaborasi dengan BUMN *Cargo Owner* untuk penyediaan solusi logistik bersama yang menciptakan efisiensi beban logistik melalui 3 (tiga) pendekatan terhadap segmen pasar yang potensial, yaitu BUMN *Cargo Owner*, Ekosistem Simpul Pelabuhan, dan Ekosistem BUMN Kawasan Industri;
3. Melakukan sinergi *platform* dengan pengembangan *platform aggregator* logistik BUMN yang mengintegrasikan database dari seluruh BUMN LSP serta layanan untuk mengintegrasikan dan mengorkestrasikan seluruh layanan logistik BUMN.



Sampai LKIP ini disusun, telah dilaksanakan *Kick off* Program Kerja PMO Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem BUMN yang menghasilkan *piloting project* berupa pelepasan muatan kerja sama BUMN LSP dengan BUMN *Cargo Owner* yaitu pengiriman beras *warehouse to warehouse* via *intermodal sea, rail, dan air freight* Perum Bulog, pengiriman produk *Cool Chain Product* (CCP) menggunakan *active cooling system* PT Bio Farma (Persero), dan pengiriman internasional produk-produk non kayu (gondorukem, *turpentine*, dan *alpha pinene*) Perum Perhutani. Selain itu, telah dilaksanakannya *Launching* GLID sebagai Platform Aggregator Logistik untuk layanan sinergi dan integrasi logistik ekosistem BUMN yang bekerja sama dengan PaDi UMKM.

F. Penggabungan Perum PPD dan Perum DAMRI

Sejalan dengan *Roadmap* BUMN Tahun 2020-2024, program restrukturisasi dan realignment BUMN terus dilakukan, salah satunya adalah Penggabungan Perum PPD dan Perum DAMRI. Hal ini sejalan pula dengan arahan strategis pengembangan transportasi jalan untuk pemerataan ekonomi, pengembangan wilayah dengan konektivitas dan integrasi transportasi jalan tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Layanan transportasi jalan di Indonesia dihadapkan oleh berbagai tantangan utama, antara lain:

1. Pemenuhan standarisasi transportasi darat belum optimal;
2. Aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi multi-moda relatif rendah; dan
3. *Fragmented Market* menciptakan kompetisi yang ketat, sehingga dibutuhkan penguatan BUMN transportasi jalan sebagai *value creator* dan *agent of development*.

Perum DAMRI dan Perum PPD memiliki *core business* yang sama, tapi memiliki kinerja keuangan dan operasional yang kurang optimal dikarenakan persaingan harga pada *fragmented market*, sehingga diperlukan penggabungan Perum DAMRI dan Perum PPD untuk:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan;
2. Memperkuat posisi perusahaan di pasar transportasi jalan; dan
3. Pemerintah memiliki 1 (satu) entitas yang dapat fokus melaksanakan program-programnya dalam layanan transportasi jalan.

Mekanisme Penggabungan Perum DAMRI dan Perum PPD merupakan opsi yang paling optimal berdasarkan penilaian sebagai berikut:

	Holding-Existing Company (Perum PPD dan Perum DAMRI sebagai perusahaan induk)	Holding-New Company (Perum PPD dan Perum DAMRI sebagai perusahaan anak)	Penggabungan (Perum PPD dan Perum DAMRI sebagai perusahaan induk)	Peleburan (Perum PPD dan Perum DAMRI sebagai perusahaan induk)
Struktur Organisasi	1. Struktur organisasi yang kompleks, multi-layered. 2. Struktur organisasi yang kompleks, multi-layered.	1. Struktur organisasi yang kompleks, multi-layered. 2. Struktur organisasi yang kompleks, multi-layered.	1. Struktur organisasi yang kompleks, multi-layered. 2. Struktur organisasi yang kompleks, multi-layered.	1. Struktur organisasi yang kompleks, multi-layered. 2. Struktur organisasi yang kompleks, multi-layered.
	1. Fokus pengembangan bisnis yang ada. 2. Fokus pengembangan bisnis yang ada.	1. Fokus pengembangan bisnis yang ada. 2. Fokus pengembangan bisnis yang ada.	1. Fokus pengembangan bisnis yang ada. 2. Fokus pengembangan bisnis yang ada.	1. Fokus pengembangan bisnis yang ada. 2. Fokus pengembangan bisnis yang ada.
	1. Perencanaan dan operasi yang kompleks. 2. Perencanaan dan operasi yang kompleks.	1. Perencanaan dan operasi yang kompleks. 2. Perencanaan dan operasi yang kompleks.	1. Perencanaan dan operasi yang kompleks. 2. Perencanaan dan operasi yang kompleks.	1. Perencanaan dan operasi yang kompleks. 2. Perencanaan dan operasi yang kompleks.
Kinerja Keuangan	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.
	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.
	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.	1. Rendahnya kinerja keuangan. 2. Rendahnya kinerja keuangan.
Kinerja Operasional	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.
	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.
	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.	1. Rendahnya kinerja operasional. 2. Rendahnya kinerja operasional.
Risiko	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.
	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.
	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.	1. Risiko yang tinggi. 2. Risiko yang tinggi.

Pemilihan Perum DAMRI sebagai *surviving entity* ditentukan berdasarkan parameter yang ditetapkan melalui *framework impact-effort* yang meliputi kajian peran strategis, kinerja bisnis komersial, dan kekuatan finansial (parameter *impact*) serta implikasi organisasi dan SDM, implikasi pajak, dan implikasi legal (*parameter effort*). Berdasarkan hasil analisis, Perum DAMRI memiliki nilai yang lebih tinggi dengan nilai 3,20 dibandingkan Perum PPD dengan nilai 2,39, terutama dalam hal parameter peran strategis, implikasi organisasi & SDM, implikasi pajak, dan implikasi legal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Parameter peran strategis, Perum DAMRI memiliki peran strategis yang lebih tinggi karena memiliki cakupan wilayah seluruh Indonesia.
2. Berdasarkan parameter keuangan, Perum DAMRI memiliki kinerja keuangan lebih baik dan dinilai lebih mampu untuk menerima beban implikasi penggabungan.
3. Pada parameter implikasi organisasi & SDM, Perum DAMRI dinilai memiliki kompleksitas yang lebih rendah untuk menjadi entitas yang menerima penggabungan karena penyesuaian sistem operasional organisasi akan lebih mudah dilakukan dari Perum PPD ke Perum DAMRI dibandingkan sebaliknya.
4. Dari sisi kompleksitas pembaruan kontrak SDM, apabila Perum DAMRI menjadi *surviving entity* potensi liabilitas yang dikeluarkan lebih rendah
5. Berdasarkan parameter implikasi pajak, Perum DAMRI sebagai entitas yang menerima penggabungan memiliki implikasi pajak yang lebih kecil dibandingkan Perum PPD sebagai entitas yang menerima penggabungan
6. Dari parameter implikasi hukum, Perum DAMRI sebagai entitas yang menerima penggabungan akan memakan waktu lebih cepat untuk penyelesaian balik nama aset tanah dan kendaraan Perum PPD dikarenakan aset Perum PPD yang lebih sedikit dibandingkan Perum DAMRI.
7. Dari sisi penyelesaian kewajiban kreditur, Perum DAMRI memiliki identifikasi kreditur yang lebih tinggi dan skema penyelesaian keberatan yang lebih rendah karena seluruh kreditur Perum DAMRI memiliki perjanjian yang jelas.

Penggabungan BUMN Transportasi Jalan dilakukan untuk mewujudkan empat objektif utama di tingkat negara (pemerintah), Masyarakat, BUMN dan Lingkungan. Keempat objektif tersebut adalah:

1. Meningkatkan konektivitas nasional guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

2. Layanan transportasi yang terstandarisasi dan unggul untuk meningkatkan kepuasan bagi pelanggan.
3. Meningkatkan skala usaha dan penciptaan nilai BUMN Layanan Transportasi melalui keunggulan operasional dan komersial dan keuangan.
4. Meningkatkan dampak positif bagi lingkungan dengan berkontribusi atas perubahan iklim.

Performa Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Penggabungan

Uraian	Audited 2020	Audited 2021	Audited 2022	RKAP 2023	Unaudited 2023	RKAP 2024	%	
	1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/4
Pendapatan	611,7	827,4	1.423,7	1.548,2	1.472,7	1.624,1	103%	95%
Biaya	558,5	622,5	1.030,6	1.151,4	1.073,5	1.601,6	104%	93%
Laba Usaha	53,2	249,9	393,1	396,8	399,2	22,5	102%	101%
Beban Bunga	17,0	14,0	13,0	13,0	14,5	24,0	112%	112%
Laba Bersih (Atr. Induk)	(323,3)	(76,8)	16,3	25,5	28,5	8,7	175%	112%
EBITDA	(91,9)	77,4	135,1	223,8	206,0	223,6	152%	92%
IBD	273,2	198,0	116,5	351,7	154,9	121,4	133%	44%
Total Aset	1.749,1	1.638,6	1.346,2	1.667,8	2.197,1	1.730,0	163%	132%
Total Liabilitas	933,7	985,1	808,3	822,1	972,3	875,1	120%	118%
Total Ekuitas	815,4	653,5	537,9	845,8	1.224,8	854,9	228%	145%
NOCF	(67,3)	17,4	107,0	36,7	68,2	77,9	64%	186%
Mutasi Kas	(83,3)	(17,7)	68,7	(14,2)	(2,5)	(15,5)	(4%)	18%
Saldo Kas	76,0	58,3	127,0	112,8	124,5	106,2	98%	110%
OPM	(32,5%)	(22,69%)	2,80%	0,60%	(0,07%)	1,39%	(3%)	(12%)
NPM	(31,21%)	(23,94%)	0,94%	1,70%	1,94%	0,54%	206%	114%
IBD to EBITDA	(2,97)	2,56	0,86	1,57	0,75	0,54	87%	48%
CAPEX	43	3	8	265	46	103	570%	17%

Proses Penggabungan BUMN Transportasi Jalan tahun 2023

1. Penyusunan kajian penggabungan;
2. Persetujuan Menteri BUMN terkait penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI melalui surat Menteri BUMN Nomor: S-858/MBU/12/2022 dan Nomor: S-859/MBU/12/2022 tanggal 22 Desember 2022;
3. Pelaksanaan rapat Pembahasan Antar Kementerian (PAK) I pada tanggal 12 Januari 2023, berdasarkan surat undangan nomor: UND-5/DHK.MBU.A/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 dan PAK 2 pada tanggal tanggal 18 Januari 2023, berdasarkan surat undangan nomor: UND-7/DHK.MBU.A/01/2023 tanggal 17 Januari 2023;



Sepanjang tahun 2023 dilakukan berbagai paya percepatan penyelesaian progres fisik melalui koordinasi pihak-pihak terkait dalam Project Management Office (PMO), terutama sehubungan dengan proses pengujian yang terdiri dari trial run dan trial operation yang dilaksanakan pada periode:

- *Trial Run*: 15 Mei – 17 Juli 2023;
- *Trial Operation*: 18 Juli – 27 Agustus 2023

Setelah melalui periode pengujian tersebut di atas, pada tanggal 28 Agustus 2023 Proyek LRT Jabodebek memulai operasi secara komersial (*commercial operation date*) dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Progres fisik proyek LRT Jabodebek sampai akhir tahun 2023 sebesar 99,54%, dimana masih terdapat *outstanding* item, berupa: (i) penyempurnaan sistem integrasi melalui update *software* berkelanjutan, dan (ii) delivery trainset ke-20 dari PT Industri Kereta Api (Persero) yang tertunda karena keterlambatan kedatangan komponen propulsi. Meskipun demikian, progres 0,46% yang tersisa tidak mengganggu operasi dan pelayanan penumpang LRT Jabodebek.

Terdapat beberapa isu strategis Proyek LRT Jabodebek yang menjadi *concern* Kementerian BUMN/Asisten Deputy Bidang Jasa Logistik pada tahun 2023, yaitu:

- a. Kesiapan operasi termasuk namun tidak terbatas pada integrasi sistem operasi, sarana, dan persinyalan melalui penyesuaian *software* sistem GoA3.

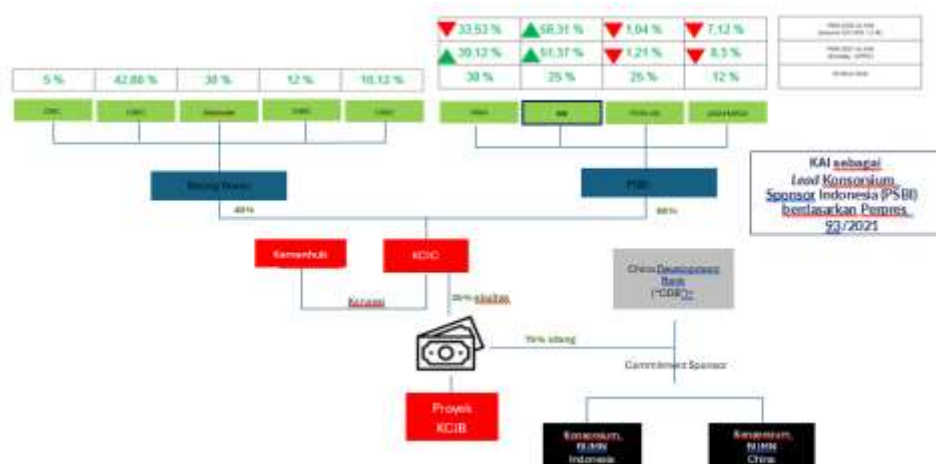
- b. Pemenuhan perjanjian kontribusi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai prasyarat penarikan dana perjanjian kredit sindikasi yang akan digunakan
- c. untuk pembayaran sarana dan prasarana LRT Jabodebek.
- d. Terdapat *cost overrun* pengadaan sarana LRT yang diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp111,9 Miliar berdasarkan reviu BPKP.
- e. Isu keausan roda sarana sebagai dampak dari desain lengkungan rel LRT Jabodebek sehingga diperlukan penanganan jangka pendek (melalui pelumasan dan grinding), jangka menengah (penggantian roda lebih awal daripada seharusnya), dan jangka panjang (masih perlu dilakukan kajian mendalam terhadap penyebab dan solusinya).
- f. Tertundanya *delivery trainset* ke-20.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti pada tahun 2024 terkait proyek LRT Jabodebek, antara lain:

- a. Penyempurnaan integrasi sistem operasi dan perbaikan sarana sehingga dapat meningkatkan frekuensi dan *headway* pengoperasian LRT Jabodebek.
- b. Pemenuhan perjanjian kontribusi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai prasyarat penarikan dana perjanjian kredit sindikasi yang akan digunakan untuk pembayaran sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain kesepakatan perjanjian kontribusi dalam 2 (dua) tahap yaitu secara jangka pendek dan secara jangka panjang, dan/atau perubahan *availability period* melalui adendum perjanjian sindikasi.
- c. Penyelesaian isu keausan roda sarana sebagai dampak dari desain lengkungan rel LRT Jabodebek baik dengan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Perlu dilakukan kajian untuk mengidentifikasi solusi jangka panjang isu ini.
- d. Perlu dilakukan pemantauan dan percepatan *delivery trainset* ke-20 dari PT Industri Kereta Api (Persero).

H. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Progres pembangunan Proyek KCJB dilanjutkan pada tahun 2023 untuk mewujudkan beroperasinya kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan maksimal 350 km/jam, yang melayani trase sepanjang 142,3 km menghubungkan Jakarta dan Bandung. Proyek ini dibangun melalui sinergi bilateral Indonesia dan Tiongkok melalui Konsorsium BUMN Indonesia (dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Konsorsium badan usaha Tiongkok, dengan struktur proyek sebagai berikut:



Nilai investasi Proyek KCJB sebesar USD7,28 Miliar yang dipenuhi dengan komposisi 25% ekuitas dan 75% pinjaman perbankan. Pemenuhan ekuitas porsi Konsorsium BUMN Indonesia bersumber dari tambahan (i) Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) TA 2021 senilai Rp4,3 Triliun untuk memenuhi *base equity*, dan (ii) PMN TA 2022 senilai Rp3,2 Triliun untuk pemenuhan *cost overrun* porsi ekuitas Konsorsium BUMN Indonesia.

Progres fisik Proyek KCJB sampai akhir tahun 2023 mencapai 100%, dan telah memulai operasi secara komersial (*commercial operation*) dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2023. Lebih lanjut, masih diperlukan penyempurnaan dalam pembangunan aksesibilitas/konektivitas stasiun KCJB pada Stasiun Karawang karena kendala proses pembebasan lahan dan belum jelasnya mekanisme penugasan kepada PT Jasa Marga (Persero) yang berkontribusi membangun jalan akses dimaksud.

Beberapa isu strategis terkait Proyek KCJB yang menjadi concern Kementerian BUMN/Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik, antara lain:

- a. Pengadaan lahan dan pembangunan aksesibilitas/konektivitas stasiun;
- b. Percepatan pembangunan stasiun dan depo;
- c. Frequency clearing dalam penyelesaian persinyalan GSM-R;
- d. Pendanaan cost overrun melalui pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari China Development Bank yang memperoleh penjaminan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan akan diteruskan melalui shareholder's loan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia serta akan diteruskan lebih lanjut kepada PT Kereta Cepat Indonesia China.
- e. Pemenuhan cash deficiency support oleh Konsorsium BUMN Indonesia untuk mendukung operasional KCJB mengingat Proyek KCJB masih akan mengalami kerugian pada tahun-tahun awal pengoperasiannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan cash deficiency support tersebut, dilakukan berbagai upaya penguatan kapasitas keuangan kepada Pimpinan Konsorsium BUMN (dih. PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupa kenaikan tarif angkutan batubara dan dividen bagian pemerintah yang tidak ditarik sebagaimana Keputusan RUPS Audit Tahun Buku 2022 Hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti di tahun 2024 terkait dengan penyelesaian

Proyek KCJB, antara lain:

- a. Upaya perkuatan kapasitas keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka memastikan pemenuhan cash deficiency support operasional KCJB dan pembayaran debt service pinjaman cost overrun dari China Development Bank.
- b. Restrukturisasi pinjaman China Development Bank.
- c. Penyelesaian akses stasiun KCJB.
- d. Pembentukan sinking fund untuk penjaminan.
- e. Penyusunan Peraturan Pemerintah yang cukup mengatur mengenai keseluruhan aspek penyelenggaraan kereta cepat.

I. Proyek Bali Maritime Tourism hub (BMTH)

Pembangunan dan pengembangan kawasan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) bertujuan untuk memimpin hub pariwisata di kawasan Indonesia Timur. BMTH dikembangkan menggunakan konsep *green port* yang berfokus pada pelestarian alam bakau dan ruang hijau di sekitar Pelabuhan Benoa. Rencana bisnis BMTH berfokus pada pengembangan sektor pariwisata di 6 (enam) lini utama yaitu: lini bisnis cruise; lini bisnis

yacht; lini bisnis perikanan; lini bisnis logistic (LNG dan Petikemas); lini bisnis atraksi dan taman wisata; serta lini bisnis UMKM dan ritel.

Grand total nilai proyek Pengembangan Pelabuhan Benoa yaitu sebesar Rp6.066 Miliar dengan rincian pendanaan yang terdiri atas dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1.200 Miliar dan dana sendiri PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebesar Rp4.866 Miliar. Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Benoa dimulai pada Tahun 2020, dan direncanakan untuk dapat diselesaikan pada Tahun 2024.

Berdasarkan Masterplan Pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH) terdiri atas 10 paket pekerjaan yaitu (i) Pengembangan Gate dan Perluasan Terminal Penumpang Internasional, (ii) Pekerjaan Infrastruktur Dasar dan Fasum Penunjang Pariwisata, (iii) Pekerjaan Reventment & Retaning Wall Dumping I, (iv) Pekerjaan Reventment & Retaning Wall Dumping II, (v) Dermaga Cruise 160 m, (vi) Pengerukan Alur & Kolam Paket A, (vii) Pengerukan Alur & Kolam Paket B, (viii) Penyiapan Lahan Bali Tenten, (ix) Pembangunan Taman Seghara Kerthi, dan (x) Pembangunan Infrastruktur Dasar Dumping I.

Sampai dengan akhir tahun 2023, progres fisik proyek BTMH terealisasi sebesar 79,42%. Beberapa pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2023 diantaranya yaitu Pekerjaan Pengerukan Alur & Kolam yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Pekerjaan Infrastruktur Dasar Zona Dumping I.

Terdapat sebagian pelaksanaan pekerjaan dan rencana pengoperasian yang mengalami kendala karena aspek perizinan yang belum diterbitkan sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Perizinan yang Belum Terbit	Rencana Tindak Lanjut
1	Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa	AMDAL (Pengerukan Tahap 2) - [KLHK]	Dilakukan koordinasi dengan KLHK mengingat Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PK3) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan pengerukan terhadap sisa volume pekerjaan dapat berlaku efektif setelah dokumen izin lingkungan (AMDAL) telah terbit
2	Area Pengembangan I dan Area Pengembangan II	• Legalitas Lahan (HPL & HGB) oleh [Kementerian ATR/BPN] • Perjanjian Konsesi oleh [Kemenhub] • Izin Operasi – [Kemenhub] - Izin Usaha Penyimpanan LNG	• Legalitas Lahan dan Konsesi ditargetkan dapat diterbitkan pada Semester 1 Tahun 2024 - Izin Operasi dan Izin Usaha Penyimpanan LNG ditargetkan dapat diterbitkan pada Triwulan III Tahun 2024
3	Bali Tenten	Perizinan Lingkungan – [KLHK]	Perizinan Lingkungan ditargetkan dapat diterbitkan pada Tahun 2024

Dukungan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan penyelesaian Pengembangan BMTH antara lain:

- Area Pengembangan I: Dukungan terkait percepatan proses sertifikasi lahan di Kementerian ATR/BPN
- Area Pengembangan II:

- 1) Percepatan kontrak kerja sama dengan PLN Group terkait pemanfaatan Terminal LNG baru di Area Pengembangan II BMTH Pelabuhan Benoa.
 - 2) Rencana kerja sama atas tindak lanjut relokasi infrastruktur BBM dan Avtur dengan Pertamina Patra Niaga di Area Pengembangan II BMTH Pelabuhan Benoa.
 - 3) Kerjasama dengan Pertagas terkait pengembangan bisnis LNG di Area Pengembangan II BMTH Pelabuhan Benoa
- c. Penataan Zona Perikanan (PAI): Percepatan proses relokasi kapal-kapal nelayan dalam rangka rencana beautifikasi di area *Port Associated Industries* (PAI) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Benoa: *Review* RIP Pelabuhan Benoa terkait penyesuaian zonasi di dalam RIP, terutama di Area Pengembangan II BMTH Pelabuhan Benoa kepada Kementerian Perhubungan.

Rencana pengembangan BMTH pada fase selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Short Term (Oktober 2024)	Mid Term (2025)	Long Term (2026-2028)
Marina & Entertainment Zone – Fase I Beautifikasi Port Associated Industries (PAI) Fase I Penyiapan dan Pematangan Lahan Bali Tenten Penyiapan Fasilitas Oil & Gas	Marina & Entertainment Zone – Fase II Beautifikasi Port Associated Industries (PAI) Fase II Pembangunan Int. Univ, Retail Store, Food Market Pengoperasian Fasilitas Curah Cair dan Oil & Gass	Marina & Entertainment Zone – Fase III Pembangunan Terminal Cruise Pembangunan Fasilitas Logistik

J. Proyek Bakauheni Harbour City (BHC)

Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 (Revisi Permenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021), dengan tujuan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung dan sekitarnya. Kawasan Bakauheni Harbour City direncanakan menjadi kawasan pariwisata tepi laut/*waterfront city* terbesar dan berkelas dunia yang berada di Sumatera. Pengembangan kawasan Bakauheni Harbour City akan mengubah kawasan pelabuhan yang tadinya berfungsi sebagai Kota Transit menjadi Kota Tujuan.

Dalam persiapannya menuju Kota Pelabuhan sebagai Kota Tujuan, perlu tahapan pembangunan yang mendukung tematik Bakauheni Harbour City (BHC), baik kegiatan perencanaan maupun implementasi pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan terintergrasi. Studi yang sudah dilakukan yaitu perencanaan *Masterplan* Kawasan Bakauheni Harbour City yang mendeskripsikan kawasan BHC terdiri dari 3 distrik pengembangan dengan tema pengembangan yaitu *mixed use development* dengan luas total 159,8 Ha. Berikut Masterplan Bakauheni Harbour City.



Pemantauan Progres Pekerjaan *Project* Bakauheni Harbour City dimulai pada tahun 2022 terdiri dari pekerjaan perencanaan, pembangunan fisik, penyusunan kajian serta penyusunan kerjasama yang mana masih berlangsung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, adapun progres yang telah tercapai 100% sampai dengan tahun 2023 yaitu Masjid BSI, Menara Siger BRI, selasa siger BTN, siger market Mandiri, creative HUB BNI, area parkir Krakatau park dan siger park, Power house Siger Park dan Krakatau Park, Krakatau Park, dan jalan akses distrik 1 tahap 1, sedangkan yang sedang progres pembangunan yaitu *amphiteatre* siger, skywalk Terminal Eksekutif Bakauheni ke Krakatau Park dan jalan akses distrik 1 tahap 2.

Rencana pengembangan Kawasan Bakauheni Harbour City terdiri dari beberapa tahap pengembangan, diantaranya adalah Tahap 1A di tahun 2022 hingga 2025, Tahap

1B tahun 2026 hingga 2030, Tahap 2 pada tahun 2031 hingga 2040 serta Tahap 3 berada di tahun 2041 hingga 2051. Disetiap tahap pengembangan memiliki fokus utama sebagai berikut:

1. Tahap 1 (2022 – 2030)

Pembangunan infrastruktur dan atraksi wisata utama Pembangunan diprioritaskan di Distrik 1 dengan fungsi utama pendukung aktivitas pelabuhan, yaitu pembangunan theme park, hotel, kantor pengelola, komersial, pendidikan, UMKM, serta poliklinik pariwisata. Selain itu juga pembangunan difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan menjadikan Distrik 1 sebagai Kawasan

2. Tahap 2 (2031 – 2040)

Peningkatan pelayanan Bakauheni Harbour City sebagai kawasan mandiri Pembangunan dilaksanakan di Distrik 2 dan 3 untuk memperluas pelayanan Bakauheni Harbour City sebagai kawasan kota pelabuhan terintegrasi. Pembangunan atraksi wisata sebagai daya tarik bagi kegiatan lainnya dilaksanakan secara bertahap, serta terdapat pembangunan perumahan karena Bakauheni Harbour City telah menjadi kawasan mandiri yang menarik penduduk untuk bermukim. Pembangunan hotel dan komersial juga disesuaikan dengan operasional atraksi wisata dan perumahan yang telah terbangun.

3. Tahap 3 (2041 -2051)

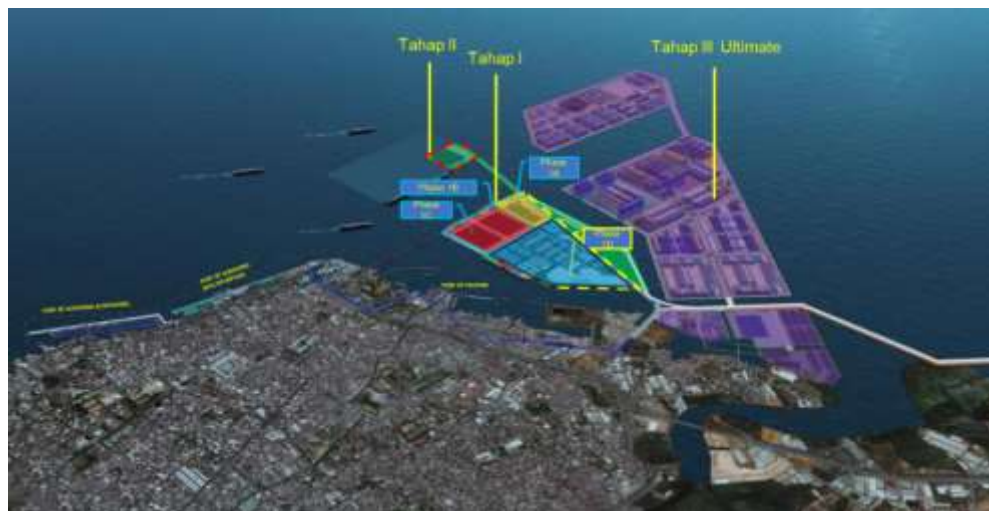
Keberlanjutan dan diversifikasi pembangunan Tahap 3 pembangunan Bakauheni Harbour City berfokus untuk memberikan keberagaman dari pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu opsi hotel, condotel/vilatel dan atraksi wisata. Kemudian pembangunan terakhir yang beroperasi adalah hotel bintang 5 yang akan direncanakan beroperasi pada tahun 2047.

K. Proyek Makassar *New Port* (MNP)

Pengembangan Makassar *New Port* (MNP) diperuntukkan sebagai solusi pengembangan dari keterbatasan Terminal Petikemas (TPK) Makassar eksisting yang memiliki keterbatasan diantaranya yaitu kapasitas petikemas, Back-up area dan kedalaman kolam yang terbatas, dan Aksesibilitas yang menggunakan jalan kota. MNP merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka mendorong laju perekonomian di wilayah timur Indonesia, Meningkatkan efisiensi biaya angkutan laut, dan Mendukung jaringan transportasi kapal dari barat ke timur dengan spesifikasi kapal besar.

Keberadaan MNP ditujukan sebagai hub domestik dan internasional hub di wilayah Indonesia timur. MNP memiliki aksesibilitas yang baik yang akan menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri melalui jalan utama yang memadai, jalan tol, dan multi moda transportation melalui kereta api.

Proses pembangunan MNP dimulai sejak tahun 2015 yang diawali *Ground Breaking* oleh Presiden Republik Indonesia. Pembangunan MNP terdiri atas beberapa tahapan. MNP Tahap 1A telah diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Pengembangan MNP dilanjutkan oleh pembangunan MNP Tahap 1B dan 1C sejak tahun 2019 hingga tahun 2023



Pada tahun 2023, progres fisik pembangunan MNP Tahap 1B dan 1C telah diselesaikan 100% yang meliputi pekerjaan pada area kolam putar & alur, area port/dermaga, area container yard, area disposal, dan masjid. Selanjutnya MNP Tahap 1B dan 1C direncanakan untuk diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Februari tahun 2024.

Pengembangan MNP yang telah dilaksanakan merupakan fase pertama dari tiga fase yang direncanakan. Fase *Ultimate MNP Integrated Zone* akan mencakup pembangunan Kawasan Industri guna mendukung Pelindo sebagai *Traffic Stimulator* dengan menghubungkan Pelabuhan dan Kawasan Industri

Uraian	Uraian Tahap I			Tahap II	Tahap III
	Phase 1A	Phase (1B+1C)	Phase 1D		
Tahapan	2015 - 2019	2019 - 2023	2023 - 2027	2028 - 2037	2023 - 2037
Container Teus/Tahun	500.000	2.000.000	-	485.000	Ultimate Kawasan industri
Multipurpose Ton/Tahun	-	-	3.300.000	-	
Panjang Dermaga (M')	320	1.280	310	600	
Kedalaman (M)	- 16,0	- 16,0	- 16,0	- 16,0	
CY (Ha)	52		74	10	

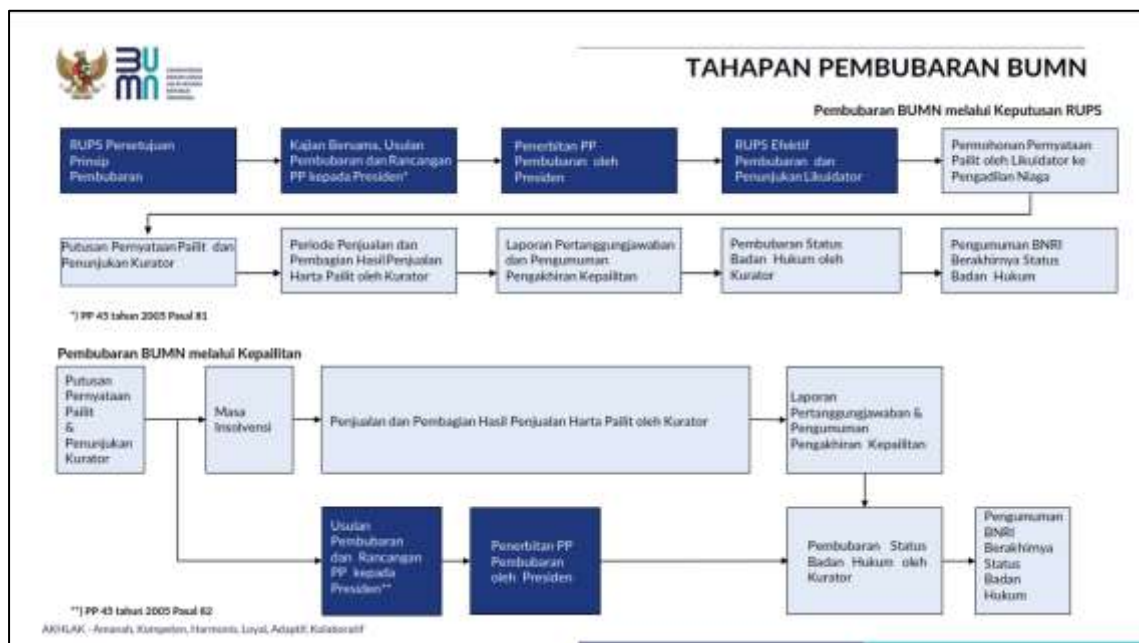
L. Pembubaran BUMN

Pembubaran BUMN merupakan langkah strategis yang dilakukan sesuai dengan Arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Internal Pembentukan *Holding* Danareksa – PPA pada tanggal 8 maret 2021 dan Rapat Koordinasi Kementerian BUMN pada tanggal 14 Oktober 2021. Presiden menyampaikan bahwa BUMN yang mengalami kinerja operasional dan keuangan yang buruk untuk segera dilakukan penutupan. Selanjutnya, PPA selaku pemegang Surat Kuasa Khusus dari Menteri BUMN melakukan kajian terkait rencana pembubaran 7 BUMN (PT Industri Sangan Nusantara (Persero) / “PT ISN”, PT Industri Gelas (Persero) / “PT IGLAS”, PT Kertas Kraft Aceh (Persero) / “PT KKA”, PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) / “PT MNA”, PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) / “PT PANN”). Ke-7 (tujuh) BUMN tersebut akan dibubarkan, karena berdasarkan kriteria dan kajian yang telah dilakukan oleh PPA, dari aspek prospek usaha, kemampuan perusahaan, kinerja keuangan, persepsi pasar, dan keunggulan komparatif, BUMN tersebut tidak bisa lagi dipertahankan.

Dalam proses pembubaran BUMN, tahapan pembubarannya untuk ke-7 BUMN tidak semuanya sama. Terdapat 6 kategorisasi BUMN dapat dibubarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 142 ayat (1), yang menyatakan:

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini merupakan tahapan pembubaran BUMN:



Hingga pada akhir tahun 2023, telah terbit 6 PP Pembubaran, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas.

Untuk progress Pembubaran PT PANN (Persero) sampai dengan akhir tahun 2023 telah sampai pada tahap rapat harmonisasi pembubaran yang dilaksanakan tanggal 28 November 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media menargetkan penerbitan PP Pembubaran PT PANN (Persero).



M. Penugasan Peruri dalam Pengembangan Aplikasi SPBE (Sistem pemerintah Berbasis Elektronik)

Menunjuk pada Arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi pada 12 Juni 2023 tentang birokrasi yang berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, tetapi birokrasi harus lincah dan cepat. Dengan demikian dibutuhkan

digitalisasi berbasis arsitektur untuk menjadi pilar bagi program reformasi birokrasi tematik yang berdampak luas bagi masyarakat.

Kondisi saat ini, Pemerintah Republik Indonesia sedang melakukan penyusunan rancangan Perpres Penugasan Perum Peruri sebagai Penyelenggara Aplikasi SPBE sebagaimana Surat Menteri PanRB Nomor: B/424/M.KT.03/2023 yang mencakup perancangan solusi tepat guna, perencanaan, pendanaan, Pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, pengakhiran, keamanan, dan pengelolaan infrastruktur pendukung. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan pengesahan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital untuk Mencapai Keterpaduan Layanan Digital Nasional dan Penugasan kepada Perum Peruri sebagai Penyelenggara Aplikasi SPBE.

Dalam rangka mewujudkan Penugasan Khusus Perum Peruri sebagai Penyelenggara Aplikasi SPBE agar dapat terimplementasi sesuai dengan tata Kelola Perusahaan yang baik dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka diperlukan perencanaan dan dukungan optimal baik dari Pemerintah, Kementerian, Lembaga serta seluruh *stakeholder* yang terlibat.

Untuk memastikan pemenuhan penugasan Perum Peruri sebagai penyelenggara SPBE, maka dibuatlah milestone pelaksanaan penugasan SPBE, yang secara umum tersaji sebagai berikut:

1. Mempersiapkan segala kebutuhan dalam memastikan pelaksanaan penugasan SPBE terlaksana (infrastruktur, sistem, SDM, organisasi, finansial, dan aspek lainnya yang dibutuhkan);
2. Menyediakan Layanan Digital Nasional (*GovTech*) yang inklusif berbasis *citizen centric*, berbasis *outcome*;
3. Memastikan layanan yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam penyelenggaraan SPBE;
4. Sinkronisasi *Roadmap* dan pengelolaan teknologi informasi perusahaan dengan kebutuhan bisnis;
5. Monitoring, evaluasi, serta memastikan pelaksanaan penugasan SPBE terlaksana sesuai dengan output yang diharapkan.

Hingga akhir tahun 2023, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional tanggal 18 Desember 2023. Dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, diharapkan ini akan mewujudkan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional Pemerintahan Indonesia melalui penugasan kepada Peruri untuk penyelenggaraan Aplikasi Prioritas di-9 K/L antara lain sebagai berikut:

Adapun inti dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tersebut adalah agar Peruri dapat mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas di 9 K/L, Pendalaman kebutuhan pengguna SPBE, dan Perancangan Solusi Tepat Guna (STG) yang direncanakan agar penyusunan perjanjian kerjasama STG pertama kali dilakukan dengan Kemenpan-RB sebagai pilot project untuk perjanjian kerjasama di K/L lainnya.



N. Penugasan Pembangunan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan jaringan jalan tol sepanjang 2.749 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di pulau Sumatra, dari Lampung hingga Aceh. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 j.o. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2015 j.o. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022, Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang terdiri dari 4 tahap dengan rincian sebagai berikut:

No	Ruas
Tahap I	
1	Ruas Jalan Tol Medan – Binjai
2	Ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar

No	Ruas
3	Ruas Jalan Tol Palembang – Indralaya
4	Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang
5	Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung
6	Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Dumai
7a	Ruas Jalan Tol Sigli – Banda Aceh (Seksi 2-4)
7b	Ruas Jalan Tol Sigli – Banda Aceh
8	Ruas Jalan Tol Kisaran – Indrapura
9a	Ruas Jalan Tol Kuala Tanjung – Pematang Siantar
10a	Ruas Jalan Tol Simpang Indralaya – Prabumulih
11a	Ruas Jalan Tol Sicincin – Padang
11b	Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang (STA9+000 – STA 40+000)
11c	Ruas Jalan Tol Bangkinang – Kolo Kampar
12a	Ruas Jalan Tol Taba Penanjung – Bengkulu
13a	Ruas Jalan Tol Binjai – Pangkalan Brandan (Seksi 1)
13b	Ruas Jalan Tol Binjai – Pangkalan Brandan
Tahap II	
14	Ruas Jalan Tol Betung – Tampino – Jambi
15	Ruas Jalan Tol Jambi – Rengat
16a	Junction Pekanbaru – Bypass Pekanbaru
16b	Ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
17	Ruas Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Lematang
Tahap III	
13c	Ruas Jalan Tol Pangkalan Brandan – Langsa
18	Ruas Jalan Tol Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat
19	Ruas Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran
20	Ruas Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe
21	Ruas Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli
Tahap IV	
9b	Ruas Jalan Tol Pematang Siantar – Parapat
10b	Ruas Jalan Tol Prabumulih – Muara Enim
11d	Ruas Jalan Tol Payakumbuh – Sicincin
11e	Ruas Jalan Tol Pangkalan – Payakumbuh
11f	Ruas Jalan Tol Kolo Kampar – Pangkalan
12b	Ruas Jalan Tol Lubuk Linggau – Taba Penanjung
22	Ruas Jalan Tol Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
23	Ruas Jalan Tol Prapat – Tarutung – Sibolga
24	Ruas Jalan Tol Batu Ampar – M Kuning – Hang Nadim

Rincian panjang dan nilai investasi masing-masing ruas tol digambarkan sebagai berikut:

NO	RUAS	PANJANG (KM)	NILAI INVESTASI (Rp M)
Tahap I			
I.A. Ruas Operasi			
1	Medan-Binjai	17	3.214
2	Bakauheni-Terbangi Besar	140	15.905
3	Palembang-Indralaya	22	3.397
4	Tb Besar - Pematang Panggang		
5	Pematang Panggang - Ky Agung ⁽¹⁾	189	22.386
6	Pekanbaru - Dumai	131	20.173
7a	Sigli - Banda Aceh (Seksi 2-4)	36	5.797
13a	Binjai - Pangkalan Brandan (Seksi 1)	12	2.050
11b	Pekanbaru-Bangkinang (STA 9+000 - STA 40+000)	31	4.621
12a	Taba Penanjung - Bengkulu	18	4.302
Sub Total		596	81.648
I.B. Ruas Konstruksi			
7b	Sigli - Banda Aceh	36	6.218
8	Kisaran - Indrapura	48	8.076
9a	Kuala Tanjung - Pematang Santar	93	13.528
10a	Sp Indralaya - Prabumulih	65	14.057
11a	Sicinin - Padang	37	7.716
11b	Pekanbaru-Bangkinang (STA 0+000 - STA 9+000)	9	1.342
11c	Bangkinang - Koto Kampar	25	3.682
13b	Binjai - Pangkalan Brandan	46	7.991
Sub Total		361	68.610
Total Tahap I		957	142.458
Tahap II			
II. Ruas Rencana PPJT			
14	Betung - Tempeno - Jambi ⁽¹⁾	169	30.278
15	Jambi - Rengat	198	37.242
16a	Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru	31	7.909
16b	Rengat - Pekanbaru	177	32.905
17	Pelabuhan Panjang - Lematang	8	2.573
Sub Total		582	110.907
Tahap III			
III. Ruas Backbone Lanjutan			
18	Dumai - Sp Sigambal - Rantau Prapat	181	38.766
19	Rantau Prapat - Kisaran	112	22.512
20	Langsa - Lhokseumawe	134	30.190
21	Lhokseumawe - Sigli	157	35.141
13c	Pangkalan Brandan - Langsa	74	14.570
Sub Total		657	141.179
Tahap IV			
IV.A. Ruas Feeder sudah PPJT			
22	Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	112	23.790
9b	Pematang Santar - Parapat ⁽¹⁾	50	7.744
10b	Prabumulih - Muara Enim	56	11.189
11d	Payakumbuh - Sicinin	73	29.358
11e	Pangkalan - Payakumbuh	46	23.624
11f	Koto Kampar - Pangkalan	14	5.480
12b	Lubuk Linggau - Taba Penanjung	80	33.672
Sub Total		431	134.836
IV.B. Ruas Feeder belum PPJT			
23	Prapat - Tarutung - Sibolga	102	24.333
24	Satu Ampar - M Kuning - Hang Nadim	20	4.916
Sub Total		122	29.249
Total		2.749	368.629



Sampai saat ini, ruas tol yang telah selesai terbangun dan beroperasi sepanjang 596 km yang meliputi ruas Medan – Binjai, ruas Bakauheni – Terbanggi Besar, ruas Palembang – Indralaya, ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung, ruas Pekanbaru – Dumai, ruas Sigli – Banda Aceh (Seksi 2 - 4), ruas Binjai – Pangkalan Brandan (Seksi 1), ruas Pekanbaru – Bangkinang (STA 9+000 – STA 40+000), dan ruas Taba Penanjung – Bengkulu.



Berdasarkan kajian keuangan dan estimasi awal, nilai investasi untuk 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera, di luar biaya pengadaan tanah, adalah sebesar Rp559 Triliun. Pendanaan atas pembangunan JTTS didukung oleh Pemerintah dengan pemberian dana PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) dan JTTS Tahap I ditargetkan selesai pada tahun 2023.

Guna mendukung penyelesaian proyek JTTS tersebut, Pemerintah telah memberikan dana PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) dengan total Rp83.658 Miliar dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Selain itu, direncanakan PT Hutama Karya (Persero) akan menerima dana PMN sebesar Rp28.884 Miliar pada tahun 2023 dan sebesar Rp10.000 Miliar pada tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Wakil Menteri BUMN-R Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Wakil Menteri BUMN-R yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-04/MBU/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN-R tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja secara umum dapat dikategorikan Sangat Memuaskan dengan skor NKO sebesar 108,65, yang tercermin dalam tingkat capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran program. Dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator kinerja utama/"IKU", terdapat 14 (empat belas) IKU yang mencapai target dan 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target, sedangkan 1 (satu) IKU lain yaitu nilai *self-assesment* RB belum dapat diukur realisasinya. Adapun IKU yang tidak mencapai target yaitu Pencapaian Target Progres Fisik Proyek Strategis Nasional dan selanjutnya telah masuk ke dalam prioritas untuk dapat segera diselesaikan pada tahun 2024.
3. Tahun 2023 kondisi perekonomian semakin membaik paska dicabutnya status pandemi covid-19, hal ini tercermin pada kinerja perusahaan yang kian cemerlang terlihat utamanya pada peningkatan capaian *Net Profit*, *Return on Equity* (ROE) dan *EBITDA Margin* pada BUMN di bawah binaan Wakil Menteri BUMN-R dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. LKIP ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban Wakil Menteri BUMN-R untuk menyajikan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari lembaga negara maupun lembaga publik. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan perbaikan dan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan perubahan berkesinambungan yang lebih baik di masa mendatang.
5. Disusunnya LKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan transparan baik kepada Pimpinan maupun seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Wakil Menteri BUMN-R, sehingga dapat memberikan umpan baik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS

WAKIL MENTERI BUMN-R

1. Lampiran Perjanjian Kinerja Wakil Menteri BUMN-R



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WAKIL MENTERI BUMN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosan Perkasa Roeslani

Jabatan : Wakil Menteri BUMN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Erick Thohir

Jabatan : Menteri BUMN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 September 2023

Pihak Kedua,
Menteri BUMN

Erick Thohir

Pihak Pertama,
Wakil Menteri BUMN

Rosan Perkasa Roeslani
NIP. Wamen-R

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Wakil Menteri BUMN
Tahun Anggaran : 2023

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2023
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				
1	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN Sektor Jasa untuk Pemegang Saham	Net Profit	Rp Triliun	130,17
		EBITDA Margin	%	36,90
		Return on Equity	%	10,77
2	Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	Jumlah Nasabah	15.011.876
3	Meningkatnya Daya Saing BUMN Sektor Jasa	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah Negara	21
Prioritas II Inovasi Model Bisnis				
4	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa yang Kuat	Jumlah Program Restrukturisasi BUMN	Jumlah Program	4
5	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis terintegrasi	Jumlah BUMN	5
6	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Wakil Menteri BUMN Sektor Jasa	Persentase Realisasi Anggaran	%	97
		Nilai Self-Assessment SAKIP	Skor	80,19
		Nilai Self-Assessment RB	Skor	87,16
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi				
7	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi	Jumlah BUMN	6
Prioritas IV Peningkatan Investasi				
8	Kontribusi BUMN Sektor Jasa sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi Capex	%	60
		Pencapaian Target Progres Fisik Proyek Strategis Nasional	%	79
9	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa	Rata-rata Penggunaan TKDN	%	64,15
Prioritas V Pengembangan Talenta				
10	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Jasa	% Top talent muda (< 42 tahun) dalam Nominated Talent	%	18
		% Perempuan dalam Nominated Talent	%	18

Program

Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan BUMN

Anggaran

Rp7.200.000.000,-

Pihak Kedua,
Menteri BUMN

Erick Thohir

Jakarta, 29 September 2023
Pihak Pertama,
Wakil Menteri BUMN

Rosan Perkasa Roeslani
NIP. Wamen-R

2. Lampiran Renaksi & trajectory target Wakil Menteri BUMN-R



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TRAJECTORY TARGET PERJALANAN KINERJA WAKIL MENTERI BUMN

No.	Pencapaian/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Trajectory Target				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia									
1	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Nilai BUMN Sektor Jasa Untuk Pemegang Saham	Net Profit	Rp Triliun	130,17	34,19	72,89	97,80	130,17	Mendukung pencapaian net profit EBITDA, margin, ROE, dan kontribusi bagi dan PMPF serta kinerja keuangan lainnya: revenue stream, meningkatkan efisiensi biaya serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Perusahaan secara berkala.
		EBITDA Margin	%	35,86	39,25	39,36	37,10	35,36	
		Return on Equity	%	10,77	1,88	5,35	6,78	11,77	
2	Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa dalam Peningkatan Ekonomi Nasional	Jumlah Nasabah Aktif Meluar	Jumlah Nasabah	15.011.875	13.074.218	14.128.190	14.271.404	15.011.875	Mendukung penyusunan kredit kepada nasabah PVM Meluar dengan nilai yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan serta mendukung dengan implementasi manajemen risiko yang matang.
3	Meningkatnya Daya Saing BUMN Sektor Jasa	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah Negara	21	-	-	-	21	Mendukung pengembangan usaha BUMN di pasar internasional melalui ekspor hasil produksinya.
Prioritas II Inovasi Model Bisnis									
4	Tercapainya Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa yang Kuat	Jumlah Program Restrukturisasi BUMN	Jumlah Program	4	-	-	-	4	Mendukung penyelesaian program restrukturisasi BUMN, salah satunya melalui pembentukan holding BUMN.
5	Tercapainya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis terintegrasi	Jumlah BUMN	5	-	-	-	5	Mendukung pemetaan model bisnis terintegrasi dan mengidentifikasi strategi BUMN.

AKSI-LARI - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No.	Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Trajectory Target				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
6	Meningkatnya Kualitas Reformasi Struktur di Unit Bisnis Menteri BUMN Sektor Jasa	Persentase Realisasi Anggaran	%	97	75	81	91	97	Memantau dan memastikan tercapainya realisasi anggaran.
		Mid-Def-Assessment SAGP	Skor	80,19	-	-	-	80,19	Mengimplementasikan kebijakan strategis secara tepat dan sesuai dengan RENCANA 5 yang telah ditetapkan.
		Mid-Def-Assessment TB	Skor	87,58	-	-	-	87,58	Mengimplementasikan program reformasi struktural yang telah ditetapkan secara tepat dan sesuai dengan RENCANA 5 yang telah ditetapkan.
Prioritas III Pengembangan Teknologi									
7	Tercapainya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi	Jumlah BUMN	9	-	-	-	9	Memantau pencapaian serta memastikan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program digitalisasi BUMN.
Prioritas IV Peningkatan Investasi									
8	Kontribusi BUMN Sektor Jasa sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi Capex	%	80	70	72	87	80	Memantau pencapaian realisasi capex sesuai target. 1. Memantau program investasi modal perusahaan secara berkala. 2. Memastikan dukungan kontribusi signifikan dengan pelaksanaan target.
		Persentase Target Program Peta Prioritas Strategis Nasional	%	75	97	85	70	75	Memantau pencapaian target program dari program strategis nasional secara berkala. 1. Memantau program dari program strategis nasional secara berkala.

AKSI-LARI - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA									
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia Telp. 021-29536478 Fax 021-29954765 www.bumng.go.id									
No	Prioritas/Strategis	Indikator Kinerja	Bobot	Target 2023	Pencapaian Target				Perincian Akhir
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
8	Meningkatkan Pengawasan Korporasi (dalam negeri) dan BUMN Sektor Jasa	Persentase Pengawasan TKDN	%	88,30	-	-	-	88,30	0. Mendukung kontribusi signifikan dengan stakeholder terkait. Monitoring dan evaluasi realisasi pencapaian Target Komponen Dalam Negeri (TKDN) BUMN Sektor Jasa dalam pengadaan barang/jasa.
Prioritas V Pengembangan Talenta									
8	Terwujudnya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Dalam BUMN Sektor Jasa	% Top talent muda (< 42 tahun) dalam Nominated Talent	%	18	-	-	-	18	Meningkatkan pemerataan peluang karier dalam organisasi BUMN Sektor Jasa.
		% Perempuan dalam Nominated Talent	%	18	-	-	-	18	Meningkatkan pemerataan peluang karier dalam organisasi BUMN Sektor Jasa.

Jakarta, 25 September 2023

Wakil Menteri BUMN,

Rosari Partono Rosari,
NIP. 70000000

APOLAK - Jember, Korpri, Harimau, Loyal, Adaptif, Kolaborasi

3. Lampiran Capaian Kinerja Tahun 2023 Wakil Menteri BUMN-R

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) WAKIL MENTERI BUMN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Bobot	Target	Realisasi	Capaian 2023*	Indeks Capaian 2023	Nilai Kinerja Organisasi	
				Tahunan	Tw IV				
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia									
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan <i>value</i> BUMN Sektor Jasa untuk pemegang saham	<i>Net Profit</i>	8	130,17	181,87	120%	10	108,65	
		<i>EBITDA Margin</i>	8	35,90%	38,20%	106%	9		
		<i>Return on Equity</i>	8	10,77%	12,75%	118%	9		
2	Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	6	15.011.876	15.065.006	100%	6		
3	Meningkatnya daya saing BUMN Sektor Jasa	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	4	21	28	120%	5		
Prioritas II Inovasi Model Bisnis									
4	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa yang Kuat	Jumlah Program Restrukturisasi BUMN	6	4	4	100%	6		
5	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis terintegrasi	6	5	5	100%	6		
		Persentase Realisasi Anggaran	8	97%	100%	103%	8		
6	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Wakil Menteri BUMN II	Nilai <i>Self-Assesment</i> SAKIP	4	80,19	80,19	100%	4		
		Nilai <i>Self-Assesment</i> RB	4	97,16	-	n.a	n.a		
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi									
7	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi	6	6	6	100%	6		
Prioritas IV Peningkatan Investasi									
8	Kontribusi BUMN Sektor Jasa sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi Capex	4	60%	64%	106%	4		
		Pencapaian Target Progres Fisik Proyek Strategis Nasional	6	78%	69%	88%	5		
9	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa	Rata-rata Penggunaan TKDN	6	64,15%	73,96%	115%	7		
Prioritas V Pengembangan Talenta									
10	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta muda di Direksi BUMN Sektor Jasa	% Top talent muda ($\leq$ 42 tahun) dalam Nominated Talent	8	18%	27%	120%	10		
		% Perempuan dalam Nominated Talent	8	18%	23%	120%	10		
Total Nilai Akhir								108,65	
Kriteria Pencapaian NKO								Sangat Memuaskan	

*) maksimal 120 sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-217/MBU/10/2017

4. Indikator Capaian Kinerja

a. Net Profit

(Rp Miliar)

No	BUMN	Realisasi Net Profit 2023
		s.d TW IV
	Asdep Bidang Jasa Logistik	
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	3.910,7
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	498,6
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	200,4
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.993,1
5	PT Pos Indonesia (Persero)	703,1
6	PT Industri Kereta Api (Persero)	81,97
7	Perum Damri	28,5
8	Perum PPD	
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Logistik	7.416,3
	Asdep Bidang Jasa Infrastruktur	
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	202
2	PT Hutama Karya (Persero)	1.668
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	336
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	175
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-4.017
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-7.572
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	6.846
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.289,44
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	
10	Perum Perumnas	-157,93
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Infrastruktur	-230,49
	Asdep Bidang Industri Manufaktur	
1	PT Len Industri (Persero)	687,09
2	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	784,01
	TOTAL Asdep Bidang Industri Manufaktur	1.471,10
	Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	
1	PT Taspen (Persero)	1.330,78
2	PT Asabri (Persero)	419,11
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	50,02
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	2.636,90
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	4.436,82

No	BUMN	Realisasi Net Profit 2023
		s.d TW IV
	Asdep Bidang Jasa Keuangan	
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60.425
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.060
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.106
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.501,00
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan	140.092,06
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	
1	Perum Jasa Tirta I	64,7
2	Perum Jasa Tirta II	137,43
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	23,78
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	-41,73
5	Perum Produksi Film Negara	0,22
6	PT Danareksa (Persero)	1.142
7	Perum Peruri	423,14
8	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	26.939
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	28.688,77
	Total	181.874,59

b. EBITDA Margin

No	BUMN	Realisasi EBITDA 2023	Realisasi Revenue 2023	EBITDA Margin
		s.d TW IV	s.d TW IV	s.d TW IV
	Asdep Bidang Jasa Logistik			
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	11.129	30.886,98	36%
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1.117,4	4.920,4	23%
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	754,14	5.775,75	13%
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4.994,27	27.388,49	18%
5	PT Pos Indonesia (Persero)	1.178,47	5.361,44	22%
6	PT Industri Kereta Api (Persero)	514,17	2.884,56	18%
7	Perum DAMRI	206	1.472,74	14%
8	Perum PPD			
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Logistik	19.893,45	78.690,36	25%
	Asdep Bidang Jasa Infrastruktur			
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	546	8.145	7%
2	PT Hutama Karya (Persero)	4.270	27.787	15%

No	BUMN	Realisasi EBITDA 2023	Realisasi Revenue 2023	EBITDA Margin
		s.d TW IV	s.d TW IV	s.d TW IV
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.863	20.079	9%
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.069	18.534	17%
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.392	10.854	22%
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	724	22.532	3%
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	9.910	21.319	46%
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	7.913,96	38.652	20%
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk			
10	Perum Perumnas	201,00	1.361,00	15%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Infrastruktur		30.888,96	169.263,00	18%
Asdep Bidang Industri Manufaktur				
1	PT Len Industri (Persero)	2.768	25.235	11%
2	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.198	5.912	20%
TOTAL Asdep Bidang Industri Manufaktur		3.965,87	31.146,41	13%
Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun				
1	PT Taspen (Persero)	1.850,95	22.197,43	8,34%
2	PT Asabri (Persero)	522,72	7.424,21	7,04%
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)			
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	100,94	6.451,15	1,56%
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	3.579,86	10.947,62	32,70%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun		6.054,46	47.020,41	13%
Asdep Bidang Jasa Keuangan (BANK = PPOP)				
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	106.508	233.701	46%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	84.964	138.766	61%
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	34.970	82.944	42%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8.235	32.194	26%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		234.677	487.605,00	48%
Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media				
1	Perum Jasa Tirta I	128,64	584,74	22,00%
2	Perum Jasa Tirta II	265,46	1.081,73	24,54%
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	49,43	447,02	11,06%
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	4,99	188,09	2,65%

No	BUMN	Realisasi EBITDA 2023	Realisasi Revenue 2023	EBITDA Margin
		s.d TW IV	s.d TW IV	s.d TW IV
5	Perum Produksi Film Negara	0,49	22,85	2,14%
6	PT Danareksa (Persero)	2.748	11.628	23,63%
7	Perum Peruri	1005	4.264	23,57%
8	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	79.760	161.395	49,42%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media		83.962,27	179.611,91	46,75%
	Total	379.442,02	993.337,09	38,20%

c. Return on Equity

No	BUMN	Realisasi Net Profit 2023	Realisasi Equity 2023	ROE
		s.d TW IV	s.d TW IV	s.d TW IV
	Asdep Bidang Jasa Logistik			
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	3.910,7	45.777,77	9%
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	498,6	8.255,19	6%
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	200,4	6.823,33	3%
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.993,1	31.784,07	6%
5	PT Pos Indonesia (Persero)	703,1	8.200,53	9%
7	PT Industri Kereta Api (Persero)	81,97	239,94	34%
8	Perum DAMRI	28,5	1.224,81	2%
9	Perum PPD			
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Logistik	7.416,3	102.305,63	7,25%
	Asdep Bidang Jasa Infrastruktur			
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	202	2.145	9%
2	PT Hutama Karya (Persero)	1.668	115.332	1%
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	336	9.256	4%
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	175	15.105	1%
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-4.017	11.696	-34%
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-7.572	9.914	-76%
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	6.846	39.078	18%
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.289,44	47.916	5%
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk			
10	Perum Perumnas	-157,93	1292	-12%
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Infrastruktur	-230,49	251.734	-0,09%
	Asdep Bidang Industri Manufaktur			

No	BUMN	Realisasi Net Profit 2023	Realisasi Equity 2023	ROE
		s.d TW IV	s.d TW IV	s.d TW IV
1	PT Len Industri (Persero)	687,09	14686,6	5%
2	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	784,01	6725,8	12%
TOTAL Asdep Bidang Industri Manufaktur		1.471,10	21.412,35	6,87%
	Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun			
1	PT Taspen (Persero)	1.330,78	13.150,18	10%
2	PT Asabri (Persero)			
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)			
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	50,02	2.654,94	2%
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	2.636,90	42.541,51	6%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun		4.017,71	58.346,62	6,89%
	Asdep Bidang Jasa Keuangan			
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60.425	316472	19%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.060	287495	19%
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.106	154.733	14%
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.501	25253	14%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		140.092	783.953	17,87%
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media			
1	Perum Jasa Tirta I	64,7	990,51	6,53%
2	Perum Jasa Tirta II	137,43	1.515,80	9,07%
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	23,78	247,46	9,61%
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	-41,73	76,62	-54,46%
5	Perum Produksi Film Negara	0,22	2,48	8,87%
6	PT Danareksa (Persero)	1142,23	40.130	2,85%
7	Perum Peruri	423,14	4.191	10,10%
8	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	26939	158.388	17,01%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media		28.688,77	205.541,707	13,96%
Total		181.455,47	1.423.293,32	9%

d. Nasabah Mekaar

No	Nama Program Restrukturisasi/Holding	Target Ketercapaian 2023	Realisasi Ketercapaian 2023
		TW IV	s.d. TW IV
	Asdep Bidang Jasa Keuangan		
1	Nasabah PNM Mekaar	15.011.876	15.065.006

e. Negara Tujuan Ekspor

No	BUMN	Realisasi Jumlah Negara Tujuan Ekspor 2023	Nama Negara
	Asdep Bidang Jasa Logistik		
1	PT Industri Kereta Api (Persero)	2	TW I: New Zealand dan Bangladesh
	TOTAL Asdep Bidang Jasa Logistik	2	
	Asdep Bidang Infrastruktur		
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	0	
2	PT Hutama Karya (Persero)	0	
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	0	
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	0	
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	0	
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1	Nepal
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	0	
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	11	TW I: Timor Leste, Bangladesh, Filipina, Australia, Fiji, Taiwan TW II: Timor Leste, Bangladesh, Filipina, Australia, Fiji, Taiwan, Sri Lanka, Hongkong, Malaysia, Korea Selatan TW IV: Timor Leste, Bangladesh, Filipina, Australia, Fiji, Taiwan, Sri Lanka, Hongkong, Malaysia, Korea Selatan, Maldives
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	0	

No	BUMN	Realisasi Jumlah Negara Tujuan Ekspor 2023	Nama Negara
10	Perum Perumnas	0	
TOTAL Asdep Bidang Jasa Infrastruktur		12	
	Asdep Bidang Industri Manufaktur		
1	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)		
2	PT Len Industri (Persero)	17	TW I: Brunei Darussalam, Canada, , Malaysia, Pakistan, Philippines, Republic of Korea, Singapore, Spain, Thailand, Timor-Leste, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America TW II: Brunei Darussalam, Canada, , Malaysia, Pakistan, Philippines, Republic of Korea, Singapore, Spain, Thailand, Timor-Leste, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America TW III: Bangladesh, Belgium, Brunei Darussalam, Canada, France, Malaysia, Pakistan, Philippines, Republic of Korea, Singapore, Spain, Thailand, Timor-Leste, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America TW IV: Bangladesh, Belgium, Brunei Darussalam, Canada, France,

No	BUMN	Realisasi Jumlah Negara Tujuan Ekspor 2023	Nama Negara
			Malaysia, Pakistan, Philippines, Republic of Korea, Singapore, Spain, Thailand, Timor-Leste, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America
TOTAL Asdep Bidang Industri Manufaktur		17,00	
	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		
1	PT Taspen (Persero)		
2	PT Asabri (Persero)		
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)		
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)		terdapat ekspor produk Reasuransi s.d. TW IV 2023 sebesar USD \$12.054.070 ke berbagai negara (tidak dapat diidentifikasi negara mana saja)
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	0	
TOTAL Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		0	
	Asdep Bidang Jasa Keuangan		

No	BUMN	Realisasi Jumlah Negara Tujuan Ekspor 2023	Nama Negara
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		0	
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media		
1	Perum Jasa Tirta I		
2	Perum Jasa Tirta II		
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara		
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia		
5	Perum Produksi Film Negara		
6	PT Danareksa (Persero)		
7	PT Barata Indonesia (Persero)	4	Mexico, USA , Chile, Georgia
8	Perum Peruri	1	Sri lanka
9	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk		
TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media		5	
Total		36,00	

f. Program Restrukturisasi BUMN

No	Nama Program Restrukturisasi/Holding	Realisasi Ketercapaian 2023
		s.d. TW IV
	Asdep Bidang Jasa Logistik	
1	Merger PPD-DAMRI	1
		1
	Asdep Bidang Jasa Infrastruktur	
1	Restrukturisasi Waskita	1
2	Restrukturisasi Perumnas	1
		0
	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	

No	Nama Program Restrukturisasi/ <i>Holding</i>	Realisasi Ketercapaian 2023
		s.d. TW IV
1	Transformasi PFN	1
		1
	Total	4,00

g. BUMN implementasi Model Bisnis terintegrasi

No	BUMN	Realisasi Ketercapaian 2023
		s.d. TW IV
	Asdep Bidang Industri Manufaktur	
1	Implementasi Program Pengadaan Bersama <i>Holding</i> DEFEND ID	V
2	Pembangunan Layanan Jasa Manajemen Dekarbonisasi Tahap 1 (Versi Alpha)	V
	Total Asdep Bidang Industri Manufaktur	2
	Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	
1	Program Pengembangan Klaster Asuransi Sosial antara PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero)	V
	Total Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	1
	Asdep Bidang Jasa Keuangan	
1	Konsolidasi dan Rebranding ATM Himbara	V
2	Integrasi EDC <i>Sharing</i>	V
	Total Asdep Bidang Jasa Keuangan	2
	Total	5

h. BUMN mengimplementasikan Program Digitalisasi

No	BUMN	Realisasi Ketercapaian 2023
		s.d. TW IV
	Asdep Bidang Logistik	
1	Pengembangan aplikasi superapps Pos	100%
2	Pengintegrasian Sistem Layanan Kapal dari Pelindo (PHINNISI) dengan Inaportnet	100%
	Total Asdep Bidang Logistik	2
	Asdep Bidang Infrastruktur	
1	Implementasi ERP dan BIM/VDC	100%
	Total Asdep Bidang Manufaktur	1
	Asdep Bidang Industri Manufaktur	

No	BUMN	Realisasi Ketercapaian 2023
		s.d. TW IV
1	Integrasi ERP di Induk <i>Holding</i> Tahap 2	100%
2	Integrasi ERP melalui Integrasi Customer Relation Management	100%
Total Asdep Bidang Industri Manufaktur		2
Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		
1	Integrasi MIS di <i>Holding</i> Asuransi dan Penjaminan	100%
Total Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		1
Total		6

i. Total % Realisasi Capex

No	BUMN	Realisasi % Capex 2023
1	Asdep Bidang Logistik	65,56%
2	Asdep Bidang Infrastruktur	59,00%
3	Asdep Bidang Industri Manufaktur	25,32%
4	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun	65%
5	Asdep Bidang Jasa Keuangan	87,34%
6	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	79,10%
Average		64%

j. Penyelesaian Target Proyek Fisik Proyek Strategis Nasional

No	Nama PSN	Realisasi % Penyelesaian PSN 2023
Asdep Bidang Logistik		
1	Makassar New Port	100%
2	Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)	79%
3	High Speed Railway Jakarta-Bandung (KCJB)	100%
4	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.	100%
5	Kawasan Terintegrasi Bakauheni (Distrik I) *	34%
Asdep Bidang Infrastruktur		
1	Bendungan Sadawarna Paket II	100%

No	Nama PSN	Realisasi % Penyelesaian PSN 2023
3	Pengaman Pantai di Jakarta Tahap 4 Paket 1	100%
4	Bendungan Margatiga (Porsi Adhi)	100%
5	Tol Cisumdawu Paket 5A (Porsi ADHI)	100%
6	Tol Serang Panimbang	18%
7	PEKERJAAN TANAH DI WILAYAH UTARA / CS WUR EARTHWORK PACKAGE 2	100%
9	Jetty Sei Pakning, Pertamina	100%
10	Bendungan Way Apu, Kab. Buru, Provinsi Maluku (Paket 01)	73%
11	Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	76%
12	Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang (Paket -1)	38%
13	Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 4 (Porsi ADHI)	35%
14	Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Labang	100%
15	Bendungan Ameroro	100%
16	Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Nyia Kulon Progo Seksi 1 paket 1.1 : Solo - Klaten	65%
18	Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Nyia Kulon Progo Seksi 2 paket 2.2 : Purwomartani - Monjali	2%
19	Tol Semarang-Demak	37%
20	Peningkatan Jaringan Irigasi Glapan	71%
21	Tol Bawen-Yogyakarta paket 1 (Seksi 1 dan Seksi 6)	57%
22	Bypass BIL Mandalika Tahap II	100%
23	Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodebek	100%
24	Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2) (I) Contract Underground Section-Civil 1	63%
25	Jalur KA Elevated Solo Tahap II	65%
26	Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh (Porsi Adhi)	94%
27	Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket-2 (Porsi Adhi)	88%
28	Jalan Tol Ruas Kisaran - Indrapura	95%
29	Jalan Tol Ruas Pekanbaru - Padang (Seksi Pekanbaru - Koto Kampar)	99%
30	Jalan Tol Ruas Pekanbaru - Padang (Seksi Padang - Sicincin)	49%
31	Jalan Tol Ruas Binjai - Langsa (Seksi Binjai - Pangkalan Brandan)	92%

No	Nama PSN	Realisasi % Penyelesaian PSN 2023
32	Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh (Porsi HK)	88%
33	Jaln Tol Ruas Simpang Indralaya - Muara Enim (Seksi Simpang Indralaya - Prabumulih)	100%
34	Jalan Tol Ruas Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (Seksi Taba Penanjung-Bengkulu)	100%
35	Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Pematang Siantar	100%
36	Jalan Tol Ruas Betung - Tempino - Jambi	0%
37	Junction Pekanbaru - Bypass Pekanbaru	13%
38	Penyelesaian Pembangunan Bendungan Keureuto (MYC)	59%
39	Bendungan Bener Paket 1	70%
40	Bendungan Bener Paket 4 (Porsi Brantas)	18%
41	Bendungan Sidan Lanjutan	51%
42	Bendungan Bagong Paket 1 (Porsi Brantas)	17%
43	Bendungan Mbay	38%
44	Bendungan Bulango Ulu Paket II	60%
45	Bendungan Jragung Paket III	70%
46	Bendungan Sepaku Semoi	100%
47	Bendungan Budong-budong	24%
48	Pembangunan jaringan irigasi D.I lematang phase II paket I	34%
49	ICB Rentang LSS-05	100%
50	Tol Cisumdawu Seksi 4B	100%
51	Tol Cisumdawu Seksi 5A (Porsi Brantas)	100%
52	Tol Jakarta - Cikampek II Selatan	36%
53	Tol Probolinggo - Banyuwangi	21%
54	Tol Yogyakarta - Bawen	14%
55	Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo	18%
56	Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi	96%
57	Bendungan Bener (Porsi PP)	36%
58	Bendungan Bagong (Porsi PP)	84%
59	Bendungan Way Apu (Porsi PP)	80%
60	Bendungan Manikin Paket II	61%
61	Bendungan Tiu Suntuk Paket II	100%
62	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan - PLBN Long Nawang	100%
63	Upgrading Kilang-Kilang Existing (RDMP)	81%

No	Nama PSN	Realisasi % Penyelesaian PSN 2023
64	Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR)	28%
65	Gedung SEKPRES dan Pendukung - IKN	24%
66	Bendungan Margatiga (Porsi WSKT)	100%
67	Bendungan Bener Paket II	40%
68	Bendungan Jlantah	77%
69	Bendungan Tiga Dihaji	29%
70	Bendungan Rukoh Paket 2 (Porsi WSKT)	66%
71	Irigasi Di Tapin Lanjutan	100%
72	Bendungan Jragung Paket 1	35%
73	Pengaman Pantai KEK Tj. Lesung Paket 1	100%
74	Jembatan Musi	100%
75	Jembatan Kramasan	100%
76	Pengarah Rukoh	21%
77	Bendungan Temef	80%
78	Rentang Irrigation Modernization Project	81%
79	Tol KLBM Seksi 2	84%
80	Toll Cimanggis-Cibitung Seksi 2	100%
81	Tol Cibitung-Cilincing	100%
82	Tol Jakarta - Cikampek Selatan Paket III	100%
83	Jalan IKN Sepaku Segmen 4	52%
84	Tol IKN Tempadung-Pulau Balang	47%
85	Tol Kayuagung - Palembang - Betung	61%
86	UPGRADING SMELTER INALUM	95%
87	SPAM REGIONAL UMBULAN PROVINSI JATIM	77%
88	Tol Bocimi Seksi 3	19%
Total		69%

k. Penggunaan TKDN

No	BUMN	Realisasi% Penggunaan PDN
Asdep Bidang Logistik		

No	BUMN	Realisasi% Penggunaan PDN
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	45,92%
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	99,79%
3	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	89,96%
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	97,62%
5	PT Pos Indonesia (Persero)	81,87%
6	PT Industri Kereta Api (Persero)	70,81%
7	Perum DAMRI	81,83%
TOTAL Asdep Bidang Logistik		81,12%
Asdep Bidang Infrastruktur		
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	100,00%
2	PT Hutama Karya (Persero)	94,40%
3	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	99,10%
4	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	99,32%
5	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	99,80%
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	91,06%
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	98,79%
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	92,81%
9	Perum Perumnas	100,00%
TOTAL Asdep Bidang Infrastruktur		97,25%
Asdep Bidang Industri Manufaktur		
1	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	79,90%
2	PT Len Industri (Persero)	24,64%
TOTAL Asdep Bidang Industri Manufaktur		29,79%
Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		
1	PT Taspen (Persero)	81,85%
2	PT Asabri (Persero)	96,46%
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	
4	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	74,37%
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	93,78%
TOTAL Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun		86,88%
Asdep Bidang Jasa Keuangan		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100,00%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	68,27%
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	98,70%

No	BUMN	Realisasi% Penggunaan PDN
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	69,13%
TOTAL Asdep Bidang Jasa Keuangan		88,64%
Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media		
1	Perum Jasa Tirta I	100,00%
2	Perum Jasa Tirta II	45,35%
3	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	82,05%
4	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	100,00%
5	Perum Produksi Film Negara	
6	PT Danareksa (Persero)	92,40%
7	Perum Peruri	82,89%
8	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	58,64%
TOTAL Asdep Bidang Telekomunikasi dan Media		60,05%
Total		73,96%

I. % Milenial dalam Top Talent

No	BUMN	Realisasi 2023
1	Asdep Bidang Logistik	17%
2	Asdep Bidang Infrastruktur	26%
3	Asdep Bidang Industri Manufaktur	40%
4	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun	33%
5	Asdep Bidang Jasa Keuangan	25,3%
6	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	18,09%
Average		27%

m. % Perempuan dalam Top Talent

No	BUMN	Realisasi 2023
1	Asdep Bidang Logistik	15%
2	Asdep Bidang Infrastruktur	18%
3	Asdep Bidang Industri Manufaktur	26,30%

No	BUMN	Realisasi 2023
4	Asdep Bidang Asuransi dan Dana Pensiun	30%
5	Asdep Bidang Jasa Keuangan	25,7%
6	Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	20,74%
	Average	23%

5. Lampiran Keasdepan di Bawah Wakil Menteri-R

a. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA KEUANGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Khoerur Roziqin
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rosan Perkasa Roeslani
Jabatan : Wakil Menteri BUMN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,
Wakil Menteri BUMN

Rosan Perkasa Roeslani
NIP WAMEN-R

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Jasa
Keuangan

Muhammad Khoerur Roziqin
NIP 197503251996021001

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja : Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				
1	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN Sektor Jasa Keuangan untuk Pemegang Saham	Cost of Credit	%	1,78
		LaR Coverage	%	45,81
		Market Capitalization	Rp Triliun	1,424
		PPOP Margin	%	47,81
		Net Profit	Rp Triliun	103
		Return On Equity	%	17,38
		Terselenggaranya RUPS Tahunan BUMN Sektor Jasa Keuangan	%	100
		Penyampaian Tanggapan atau Pembahasan Kinerja secara Berkala dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris	%	100
2	Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa Keuangan dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Nasabah Aktif Mekser	Jumlah Nasabah	15.011.876
		Jumlah Unit Rumah yang Didanai melalui KPR Program Rumah Milenial	Jumlah Unit	25.000
		Persentase total Penyaluran KUR	%	90
Prioritas II Inovasi Model Bisnis				
3	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan	Konsolidasi dan Rebranding ATM Himbara	Waktu	Triwulan IV 2023
		Integrasi EDC Sharing	Waktu	Triwulan IV 2023
4	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	97
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi				
5	Meningkatnya Tingkat Maturitas Teknologi Informasi BUMN Sektor Jasa Keuangan	IT Maturity Level	Skor	Minimal 3
Prioritas IV Peningkatan Investasi				
6	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Keuangan sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi Capex	%	80

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

7.	Meningkatnya Tata Kelola Perusahaan BUMN Sektor Jasa Keuangan	Risk Maturity Index	Skor	Minimal 3
8	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa Keuangan	Rata-rata Penggunaan TKDN	%	80
Prioritas V Pengembangan Talenta				
9	Terciptanya Inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Keuangan	Implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Keuangan	%	100
		% Milenial (<42 tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>	%	20
		% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>	%	23

Program	Anggaran
Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan BUMN	Rp1.200.000.000,-

Pihak Kedua,
Wakil Menteri BUMN

Rosan Perkasa Roeslani
NIP. WAMEN-R

Jakarta, September 2023

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

Muhammad Khoerur Roziqin
NIP. 197503251996021001

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

- Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN *TRAJECTORY TARGET*
PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Trajectory Target				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia									
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN Sektor Jasa Keuangan untuk Pemegang Saham	Cost of Credit	%	1,78	1,42	1,61	1,82	1,78	1. Monitoring pencapaian Cost of Credit secara berkala 2. Evaluasi pencapaian Cost of Credit setiap BUMN
		LaR Coverage	%	45,61	41,36	42,64	44,17	45,61	1. Monitoring pencapaian LaR Coverage secara berkala 2. Evaluasi pencapaian LaR Coverage setiap BUMN
		Market Capitalization	Rp T	1.424	-	-	-	1.424	1. Monitoring realisasi Market Cap. setiap BUMN 2. Monitoring stock performance BUMN Jasa Keuangan
		PPOP Margin	%	47,81	56,26	57,52	48,59	47,81	1. Monitoring pencapaian PPOP Margin secara berkala 2. Evaluasi pencapalan PPOP Margin setiap BUMN
		Net Profit	Rp T	103	28	57	78	103	1. Monitoring pencapaian Net Profit secara berkala 2. Evaluasi pencapaian Net Profit setiap BUMN

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Trajectory Target				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Return On Equity	%	17,46	4,63	9,29	13,49	17,38	1. Monitoring pencapaian Return on Equity secara berkala 2. Evaluasi pencapaian Return on Equity setiap BUMN
		Terselenggaranya RUPS Tahunan BUMN Sektor Jasa Keuangan	%	100	100	100	100	100	1. Monitoring penyelesaian Laporan Tahunan 2. Penyusunan dokumen dalam rangka pelaksanaan RUPS Tahunan
		Penyampaian Tanggapan atau Pembahasan Kinerja secara Berkala dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris	%	100	0	33	67	100	1. Monitoring capaian kinerja BUMN secara berkala 2. Evaluasi dan tanggapan atas kinerja BUMN secara berkala
2	Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa Keuangan dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Nasabah Aktif Mekaar	Jumlah Nasabah	15.011.876	13.674.315	14.128.150	14.577.494	15.011.876	1. Mendorong penyaluran kredit kepada nasabah PNM Mekaar dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta didukung dengan implementasi manajemen risiko yang matang.
		Jumlah Unit Rumah yang Didanai melalui KPR Program Rumah Milenial	Jumlah Unit	25.000	7.250	15.000	21.250	25.000	2. Monitoring pelaksanaan program Rumah Millenial BTN secara berkala 1. Kunjungan lapangan pelaksanaan KPR program Rumah Milenial
		Persentase Total Penyaluran KUR	%	90	23	45	68	90	2. Monitoring pelaksanaan program KUR secara berkala 3. Evaluasi penyaluran KUR oleh setiap BUMN perbankan

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Trajectory Target				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Prioritas II Inovasi Model Bisnis									
3	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan	Konsolidasi dan Rebranding ATM Himbara	Waktu	Triwulan IV 2023	-	-	-	100% sesuai timeline	1. Koordinasi dengan <i>stakeholders</i> 2. Penyusunan dokumen penyelesaian integrasi 3. Monitoring penyelesaian integrasi sesuai <i>timeline</i>
		Integrasi EDC <i>Sharing</i>	Waktu	Triwulan IV 2023	-	-	-	100% sesuai timeline	1. Koordinasi dan pembahasan program sinkronisasi melalui PMO 2. Monitoring pelaksanaan program sinkronisasi sesuai <i>timeline/roadmap</i>
4	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	97	18	40	62	97	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana penyerapan anggaran 3. Monitoring dan evaluasi capaian persentase realisasi anggaran secara berkala
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi									
5	Meningkatnya Tingkat Maturitas Teknologi Informasi BUMN Sektor Jasa Keuangan	IT <i>Maturity Level</i>	Skor	Minimal 3	-	-	-	Minimal 3	1. Monitoring <i>IT Maturity Level</i> di BUMN Perbankan 2. Evaluasi <i>IT Maturity Level</i> secara tahunan
Prioritas IV Peningkatan Investasi									
6	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Keuangan sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi <i>Capex</i>	%	60	15	30	45	60	Mendorong percepatan realisasi belanja modal melalui monitoring dan evaluasi program belanja modal perusahaan secara berkala.

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Trajectory Target				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
7	Meningkatnya Tata Kelola Perusahaan BUMN Sektor Jasa Keuangan	Risk Maturity Index	Skor	Minimal 3	-	-	-	Minimal 3	Monitoring Risk Maturity Index (RMI)
8	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa Keuangan	Rata-rata Penggunaan TKDN	%	60	-	-	-	60	Monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) BUMN Sektor Jasa Keuangan dalam pengadaan barang dan jasa
Prioritas V Pengembangan Talenta									
9	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Keuangan	Implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Keuangan	%	100	-	-	-	100% sesuai timeline	Monitoring pelaporan implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Keuangan
		% Top Talent Muda (≤42 tahun) dalam Nominated Talent	%	20	-	-	-	20	Monitoring persentase pekerja milenial dalam populasi Nominated Talent
		% Perempuan dalam Nominated Talent	%	23	-	-	-	23	Monitoring persentase perempuan dalam populasi Nominated Talent

Jakarta, 25 September 2023
Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan,

Muhammad Khoerur Roziqin
NIP 197503251996021001

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

• Kertas Kerja Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Status	Realisasi 2023	Capaian IV 2023	Saldo Capaian 2023	Nilai Kinerja Organisasi
Prioritas I Misi 1 Kemudahan dan Rantai nilai Indonesia							
Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa Keuangan dalam Pemanggang Talenta	Unit of Credit	1.78%	0	1.88%	100%	0	100.00
	Loan Coverage	88.87%	0	88.87%	100%	0	
	Market Capitalization	1.434	4	1.501	100%	0	
	FPOR Margin	47.81%	0	48.17%	100%	0	
	Net Profit	Rp 153.1	0	149	100%	0	
	Return on Equity	17.38%	0	17.87%	100%	0	
	Penyempurnaan RUPIS Tahunan BUMN Sektor Jasa Keuangan	100%	0	100%	100%	0	
	Penyempurnaan anggaran atau penjabaran biaya secara terpadu dengan Sistem terpadu	100%	0	100%	100%	0	
	Sharia Komitansi	100%	0	100%	100%	0	
	Saldo Modal Realisasi	10.211.418	0	10.200.104	100%	0	
Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa Keuangan dalam Pemanggang Talenta	Saldo modal yang disalurkan melalui RPP Program Rumah Milial	25.000	0	31.385	100%	0	100.00
Persentase total pendanaan BUMN	87%	0	87%	100%	0		
Prioritas II Inovasi Model Bisnis							
Tercapainya implementasi Model Bisnis yang terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan	Kelembagaan dan Akreditasi KRI Nasional	Target IV 2023	0	100%	100%	0	100.00
	Program FSC Group	Target IV 2023	0	100%	100%	0	
	Persentase Realisasi Anggaran	97%	0	95.00%	100%	0	
Prioritas III Regenerasi Teknologi							
Meningkatnya Tingkat Maturasi Teknologi Informasi BUMN Sektor Jasa Keuangan	IT Maturity Level	Minimal 3	0	4.10	100%	0	100.00
Prioritas IV Pengembangan Inovasi							
Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa Keuangan sebagai Agen Pembiayaan Inovasi	% Total Realisasi Capex	90%	0	87%	100%	0	100.00
	Risk Maturity Index	Minimal 3	4	3.80	100%	0	
Meningkatnya Implementasi Inovasi BUMN Sektor Jasa Keuangan	Rata Rata Penggunaan TKDN	60%	0	60.84%	100%	0	100.00
Prioritas V Pengembangan Talenta							
Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Keuangan	Implementasi Cluster Talent Committee BUMN Jasa Keuangan	100%	0	100%	100%	0	100.00
	% Milenial (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent	20%	0	20%	100%	0	
	% Perempuan dalam Nominated Talent	23%	0	23%	100%	0	
Total Nilai Saldo							100.00
Saldo Persentase 2023							100.00

b. Asisten Deputy Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA ASURANSI DAN DANA PENSIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindita Eka Wibisono
Jabatan : Plt. Asisten Deputy Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rosan Perkasa Roeslani
Jabatan : Wakil Menteri BUMN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 September 2023

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN

Rosan Perkasa Roeslani
NIP. Wamen-R

Pihak Pertama
Plt. Asisten Deputy Bidang
Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Anindita Eka Wibisono
NIP. 198501042006021002

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun untuk pemegang saham (Aset Negara)	Pengesahan RKAP 2023 dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Tepat Waktu	Persentase	100
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris	Persentase	100
		Net Profit	Rp Miliar	3,536
		Return On Equity	Persentase	5,88
		EBITDA Margin	Persentase	16,64
2	Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun terhadap pengembangan UMKM	Persentase Pelaksanaan Penjaminan KUR UMKM	Persentase	50
Prioritas II Inovasi Model Bisnis				
3	Meningkatnya transformasi bisnis BUMN untuk meningkatkan value BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase Monitoring Implementasi Inisiatif Strategis Holding Asuransi dan Penjaminan	Persentase	100
		Persentase Monitoring Pelaksanaan Rencana Perbaikan Kesehatan Keuangan PT ASABRI (Persero)	Persentase	100
		Persentase Monitoring Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Persentase	100
4	Penguatan kapasitas BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Risk Based Capital	Persentase	>120
		Expense Ratio	Persentase	21,73
5	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	97
		Indikator Kepuasan Layanan dan Dukungan Unit Kerja Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun terhadap BUMN	Skor	90
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi				
6	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Monitoring Integrasi MIS di Holding Asuransi dan Penjaminan	Persentase	50
Prioritas IV Peningkatan Investasi				
7	Meningkatnya value BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun melalui tata kelola investasi yang baik	Rasio Kekucupan Investasi	Persentase	103,62
8	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun sebagai agen pembangunan regional	% Total Realisasi Capex	Persentase	50

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
9	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Rata-rata Penggunaan TKDN	Persentase	74,23
Prioritas V Pengembangan Talenta				
10	Terciptanya Inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	% Top Talent Muda (< 42 Tahun) dalam Nominated Talent BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase	10
		% Perempuan dalam Nominated Talent Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase	20

Anggaran

4414 Pengembangan BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Rp1.200.000.000,-

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN

Rusan Perkasa Roeslani
NIP. Wamen-R

Jakarta, 13 September 2023

Pihak Pertama
Plt. Asisten Deputi Bidang
Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Anindita Eka Wibisono
NIP 198501042006021002

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

- Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TRAJECTORY TARGET
PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA ASURANSI DAN DANA PENSIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	TW I	Target Trajectory TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia								
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan <i>value</i> BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun untuk pemegang saham (Aset Negara)	Pengesahan RKAP 2023 dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Tepat Waktu	100%	50%	89%	89%	100%	1. Menganalisis dan evaluasi usulan RKAP BUMN dan Laporan <i>Audited</i> BUMN; 2. Menyusun <i>draft</i> arahan dan kebijakan atas usulan RKAP dan Laporan <i>Audited</i> BUMN; 3. Mengusulkan arahan dan kebijakan kepada Wakil Menteri BUMN II dan Menteri BUMN; 4. Pelaksanaan RUPS.
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN kepada Direksi dan Komisaris	100%	25%	50%	75%	100%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN di Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun termasuk aspek manajemen risiko; 2. Memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap pencapaian target kinerja BUMN.
		<i>Net Profit</i>	Rp3.536 Miliar	Rp884 Miliar	Rp1.768 Miliar	Rp2.652 Miliar	Rp3.536 Miliar	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian <i>Net Profit</i> setiap BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun dalam laporan berkala (triwulan dan tahunan); 2. Memberikan evaluasi arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai <i>Net Profit</i> optimal setiap BUMN.
		<i>Return On Equity</i>	5,88%	1,47%	2,94%	4,41%	5,88%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian <i>Return on Equity</i> setiap BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun dalam laporan berkala (triwulan dan tahunan); 2. Memberikan evaluasi arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai <i>Return on Equity</i> optimal setiap BUMN.

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	TW I	Target Trajectory			Rencana Aksi
					TW II	TW III	TW IV	
		EBITDA <i>Margin</i>	16,64%	17,09%	16,46%	17,27%	16,64%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian EBITDA <i>Margin</i> setiap BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun dalam laporan berkala (triwulanan dan tahunan); 2. Memberikan evaluasi arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai EBITDA <i>Margin</i> optimal setiap BUMN.
2	Meningkatnya Peran BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun terhadap pengembangan UMKM	Persentase Pelaksanaan Penjaminan KUR UMKM	60%	10%	35%	50%	60%	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan KUR UMKM; 2. Memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap pelaksanaan penjaminan KUR UMKM; 3. Memproses Surat Menteri atau Wamen yang diperlukan terkait pelaksanaan penjaminan KUR UMKM.
Prioritas II Inovasi Model Bisnis								
3	Meningkatnya transformasi bisnis BUMN untuk meningkatkan <i>value</i> BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase Monitoring Implementasi Inisiatif Strategis Holding Asuransi dan Penjaminan	100%	25%	50%	75%	100%	1. Monitoring implementasi inisiatif strategis Holding Asuransi dan Penjaminan; 2. Memberikan masukan terhadap implementasi inisiatif strategis Holding Asuransi dan Penjaminan; 3. Memproses Surat Menteri atau Wamen yang diperlukan terkait implementasi inisiatif strategis Holding Asuransi dan Penjaminan.
		Persentase Monitoring Pelaksanaan Rencana Perbaikan Kesehatan Keuangan PT ASABRI (Persero)	100%	60%	70%	80%	100%	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana perbaikan kesehatan keuangan PT ASABRI (Persero); 2. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan rencana perbaikan kesehatan keuangan PT ASABRI (Persero); 3. Memproses Surat Menteri atau Wamen yang diperlukan terkait pelaksanaan rencana perbaikan kesehatan keuangan PT ASABRI (Persero).

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	TW I	Target Trajectory TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
		Persentase Monitoring Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	100%	80%	85%	90%	100%	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana penyehatan keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya (Persero); 2. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan rencana penyehatan keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya (Persero); 3. Memproses Surat Menteri atau Wamen yang diperlukan terkait pelaksanaan rencana penyehatan keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
4	Penguatan kapasitas BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	<i>Risk Based Capital</i>	>120%	n.a	n.a	n.a	>120%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN di Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun; 2. Memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap pencapaian target kinerja BUMN.
		<i>Expense Ratio</i>	21,73%	24,30%	23,70%	22,25%	21,73%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN di Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun; 2. Memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap pencapaian target kinerja BUMN.
5	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase Realisasi Anggaran	97%	12%	31%	50%	97%	1. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan unit kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran unit kerja setiap bulannya; 3. Melaksanakan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) sesuai kebijakan dan pedoman yang telah ditentukan.
		Indikator Kepuasan Layanan dan Dukungan Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun terhadap BUMN	90	n.a	n.a	n.a	90	Melakukan survei terhadap BUMN di bawah Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun atas Kepuasan Layanan dan Dukungan

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi								
6	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Monitoring Integrasi MIS di Holding Asuransi dan Penjaminan	50%	12,5%	25%	37,5%	50%	1. Monitoring dan evaluasi atas Integrasi MIS di Holding Asuransi dan Dana Pensiun; 2. Memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap Integrasi MIS di Holding Asuransi dan Dana Pensiun.
Prioritas IV Peningkatan Investasi								
7	Meningkatnya <i>value</i> BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun melalui tata kelola investasi yang baik	Rasio Kekucupan Investasi	103,62%	103,62%	103,62%	103,62%	103,62%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN di Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun; 2. Memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap pencapaian target kinerja BUMN.
8	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun sebagai agen pembangunan nasional	% Total Realisasi Capex	50%	2,5%	10%	25%	50%	Melakukan optimisasi capaian belanja modal melalui monitoring, evaluasi program Belanja Modal perusahaan secara berkala, serta memberikan usulan kebijakan atas capaian investasi yang dilakukan BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun.
9	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa	Rata-rata Penggunaan TKDN	74,23%	n.a	n.a	n.a	74,23%	Monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun dalam pengadaan barang dan jasa.

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
Prioritas V Pengembangan Talenta								
10	Tersiptanya inkusitas bagi Perempuan dan Talenta muda di Divisi BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	% Total Talent Muda (< 42 Tahun) dalam Nominated Talent BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	10%	n.a	n.a	n.a	10%	Melakukan monitoring persentase atas % Milenial (<42 tahun) dalam Nominated Talent Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun.
		% Perempuan dalam Nominated Talent Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	20%	n.a	n.a	n.a	20%	Melakukan monitoring persentase Perempuan dalam Nominated Talent Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun.

Jakarta, 13 September 2023
Pit. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Anindita Eka Wibisono
NIP 198501042006021002

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

• Kertas Kerja Capaian Tahun 2023

Nilai Kinerja Organisasi												
Keasdepan Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Tahun 2023												
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Bobot	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023				Capaian TW IV 2023	Indeks Capaian KU
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia												
1	Kontrol BUMN dalam peningkatan nilai BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun untuk pemangku saham (Riset Negatif)	Pengelolaan RUPP 2023 dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase	8	100%	100%	90%	88%	88%	100%	100,00%	6,00
		Pemaksimalan Tanggapan Kinerja BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun secara berkala kepada Dewan Komisaris	Persentase	8	100%	100%	25%	30%	70%	100%	100,00%	6,00
		Net Profit	Rp Miliar	5	N/A	3.38	1.088	18.910	21.223	4.837	120,00%	6,00
		Return On Equity	Persentase	5	2,57%	5,88%	2,41%	33,81%	29,43%	6,88%	117,11%	5,86
		EBITDA Margin	Persentase	5	N/A	16,64%	16,99%	36,14%	37,13%	15,97%	95,37%	4,77
2	Meningkatkan Peran BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun sebagai pengendali keuangan (Utah)	Persentase Pelaksanaan Pengawasan KUR BUMN	Persentase	5	145,54%	80,00%	10,38%	35,20%	36,21%	57%	95,12%	4,78
Prioritas II Inovasi Model Bisnis												
3	Meningkatkan transformasi bisnis BUMN untuk meningkatkan nilai BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase Monitoring Implementasi Inisiatif Strategic Holding Asuransi dan Pengawasan	Persentase	8	N/A	100%	25%	30%	70%	100%	100%	9,00
		Persentase Monitoring Pelaksanaan Rencana Perbaikan Kesehatan Keuangan PT ASABRI (Persero)	Persentase	3	N/A	100%	80%	85%	90%	100%	100%	9,00
		Persentase Monitoring Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jendraya (Persero)	Persentase	3	N/A	100%	80%	85%	90%	100%	100%	9,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Bobot	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023				Capaian TW IV 2023	Indeks Capaian KU
4	Pengawasan Kapital BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Risk Based Capital	Persentase	8	128,08%	>120%	N/A	N/A	N/A	253,90%	120,08%	6,08
		Expense Ratio	Persentase	8	14,10%	21,73%	32,31%	10,78%	11,87%	16,11%	120,08%	6,00
5	Meningkatkan kualitas layanan nasabah Unit Kerja Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	5	N/A	97%	12%	32%	48%	99,62%	102,71%	5,14
		Indikator Kepuasan Layanan dan Dukungan Unit Kerja Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun terhadap BUMN	Skor	8	N/A	90	N/A	N/A	N/A	98	108,89%	6,83
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi												
6	Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Monitoring integrasi MS & Holding Asuransi dan Pengawasan	Persentase	5	N/A	81,00%	>230%	25,00%	37,50%	30%	100,00%	6,00
Prioritas IV Peningkatan Investasi												
7	Meningkatkan nilai BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun melalui laba usaha investasi yang baik	Rasio Realisasi Investasi	Persentase	5	111,11%	103,02%	106,08%	110,08%	119,07%	116,24%	112,18%	5,81
8	Kombinasi BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun sebagai agen pembangunan nasional	% Total Realisasi Capex	Persentase	5	N/A	80,00%	3,9%	12,8%	26,8%	66,3%	120,08%	6,00
9	Meningkatkan Pengawasan Komitmen Dalam Regerasi BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Rasio Rata Penggunaan TKDN	Persentase	5	N/A	74,29%	N/A	N/A	N/A	96,90%	117,04%	5,88

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Bobot	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023				Capaian TW IV 2023	Indeks Capaian KU
Prioritas V Pengembangan Talenta												
10	Pengoptimalan Industri bagi Peningkatan dan Transformasi di LINGKAS BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	% Top Talent Muda (<42 Tahun) dalam Nominal Talent BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase	8	18,80%	10,00%	N/A	N/A	N/A	30%	120,00%	7,33
		% Peningkatan dalam Nominal Talent Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	Persentase	8	27,80%	20,00%	N/A	N/A	N/A	30%	120,00%	7,33
Rata Rata Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023											108,91	
Rata Rata Persepsi MKO											SANGAT BERSUKSES	

c. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA TELEKOMUNIKASI DAN MEDIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Baktista Priyatmo Hadi
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rosan Perkasa Roeslani
Jabatan : Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 September 2023

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN

Rosan Perkasa Roeslani
NIP. Wamen-R

Pihak Pertama
Asisten Deputi Bidang
Jasa Telekomunikasi dan Media

Y.B. Priyatmo Hadi
NIP. 197201161998031001

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Keasdepan Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media
Tahun Anggaran : 2023

No	Prioritas/Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
Prioritas I : Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				
1.	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media dalam peningkatan value BUMN untuk Pemegang Saham (Aset Negara)	Net Profit	Rp Triliun	22,29
		EBITDA Margin	%	50
		Return On Equity	%	12
		Dividen BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp Triliun	6,76
		Terselenggaranya RUPS RKAP dan Audit BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media secara Tepat Waktu	%	100
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	%	100
Prioritas II : Inovasi Model Bisnis				
2.	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	Persentase Realisasi Anggaran	%	97
3.	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media yang kuat	Transformasi PFN	%	100
4.	Penguatan Kapasitas BUMN pada Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Konsolidasi PFN pada Danareksa	%	100
		Pembubaran BUMN	%	100
		Divestasi Saham Negara pada BUMN	%	100
5.	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang	Implementasi Sinergi antar Holding Danareksa	Rp Miliar	283

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas/Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
	Terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media			
Prioritas III : Kepemimpinan Teknologi				
6.	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Implementasi ERP dan GRC pada Holding Danareksa	%	100
7.	Meningkatnya Daya Saing BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	5G Readiness	Sites	500
		Pengembangan Prototype Digital Currency	%	100
Prioritas IV : Peningkatan Investasi				
8.	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi Capex Fundraising BUMN	%	70
		Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp Triliun	2
9.	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Rata-Rata Penggunaan TKDN	%	56
Prioritas V : Pengembangan Talenta				
10.	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	% Top talent muda (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent	%	10
		% Perempuan dalam Nominated Talent	%	19
11.	Meningkatnya tata kelola BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media sebagai korporasi	Tersedianya roadmap Dana Pensiun BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	%	100

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Program

Pengembangan BUMN Sektor Jasa
Telekomunikasi dan Media

Anggaran

Rp. 1.200.000.000

Jakarta, 13 September 2023

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN



Rusan Perkasa Roeslani
NIP. Wamen-R

Pihak Pertama
Asisten Deputi Bidang
Jasa Telekomunikasi dan Media



Y.B. Priyatno Hadi
NIP. 197201161998031001

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

- Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TRAJECTORY TARGET
PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA TELEKOMUNIKASI DAN MEDIA

No	Prioritas/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Trajectory (s.d. Triwulan Ke)				Rencana Aksi
				I	II	III	IV	
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia								
1.	Kontribusi BUMN dalam peningkatan <i>value</i> BUMN sektor Jasa Telekomunikasi dan Media untuk Pemegang Saham (Aset Negara)	Net Profit	Rp 22,29 T	Rp 6,52 T	Rp 17,33 T	Rp 20,00 T	Rp 22,29 T	Mendorong pencapaian <i>net profit</i> , EBITDA <i>margin</i> dan ROE, dengan mengoptimalkan <i>revenue stream</i> , meningkatkan efisiensi biaya serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Perusahaan secara periodik.
		EBITDA Margin	50%	49,62%	49,23%	49,50%	50%	
		Return On Equity	12%	3,25%	9,33%	10,00%	12,00%	
		Dividen BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp 6,76 T	n.a.	Rp 6,76 T	Rp 6,76 T	Rp 6,76 T	1. Menganalisis dan Evaluasi Laporan <i>Audited</i> BUMN Tahun Buku 2022; 2. Mengesahkan Laporan <i>Audited</i> BUMN Tahun Buku 2022.
		Terselenggaranya RUPS RKAP dan Audit BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media secara Tepat Waktu	50%	100%	100%	100%	100%	1. Menganalisis dan evaluasi usulan RKAP 2023 BUMN dan Laporan <i>Audited</i> BUMN Tahun Buku 2022; 2. Melakukan pembahasan teknis dengan BUMN; 3. Memproses SKU Menteri BUMN kepada Wamen Rosan dan Asdep; 4. Pelaksanaan RUPS.

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Trajectory (s.d. Triwulan Ke)				Rencana Aksi
				I	II	III	IV	
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	n.a	33%	66%	100%	100%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN Binaan dalam laporan berkala; 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN dalam mencapai kinerja.
Prioritas II : Inovasi Model Bisnis								
2.	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	Persentase Realisasi Anggaran	97%	20%	40%	60%	97%	1. Monitoring dan evaluasi capaian %Realisasi Anggaran unit Kerja Keasdepan Jasa Telekomunikasi
3.	Terwujudnya Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media yang kuat	Transformasi PFN	100%	n.a	n.a	100%	100%	2. Melakukan pembahasan dan penyusunan kajian perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Pemerseroan; 3. Pengajuan permohonan Izin Prakarsa PP Perubahan bentuk badan hukum; 4. Penyusunan dan pengajuan RPP Pemerseroan PFN 5. Harmonisasi RPP Pemerseroan PFN hingga terbit PP Pemerseroan PFN.

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Trajectory (s.d. Triwulan Ke)				Rencana Aksi
				I	II	III	IV	
4.	Penguatan Kapasitas BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Konsolidasi PFN pada Danareksa	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Memonitoring Penerbitan PP Pemerseroan PFN 2. Melakukan penyusunan Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN PT PFN (Persero) kepada PT Danareksa (Persero)
		Pembubaran BUMN	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Menyusun kajian atas rencana pembubaran BUMN PT PANN; 2. Memproses Keputusan RUPS atas rencana pembubaran BUMN.
		Divestasi Saham Aset Negara	100%	n.a	n.a	n.a	100%	Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelian saham PT GKBI di Primissima
5.	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Implementasi Sinergi antar Holding Danareksa	Rp 283 M	n.a	n.a	n.a	Rp 283 M	1. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan sinergi dalam Holding Danareksa; 2. Memberikan tanggapan dan arahan atas alternatif terhadap kendala yang dialami BUMN.
Prioritas III : Kepemimpinan Teknologi								
6.	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Implementasi ERP dan GRC pada Holding Danareksa	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Melakukan monitoring secara berkala atas pembangunan sistem ERP dan GRC pada Holding Danareksa. 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Trajectory (s.d. Triwulan Ke)				Rencana Aksi
				I	II	III	IV	
								kendala yang dihadapi oleh BUMN dalam mencapai kinerja
7.	Meningkatnya Daya Saing BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	5G Readiness	500 sites	n.a	n.a	n.a	500 sites	Memastikan pembangunan Tower BTS di setiap <i>sites</i> terlaksana sesuai dengan targetnya
		Pengembangan <i>Prototype Digital Currency</i>	100%	n.a	n.a	n.a	100%	Monitoring laporan triwulanan pengembangan <i>Prototype Digital Currency</i>
Prioritas IV : Peningkatan Investasi								
8.	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi <i>Capex</i>	70%	10%	25%	45%	70%	Mendorong percepatan realisasi belanja modal melalui: 1. Monitoring program belanja modal perusahaan secara berkala. 2. Memberikan dukungan koordinasi kebijakan dengan <i>stakeholders</i> terkait.
		<i>Fundraising</i> BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	Rp 2,00 T	n.a	n.a	n.a	Rp 2,00 T	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan fundraising BUMN; 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN.
9.	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN	Rata-Rata Penggunaan TKDN	56%	n.a	n.a	n.a	56%	Monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri BUMN dalam pengadaan barang dan jasa

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Prioritas/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Trajectory (s.d. Triwulan Ke)				Rencana Aksi
				I	II	III	IV	
	Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media							
Prioritas V : Pengembangan Talenta								
10.	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	% Top talent muda (≤ 42 tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>	10%	n.a	n.a	n.a	10%	Meningkatkan persentase pekerja milenial dalam populasi <i>Nominated Talent</i> .
		% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>	19%	n.a	n.a	n.a	19%	Meningkatkan persentase pekerja perempuan dalam populasi <i>Nominated Talent</i> .
11.	Meningkatnya tata kelola BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media sebagai korporasi	Tersedianya <i>roadmap</i> Dana Pensiun BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	100%	n.a	n.a	n.a	100%	Memastikan adanya dokumen <i>roadmap</i> Dana Pensiun pada Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media

Jakarta, 13 September 2023

Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media

Y.B. Priyatno Hadi
NIP. 197201161998031001

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

• Kertas Kerja Capaian Tahun 2023

REALISASI NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI KEASDEPAN JASA TELEKOMUNIKASI DAN MEDIA PADA TAHUN 2023

No	Prioritas/Sasaran Strategis BUMN	Indikator Kinerja Utama	Beban	Target Tahun	Realisasi s.d				Capaian s.d TW IV 2023	Indeks Capaian (%)	Nilai Kinerja Organisasi
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	Kinerja BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media dalam penyelenggaraan BUMN unit Pemegang Saham (Jasat Nagara)	Net Profit	8	Rp22.39 T	Rp2.32 T	Rp17.33 T	Rp25.38 T	26.69	120%	0.80	
		EBITDA Margin	5	85%	49.62%	49.23%	49.19%	49.79%	83%	0.87	
		Return On Equity	5	12%	3.20%	9.33%	10.99%	13.96%	119%	0.82	
		Deviasi BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media	8	Rp6.91 T	n.a (progress 0%)	Rp6.89 T	Rp6.89 T	9.59	120%	0.80	
		Terselenggaranya RUPS RUCAT dan Audit BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media secara tepat waktu	3	100%	0%	100%	100%	100.00%	100%	0.80	
		Pengembangan Tanggapan Kinerja BUMN Lingkup Keasdepan Jasa Telekomunikasi dan Media secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	3	100%	n.a (progress 2%)	33.00%	98%	100.00%	100%	0.80	
2	Meningkatkan kualitas layanan jasa BUMN kearah LRA Raga Asahan Daerah Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media	Persentase Realisasi Anggaran	8	87%	18.75%	37.10%	77%	89.54%	102%	0.13	
		Terselenggaranya Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media yang efisien	8	100%	n.a (progress 81%)	n.a (progress 86%)	100%	1.00	100%	0.80	
		Kemudahan PPH pada Derivatif	3	100%	n.a (progress 42%)	n.a (progress 42%)	n.a (progress 37%)	100.00	100%	0.80	
		Pembayaran BUMN	8	100%	n.a (progress 73%)	n.a (progress 100%)	n.a (progress 100%)	100.00	100%	0.80	
		Chesster Saham Nagara pada BUMN	3	100%	n.a (progress 73%)	n.a (progress 93%)	n.a (progress 35%)	100	100%	0.80	
		Pengembangan Kapasitas BUMN pada Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	8	100%	n.a (progress 73%)	n.a (progress 100%)	n.a (progress 100%)	100.00	100%	0.80	

No	Prioritas/Susunan Strategi KSI/BN	Indikator Kinerja Utama	Sektor	Target/Tujuan	Realisasi s.d				Capaian s.d TII IV 2024	Indeks Capaian KSI	Nilai Kinerja Organisasi
				Tahunan	Ta I	Ta II	Ta III	Tahunan			
1	Tercapainya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Implementasi Strategi antar Holding Dewaneka	1	Rp 283 M	n.a (Progress 40%)	n.a (progress Rp 123,3 M)	n.a (progress Rp 486 M)	502,00	120%	3,00	
	Tercapainya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Implementasi ERP dan GRC pada Holding Dewaneka	2	100%	n.a (progress 10%)	n.a (progress 40%)	n.a (progress 75%)	199,00	100%	3,00	
	Meningkatnya Daya Saing BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	5G Rollout	8	100 atau	n.a (progress 81%)	n.a (progress 88%)	n.a (progress 94%)	757,20	120%	9,00	
		Pengembangan Prototype Digital Currency	3	100%	n.a (progress 35%)	n.a (progress 75%)	n.a (progress 90%)	199,00	100%	3,00	
	3	Kinerja BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media sebagai Agen Perangsang Nasional	% Total Realisasi Capex	8	70%	21%	48%	67%	73,10%	110%	3,04
			Funding BUMN Logistik Kewadanan Jasa Telekomunikasi dan Media	3	Rp2,00 T	n.a (progress 40%)	n.a (progress 30%)	n.a (progress 00%)	Rp2,00 T	100%	3,00
4	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Rangkaian BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	Rata-Rata Penggunaan TKDN	4	90%	n.a	n.a	n.a (progress 42%)	80,00%	107%	4,20	
		% Top Talent Muda (J&J Tahun) dalam Nomisidat Talent	8	10%	n.a (progress 3%)	n.a (progress 18%)	n.a (progress 15,33%)	18,00%	100%	8,60	
	Tercapainya Inovasi/Hasil bagi Peningkatan dan Talenta Muda di Dalam BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	% Peningkatan dalam Nomisidat Talent	8	10%	n.a (progress 17%)	n.a (progress 26%)	n.a (progress 20,77%)	20,70%	100%	8,71	
		Meningkatnya laba bersih BUMN Sektor Jasa Telekomunikasi dan Media sebagai Rumpun	3	100%	n.a (progress 20%)	n.a (progress 62%)	n.a (progress 89%)	1,00	100%	3,00	
	Total Nilai Akhir										110
	Kriteria Pencapaian RNO										Tercapai

d. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA INFRASTRUKTUR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrika Nora Osloi Sinaga

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rosan Perkasa Roeslani

Jabatan : Wakil Menteri BUMN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Wakil Menteri BUMN

Rosan Perkasa Roeslani
NIP. WAMEN-R

Jakarta, 13 September 2023

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Hendrika Nora Osloi Sinaga
NIP. 197006071996032001



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				
1	BUMN Sektor Jasa Infrastruktur Unggul di Kancah Global	Nilai Ekspor BUMN	Rp miliar	4.954
2	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN Sektor Jasa Infrastruktur untuk pemegang saham	Dividen	Rp miliar	900,9
		Return on Equity	%	-2,16
		EBITDA Margin	%	18,82
		Net Profit	Rp Miliar	(5.451)
		Positive Operating Cashflow	BUMN	8
		Terselenggaranya RUPS/RPB RKAP dan RUPS/RPB Audit BUMN Jasa Infrastruktur	%	100
3	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Infrastruktur sebagai agen pembangunan nasional	Penyampaian tanggapan kinerja BUMN secara berkala kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	%	100
		Presentase Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodebek	%	100
4	Terwujudnya restrukturisasi BUMN Sektor Jasa Infrastruktur yang kuat	Presentase Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung	%	100
		Program Penyehatan Waskita (Realisasi Komitmen Kinerja Berkelanjutan)	%	75
5	Meningkatkan daya saing BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Program Penyehatan Perumnas (Pencapaian KPI)	%	75
		Kotercapaian Program Kerja Spesialisasi 2023	%	80
6	Penguatan Kapasitas BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Penciptaan Nilai dari Integrasi BUMN Semon	Rpmiliar	279
7	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur	Persentase Realisasi Anggaran	%	97
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi				
8	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Implementasi ERP dan BIM/VDC	%	100
Prioritas IV Peningkatan Investasi				
9	Meningkatkan daya saing BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Implementasi Program Asset Recycling BUMN Klaster Infrastruktur	%	70
		Risk Maturity Level	Level	3,5



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

10	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Infrastruktur sebagai agen pembangunan nasional	Asset Recycling Jalan Tol	Ruas	3
		Persentase investasi yang berhasil diselesaikan	%	60
11	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Rata-rata Penggunaan TKDN	%	84
Prioritas V Pengembangan Talenta				
12	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	% Milenial (<40%) dalam Top Talent Klaster Jasa Infrastruktur	%	17
		% Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Jasa Infrastruktur	%	12
		Pemenuhan Sertifikasi Tenaga Ahli Sesuai Kebutuhan Bisnis Perusahaan	%	75

Program

Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan BUMN

Anggaran

Rp1.200.000.000,00,-

Jakarta, 13 September 2023

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Pihak Kedua,

Wakil Menteri BUMN

Rosan Perkasa Roeslani
NIP. WAMEN-R

Hendrika Nora Oslo Sinaga
NIP. 197006071996032001

- Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY
PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA INFRASTRUKTUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Trajectory				Rencana Aksi
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia								
1	BUMN Sektor Jasa Infrastruktur Unggul di Kancah Global	Nilai Ekspor BUMN	Rp4.954 miliar	1.236	2.476	3.222	4.954	Melakukan evaluasi atas pencapaian produksi BUMN Jasa Infrastruktur di luar negeri
2	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN Sektor Jasa Infrastruktur untuk pemegang saham	Dividen	Rp900,9 miliar	-	-	-	900,9	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN dalam laporan berkala. 2. Memberikan arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi BUMN dalam mencapai kinerja
		Return on Equity	0,29%	-0,57	-0,49	-2,06	-2,16	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN dalam laporan berkala. 2. Memberikan arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi BUMN dalam mencapai kinerja
		EBITDA Margin	17,51%	14,36	15,78	17,40	16,82	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN dalam laporan berkala. 2. Memberikan arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi BUMN dalam mencapai kinerja
		Net Profit	(5.451) miliar	-	-	(4.347)	(5.451)	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian Net Profit setiap BUMN Klaster Jasa Infrastruktur dalam laporan berkala (triwulanan dan tahunan). 2. Memberikan evaluasi arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai Net Profit optimal setiap BUMN
		Positive Operating Cashflow	8 BUMN	-	-	-	8	Monitoring kecukupan Cash untuk dapat membayar kewajiban-kewajiban finansial.



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Trajectory				Rencana Aksi
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Terselenggaranya RUPS RKAP dan RUPS Audit BUMN Jasa Infrastruktur Tepat Waktu	100%	-	-	-	100	1. Menganalisis dan evaluasi usulan RKAP BUMN dan Laporan Audited BUMN 2. Memproses SKU Menteri BUMN kepada Wamen II dan Asdep
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Komisaris	100%	-	-	-	100	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN dalam laporan berkala 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN dalam mencapai kinerja
3	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Infrastruktur sebagai agen pembangunan nasional	Persentase Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodebek	100%	-	-	-	100	Melakukan evaluasi atas Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodebek secara triwulanan.
		Persentase Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung	100%	-	-	-	100	Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung secara triwulanan.
4	Terwujudnya restrukturisasi BUMN Sektor Jasa Infrastruktur yang kuat	Program Penyehatan Waskita (Realisasi Komitmen Kinerja Berkelanjutan)	75%	-	-	-	75	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Program Penyehatan Waskita (Realisasi Komitmen Kinerja Berkelanjutan).
		Program Penyehatan Perumnas (Pencapaian KPI)	75%	-	-	-	75	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Program Penyehatan Perumnas (Realisasi KPI).
Prioritas II Inovasi Model Bisnis								
5	Meningkatkan daya saing BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Ketercapaian Program Kerja Spesialisasi 2023	80%	-	-	-	80	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Revenue From Focus and Champion Segment
6	Penguatan Kapasitas BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Penciptaan Nilai dari Integrasi BUMN Semen	Rp279 miliar	-	-	-	279	Melakukan monitoring dan evaluasi atas penciptaan nilai dari integrasi BUMN Semen
7	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur	Persentase Realisasi Anggaran	97%	25	50	65	97	Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Keadepan serta melakukan upaya percepatan kegiatan agar capaian realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi								
8	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Implementasi ERP dan BIMVDC	100%	-	-	-	100	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Implementasi ERP



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Prioritas IV Peningkatan Investasi								
9	Meningkatkan daya saing BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Implementasi Program Asset Recycling BUMN Klaster Infrastruktur	70%	-	-	-	70	Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Program Asset Recycling BUMN Klaster Infrastruktur.
		Risk Maturity Level	Level 3,5	-	-	-	3,5	Monitoring pelaksanaan risk maturity level BUMN Jasa Infrastruktur.
10	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Infrastruktur sebagai agen pembangunan nasional	Asset Recycling Jalan Tol	3 Ruas	-	-	-	3	Melakukan monitoring atas divestasi/asset recycling Jalan Tol yang dilakukan oleh HK dan Waskita Karya.
		Persentase investasi yang berhasil diselesaikan	60%	20	40	50	60	Melakukan evaluasi perencanaan investasi yang akan dijalankan oleh BUMN Bidang Jasa Infrastruktur.
11	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	Rata-rata Penggunaan TKDN	84%	-	-	-	84	Monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) BUMN Sektor Jasa Infrastruktur dalam pengadaan barang dan jasa.
Prioritas V Pengembangan Talenta								
12	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	% Milenial (<40%) dalam Top Talent Klaster Jasa Infrastruktur	17%	-	-	-	17	Melakukan monitoring dan evaluasi atas % Milenial (<40%) dalam Top Talent Klaster Jasa Infrastruktur.
		% Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Jasa Infrastruktur	12%	-	-	-	12	Melakukan monitoring dan evaluasi atas % Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Jasa Infrastruktur.
		Pemenuhan Sertifikasi Tenaga Ahli Sesuai Kebutuhan Bisnis Perusahaan	75%	-	-	-	75	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Pemenuhan Sertifikasi Tenaga Ahli Sesuai Kebutuhan Bisnis Perusahaan.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

Hendrika Nora Oslo Sinaga
NIP. 197006071996032001

• Kertas Kerja Capaian Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023				Capaian	Bobot	Indeks Capaian IKU
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
1.	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia										
a.	Nilai Ekspor	Rp Miliar	4.954	2.536	871	1.287	2.641	3.368	68%		
b.	Dividen	Rp Miliar	900,9	1.201				1.201	120%		
d.	Return on Equity	Persentase	-2,19					-0,09	120%		
e.	EBITDA Margin	Persentase	16,62					18,25	110%		
c.	Net Profit	Rp Miliar	(5.451)					-231	120%		1
f.	Positive Operating Cashflow	BUMN	8					6	75%		
g.	Terselenggaranya RUPS/RPB RKAP dan RUPS/RPB Audit BUMN Jasa Infrastruktur	Persentase	100					100	100%		
h.	Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Komisaris	Persentase	100					100	100%		
i.	Persentase Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodebek	Persentase	100					100	100%		
j.	Persentase Implementasi Program Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung	Persentase	100					100	100%		
k.	Program Penyehatan Waskita (Realisasi Komitmen Kinerja Berkelanjutan)	Persentase	75					70	93%		
l.	Program Penyehatan Perumnas (Realisasi KPI)	Persentase	75					96	120%		
2.	Inovasi Model Bisnis										
a.	Ketercapaian Program Kerja Spesialisasi 2023	Persentase	80					70	88%		
b.	Penciptaan Nilai dari Integrasi BUMN Semen	Rp Miliar	279					373	120%		
c.	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	97					99,98	103%		
3.	Kepemimpinan Teknologi										
a.	Implementasi ERP dan BIM/VDC	Persentase	100					100	100%		
4.	Peningkatan Investasi										
a.	Implementasi Program Asset Recycling BUMN Klaster Infrastruktur	Persentase	70					60	86%		
b.	Risk Maturity Level	Level	3,5					3,61	103%		
c.	Asset Recycling Jalan Tol	Ruas	3					2	67%		
d.	Persentase investasi yang berhasil diselesaikan	Persentase	60					63	104%		
e.	Rata-rata Penggunaan TKDN	Persentase	84					97	116%		
5.	Pengembangan Talenta										
a.	% Milenial (<42 tahun) dalam Nominated Talent Klaster Jasa Infrastruktur	Persentase	17					26	120%		
b.	% Perempuan dalam Nominated Talent Klaster Jasa Infrastruktur	Persentase	12					18	120%		
c.	Pemerataan Sertifikasi Tenaga Ahli Sesuai Kebutuhan Bisnis Perusahaan	Persentase	75					112	120%		
Total Skor NKO											108,14
Kriteria Pencapaian NKO											Sangat Memuaskan

e. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA LOGISTIK**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desty Arlaini
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rosan Perkasa Roeslani
Jabatan : Wakil Menteri BUMN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 September 2023

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN


Rosan Perkasa Roeslani
NIP. Wamen-R

Pihak Pertama
Asisten Deputi Bidang
Jasa Logistik


Desty Arlaini
NIP. 19761204 199602 2 001



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja : Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN Sektor Jasa Logistik untuk pemegang saham	Pengesahan RKAP 2023 dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 BUMN Klaster Jasa Logistik Tepat Waktu	Persentase	100
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris	Persentase	100
		Net Profit	Rp. Triliun	4,9
		Return on Equity	Persentase	5,0
		EBITDA Margin	Persentase	17,0
Prioritas II Inovasi Model Bisnis				
2	Terwujudnya restrukturisasi BUMN Sektor Jasa Logistik yang kuat	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Transportasi Jalan	Persentase	100
		Persentase Implementasi Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Logistik Indonesia	Persentase	50
3	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	97
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi				
4	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Logistik sebagai agen pembangunan nasional	Persentase Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodebek	Persentase	100
Prioritas IV Peningkatan Investasi				
5	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Logistik sebagai agen pembangunan nasional	Persentase Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung	Persentase	100
		Persentase Pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa (bagian BMTH)	Persentase	75
		% Total Realisasi Capex	Persentase	60
6	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa Logistik	Rata-rata Penggunaan TKDN	Persentase	69,34
Prioritas V Pengembangan Talenta				
7	Terciptanya Inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Logistik	% Top talent muda (<42 tahun) dalam Nominated Talent	Persentase	14
		% Perempuan dalam Nominated Talent	Persentase	11



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Anggaran:
6602 Pengembangan BUMN Klaster Jasa Logistik (sebesar Rp1.200.000.000,-)

Jakarta, 13 September 2023

Pihak Kedua
Wakil Menteri BUMN


Rosan Perkasa Roeslani
NIP. Wamen-R

Pihak Pertama
Asisten Deputi Bidang
Jasa Logistik


Desty Arlaini
NIP. 19761204 199602 2 001

- Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY
PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG JASA LOGISTIK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	TW I	Target Trajectory			Rencana Aksi
					TW II	TW III	TW IV	
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia								
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN Sektor Jasa Logistik untuk pemegang saham	Pengesahan RKAP 2023 dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 BUMN Klaster Jasa Logistik Tepat Waktu	100%	n.a.	n.a.	100%	100%	1. Menganalisis dan evaluasi usulan RKAP BUMN dan Laporan Audited BUMN; 2. Menyusun draft arahan dan kebijakan atas usulan RKAP dan Laporan Audited BUMN; 3. Mengusulkan arahan dan kebijakan kepada Wakil Menteri BUMN II dan Menteri BUMN; 4. Pelaksanaan RUPS dan RPB.
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris	100%	n.a.	33%	67%	100%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BUMN Klaster Jasa Logistik dalam laporan berkala termasuk aspek manajemen risiko; 2. Memberikan arahan atau alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh BUMN dalam mencapai kinerja.
		Net Profit	4,9	1,5	2,9	3,7	4,9	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian <i>Net Profit</i> setiap BUMN Klaster Jasa Logistik dalam laporan berkala (triwulanan dan tahunan); 2. Memberikan evaluasi arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai <i>Net Profit</i> optimal setiap BUMN.
		Return on Equity	5,0%	1,6%	3,4%	3,7%	5,0%	3. Monitoring dan evaluasi pencapaian <i>Return on Equity</i> setiap BUMN Klaster Jasa Logistik dalam laporan berkala (triwulanan dan tahunan); 4. Memberikan evaluasi arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai <i>Return on Equity</i> optimal setiap BUMN.
		EBITDA Margin	17,0%	17,9%	17,6%	17,3%	17,0%	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian EBITDA Margin setiap BUMN Klaster Jasa Logistik dalam laporan berkala (triwulanan dan tahunan); 2. Memberikan evaluasi arahan atas solusi alternatif yang disampaikan BUMN dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai EBITDA Margin optimal setiap BUMN.



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
Prioritas II Inovasi Model Bisnis								
2	Terwujudnya restrukturisasi BUMN Sektor Jasa Logistik yang kuat	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Transportasi Jalan	100%	n.a	100%	100%	100%	1. Melakukan evaluasi atas pencapaian Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Transportasi Jalan; 2. Membuat laporan tertulis atas pencapaian Peningkatan Sinergi dan Integrasi dalam Layanan Transportasi Jalan.
		Persentase Implementasi Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Logistik Indonesia	50%	n.a	n.a	n.a	50%	1. Melakukan evaluasi atas pencapaian Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Logistik Indonesia; 2. Melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Logistik Indonesia; 3. Membuat laporan tertulis atas pencapaian Peningkatan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Logistik Indonesia.
3	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik	Persentase Realisasi Anggaran	97%	20%	50%	70%	97%	1. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan unit kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran unit kerja setiap bulannya; 3. Melaksanakan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) sesuai kebijakan dan pedoman yang telah ditentukan.
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi								
4	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Logistik sebagai agen pembangunan nasional	Persentase Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodetabek	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Melakukan evaluasi atas Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodetabek; 2. Membuat laporan tertulis atas pencapaian proses Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodetabek.
Prioritas IV Peningkatan Investasi								
5	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Logistik sebagai agen pembangunan nasional	Persentase Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung	100%	n.a	n.a	n.a	100%	1. Melakukan evaluasi atas Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung; 2. Membuat laporan tertulis atas pencapaian proses Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
		Persentase Pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa (bagian BMTH)	75%	n.a	n.a	n.a	75%	1. Melakukan evaluasi atas Pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa; 2. Membuat laporan tertulis atas pencapaian proses Pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa).



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rencana Aksi
		% Total Realisasi Capex	60%	15%	25%	40%	60%	Melakukan optimalisasi capaian belanja modal melalui monitoring, evaluasi program Belanja Modal perusahaan secara berkala, serta memberikan usulan kebijakan atas capaian investasi yang dilakukan BUMN Klaster Jasa Logistik.
6	Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa Logistik	Rata-rata Penggunaan TKDN	n.a	n.a	n.a	n.a	69,34%	Monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) BUMN Sektor Jasa dalam pengadaan barang dan jasa.
Prioritas V Pengembangan Talenta								
7	Terciptanya Inklusivitas bagi Perempuan dan Talenta muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Logistik	% Top Talent Muda (<42 tahun) dalam <i>Nominated Talent</i>	14%	n.a	n.a	n.a	14%	Melakukan monitoring persentase atas % Milenial (<42 tahun) dalam <i>Nominated Talent</i> Klaster Jasa Logistik
		% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>	11%	n.a	n.a	n.a	11%	Melakukan monitoring persentase Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i> Klaster Jasa Logistik

Jakarta, 13 September 2023

Asisten Deputi Bidang
Jasa Logistik

Desty Arlaini
NIP. 19761204 199602 2 001

• Kertas Kerja Capaian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Bobot	Realisasi			Capaian Tahun 2023	Indeks Capaian IKU	
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia											
1	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN sektor Jasa Logistik untuk pemegang saham	Pengesahan RKAP 2023 dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 BUMN Klaster Jasa Logistik Tepat Waktu	Persentase	100	6	n.a (progres 37,50%)	n.a (progres 85,00%)	86%	100%	100%	6
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris	Persentase	100	8	n.a	33%	67%	100%	100%	8
		Net Profit	Rp. Triliun	4,9	8	1,47	2,91	4,71	7,4	120%	10
		Return on Equity	Persentase	5,0	8	1,5%	3,0%	4,8%	7,25%	120%	10
		EBITDA Margin	Persentase	17,0	8	28,1%	29,2%	24,8%	25,28%	120%	10
Prioritas II Inovasi Model Bisnis											
2	Terwujudnya restrukturisasi BUMN sektor jasa logistik yang kuat	Persentase Pelaksanaan Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Transportasi Jalan	Persentase	100	6	95%	100%	100%	100%	100%	6
		Persentase Implementasi Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Logistik Indonesia	Persentase	50	6	n.a (progres 30%)	n.a (progres 50%)	n.a (progres 60%)	90%	120%	7
3	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di unit kerja Asisten Deputi Jasa Logistik	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	97	8	27%	43,8%	88,9%	99%	103%	8
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi											
4	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Logistik sebagai agenda pembangunan nasional	Persentase Implementasi Program Percepatan Proyek Pembangunan LRT Jabodebek	Persentase	100	6	n.a (progres 92%)	n.a (progres 96,80%)	n.a (progres 99,31%)	100%	100%	6
Prioritas IV Peningkatan Investasi											
5	Kontribusi BUMN Sektor Jasa Logistik sebagai agenda pembangunan nasional	Persentase Implementasi Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung	Persentase	100	6	n.a (progres 86,19%)	n.a (progres 92,50%)	n.a (progres 96,89%)	100%	100%	6
		Persentase Pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa (bagian BMTI)	Persentase	75	6	n.a (progres 64,42%)	n.a (progres 69,64%)	n.a (progres 75,26%)	79,42%	106%	6
		% Total Realisasi Capex	Persentase	60	6	13,76%	27,64%	43,18%	66%	110%	7
6	Menghasilkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Jasa Logistik	Rata-Rata Penggunaan TKDN	Persentase	69,34	6	n.a	n.a	n.a	81,12%	117%	7
Prioritas V Pengembangan Talenta											
7	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Jasa Logistik	% Top talent muda (s 42 tahun) dalam Nominated Talent	Persentase	14	6	n.a (progres 21,70%)	n.a (progres 21,13)	n.a (progres 23,45%)	17%	120%	7
		% Perempuan dalam Nominated Talent	Persentase	11	6	n.a (progres 17,67%)	n.a (progres 17,07)	n.a (progres 17,07)	15%	120%	7
Total Nilai Akhir											110,54
Kriteria Pencapaian NKO											Sangat Memuaskan

f. Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

-1-

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Liliek Mayasari
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rosan Perkasa Roeslani
Jabatan : Wakil Menteri BUMN

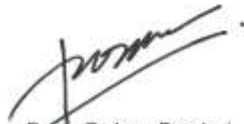
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,
Wakil Menteri BUMN


Rosan Perkasa Roeslani
NIP. Wamen-R

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Industri
Manufaktur


Liliek Mayasari
NIP. 196908241996032001



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

- 2 -

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur
Tahun Anggaran : 2023

No	Prioritas/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2023
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				
1	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Nilai BUMN Sektor Industri Manufaktur untuk Pemegang Saham	Net Profit	Rp Triliun	1,47
		EBITDA Margin	%	12,47
		Return on Equity	%	7,04
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris	%	100
2	Meningkatnya Daya Saing BUMN Sektor Industri Manufaktur	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah Negara	15
Prioritas II Inovasi Model Bisnis				
3	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Industri Manufaktur	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis terintegrasi	Jumlah BUMN	2
4	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur	Persentase Realisasi Anggaran	%	97
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi				
5	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Industri Manufaktur	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi	Jumlah BUMN	2
Prioritas IV Peningkatan Investasi				
6	Kontribusi BUMN Sektor Industri Manufaktur sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi Capex	%	50
7	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Industri Manufaktur	Rata-rata Penggunaan TKDN	%	49,46
		% Program Hilirisasi yang Berhasil Dijalankan	%	100
Prioritas V Pengembangan Talenta				
8	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Industri Manufaktur	% Top Talent Muda (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent	%	36,25
		% Perempuan dalam Nominated Talent	%	21,40



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

- 3 -

Anggaran:

Pembinaan Pengembangan BUMN Sektor Industri Manufaktur sebesar Rp1.200.000.000,-

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,
Wakil Menteri BUMN

Rosari Perkasa Roeslani
NIP. Wamen-R

Pihak pertama,
Asisten Deputi Bidang Industri
Manufaktur

Liliek Mayasari
NIP. 196908241996032001

• Rencana Aksi dan Trajectory Target



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

- 4 -

RENCANA AKSI DAN TARGET TRAJECTORY
PERJANJIAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR

No	SS Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	2023	Trajectory Target (Akumulasi Triwulanan)				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia									
1	Kontribusi BUMN dalam meningkatkan value BUMN Sektor Industri Manufaktur untuk pemegang saham	Net Profit	Rp Triliun	1,47	0,23	0,29	0,85	1,47	Mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan untuk pencapaian <i>Net Profit</i> , <i>ROE</i> , <i>EBITDA Margin</i> melalui: • Monitoring bulanan dan triwulanan kinerja keuangan perusahaan. • Mendorong program efisiensi operasional perusahaan dan peningkatan <i>working capital</i>. • Evaluasi dan penilaian triwulanan terhadap kinerja keuangan perusahaan
		EBITDA Margin	%	12,47	12,63	10,85	10,39	12,47	
		Return on Equity	%	7,04	1,21	1,64	4,63	7,04	
		Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala pada Direksi dan Dewan Komisaris	%	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
2	Meningkatnya daya saing BUMN Sektor Industri Manufaktur	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Jumlah Negara	15,00	8	10	12	15	Mendorong perluasan pasar di kancah internasional atas produk domestik yang dihasilkan guna memperkuat posisi ekonomi BUMN Sektor Industri Manufaktur secara global melalui maksimalisasi jumlah negara ekspor



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

- 5 -

No	SS Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	2023	Trajectory Target (Akumulasi Triwulanan)				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Prioritas II Inovasi Model Bisnis									
3	Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Industri Manufaktur	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis Terintegrasi	Jumlah BUMN	2,00	n.a	n.a	n.a	2,00	Mendorong peningkatan integrasi model bisnis BUMN sektor Industri Manufaktur melalui implementasi pengadaan bersama untuk general item di <i>Holding Defend ID</i> dan pembangunan layanan jasa manajemen dekarbonisasi Tahap 1 (<i>Versi Alpha</i>)
4	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur	Persentase Realisasi Anggaran	%	97,00	20,25	37,02	60,00	97,00	Mendorong produktivitas dan pencapaian target kinerja melalui ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran unit kerja keasdepan



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

- 6 -

No	SS Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	2023	Trajectory Target (Akumulasi Triwulanan)				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi									
5	Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Industri Manufaktur	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi	Jumlah BUMN	2,00	n.a	n.a	n.a	2,00	Mendorong penerapan program digitalisasi pada BUMN, melalui Integrasi ERP di Induk Holding tahap 2 pada Holding BUMN Industri pertahanan dan Tahap Lanjutan Integrasi ERP – Integrasi Customer Relation Management (CRM) pada BUMN Jasa Survei
Prioritas IV Peningkatan Investasi									
6	Kontribusi BUMN Sektor Industri Manufaktur sebagai Agen Pembangunan Nasional	% Total Realisasi Capex	%	50,00	4,94	8,77	40,00	50,00	Mendorong percepatan realisasi investasi melalui: Monitoring program investasi perusahaan secara berkala. Memberikan dukungan koordinasi kebijakan dengan stakeholder terkait.
7	Meningkatnya Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Industri Manufaktur	Rata-rata Penggunaan TKDN	%	49,46	26,08	35,74	36,71	49,46	Mendorong realisasi rata-rata penggunaan tingkat kandungan dalam negeri melalui monitoring dan evaluasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) BUMN Sektor Industri Manufaktur dalam pengadaan barang dan jasa.



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

- 7 -

No	SS Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	2023	Trajectory Target (Akumulasi Triwulanan)				Rencana Aksi
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
		% Program Hilirisasi yang Berhasil Dijalankan	%	100,00	n.a	96,00	100,00	100,00	Mendorong percepatan program hilirisasi PT Dahana, yaitu Komersialisasi Pabrik Amonium Nitrate di Bontang melalui monitoring progres komersialisasi secara berkala
Prioritas V Pengembangan Talenta									
8	Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Industri Manufaktur	% Top Talent Muda (≤ 42 Tahun) dalam Nominated Talent	%	36,25	33,82	34,81	35,25	36,25	Mendorong peningkatan pekerja milenial yang potensial untuk masuk ke dalam <i>nominated talent</i>
		% Perempuan dalam Nominated Talent	%	21,40	19,62	22,89	20,40	21,40	Meningkatkan keterlibatan perempuan dan mendorong peningkatan persentase perempuan dalam <i>nominated talent</i>

Jakarta, September 2023
Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur


Liliek Mayasari
NIP. 196908241996032001

• Kertas Kerja Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi	Indeks Capaian IKU	Nilai Monev Organisasi
Prioritas I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia									100,96
Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN Sektor Industri Manufaktur	1	Net Profit	10	Rp Triliun	1,47	1,47	100,20%	10,02	
	2	EBITDA Margin	10	%	12,47	12,73	102,10%	10,21	
	3	Return on Equity	10	%	7,04	6,87	97,60%	9,76	
	4	Penyampaian Tanggapan Kinerja BUMN secara Berkala kepada Direksi dan Komisaris	10	%	100,00	100,00	100,00%	10	
Meningkatkan Daya Saling BUMN Sektor Industri Manufaktur	5	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	10	Jumlah Negara	15	17	113,30%	11,33	
Prioritas II Inovasi Model Bisnis									
Terwujudnya Implementasi Model Bisnis yang Terintegrasi pada BUMN Sektor Industri Manufaktur	6	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Model Bisnis Terintegrasi oleh BUMN	5	Jumlah BUMN	2	2	100,00%	5	
Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur	7	Persentase Realisasi Anggaran	10	%	97,00	99,95	103,00%	10,3	
Prioritas III Kepemimpinan Teknologi									
Terwujudnya Transformasi Digital pada BUMN Sektor Industri Manufaktur	8	Jumlah BUMN yang mengimplementasikan Program Digitalisasi	5	Jumlah BUMN	2	2	100,00%	5	
Prioritas IV Peningkatan Investasi									
Kontribusi BUMN Sektor Industri Manufaktur sebagai Agen Pembangunan Nasional	9	% Total Realisasi Capex	5	%	50,00	25,32	50,60%	2,53	
Meningkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri oleh BUMN Sektor Industri Manufaktur	10	Rata-rata Penggunaan TKDN	5	%	49,46	52,27	105,70%	5,28	
	11	% Program Hilirisasi yang Berhasil Dijalankan	10	%	100,00	100	100,00%	10	
Prioritas V Pengembangan Talenta									
Terciptanya Inklusifitas bagi Perempuan dan Talenta Muda di Direksi BUMN Sektor Industri Manufaktur	12	% Top Talent Muda (< 42 tahun) dalam Nominated Talent	5	%	36,25	39,97	110,20%	5,51	
	13	% Perempuan dalam Nominated Talent	5	%	21,40	26,3	120,00%	6	
Kriteria Pencapaian NKO									Sangat Memuaskan